

GEDUNG AGUNG YOGYAKARTA
(ISTANA KEPRESIDENAN DI YOGYAKARTA)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

GEDUNG AGUNG YOGYAKARTA (ISTANA KEPRESIDENAN DI YOGYAKARTA)

Disusun oleh :

Tashadi

Djoko Soekiman

Poliman

S. Ilmi Albiladiyah

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (ISDN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek ISDN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan, dengan terbitnya buku-buku ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pemba-

ngunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, September 1985

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof Dr Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan Sejarah Istana-istana Kepresidenan.

Penulisan Sejarah Istana-istana Kepresidenan adalah suatu upaya penulisan sejarah dari gedung-gedung istana kepresidenan sebagai lokasi peristiwa-peristiwa bersejarah. Di Indonesia ada enam gedung istana kepresidenan, yaitu Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas, Gedung Agung, dan Istana Tampaksiring. Di antara enam bangunan ini, lima sudah dibangun pada zaman Hindia Belanda; dengan kata lain gedung-gedung ini sudah memainkan peranan penting pada zaman kolonial.

Oleh sebab itu, walaupun penulisan Sejarah Istana-istana Kepresidenan yang dilaksanakan oleh Proyek IDSN lebih menitikberatkan pada masa pemerintahan Republik Indonesia, namun peranan gedung-gedung tersebut pada zaman kolonial juga mendapatkan perhatian terutama sebagai pusat penguasa kolonial membuat keputusan yang telah mempengaruhi jalannya sejarah bangsa kita.

Dengan tersusunnya Sejarah Istana-istana Kepresidenan ini, diharapkan masyarakat luas dan para pelajar dapat memperoleh gambaran tentang fungsi gedung-gedung tersebut sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia.

Dalam kerangka tujuan yang lebih luas, Sejarah Istana-istana Kepresidenan sebagai pusat pengetahuan mengenai proses kejadian sejarah bangsa diharapkan dapat memberikan dorongan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda.

Jakarta, Desember 1985
Proyek Inventarisasi dan Sejarah
Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Sejarah Berdirinya	9
Bab III Sejarah Penggunaannya	19
3.1 Masa Kolonial	19
3.2 Masa Republik Indonesia	44
Bab IV Arsitektur	77
4.1 Bangunan Asli	77
4.2 Bangunan Tambahan/Perbaikan	90
4.3 Lain-lain	92
Bab V Penutup	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105
FOTO	133



BAB I PENDAHULUAN

Sejarah suatu gedung atau bangunan rumah tinggal pada hakekatnya mempunyai kaitan erat sekali dengan para penghuninya. Dengan kata lain bangunan tidak dapat terlepas dari peranan para penghuninya, lebih-lebih gedung atau bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sejarah suatu gedung atau bangunan tidak akan mempunyai "arti" atau "makna" apabila hanya bercerita tentang kapan gedung itu dibangun, kapan pembangunannya selesai, siapa arsiteknya dan berapa biaya pembangunannya. Gedung atau bangunan itu akan lebih berarti dan bermakna apabila sejarahnya dikaitkan dengan para penghuni atau yang pernah menghuninya; artinya, di samping diceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan gedung tersebut, diceritakan pula tentang apa dan bagaimana peranan para penghuni atau yang pernah menghuni serta orang-orang yang berhubungan erat dengan bangunan tersebut. Dengan demikian maka sejarah gedung tersebut akan membawa rentetan sejarah yang panjang.

Bertitik tolak dari pengertian ini maka penulisan sejarah Gedung Agung atau Istana Kepresidenan di Yogyakarta tidak terbatas pada sejarah bangunan atau gedungnya saja, tetapi juga menyangkut tentang sejarah para penghuninya walaupun dengan konstelasi dan iklim politik baik regional maupun nasional dari zaman ke zaman, sejak dibangunnya bangunan atau

gedung itu atau bahkan jauh sebelumnya sampai dengan keadaannya sekarang. Pengungkapan tentang masa-masa sebelum gedung itu dibangun, dimaksudkan agar dapat diketahui situasi yang melatarbelakangi dibangunnya gedung tersebut. Hal ini penting untuk diungkapkan, karena gedung yang kemudian terkenal dengan nama Gedung Agung itu memiliki sejarah yang panjang dan mempunyai peranan serta fungsi yang penting dalam panggung sejarah bangsa Indonesia. Banyak kejadian dan peristiwa-peristiwa penting di gedung ini. Untuk itu, dalam tulisan ini dicoba untuk mengungkapkannya secara utuh dan lengkap. Kisahnya diawali dari Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755¹), yang kemudian melahirkan suatu kerajaan baru yakni "Kasultanan Ngayogyakarta" (Kesultanan Yogyakarta).

Sebagai sultan yang pertama adalah Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Abdulrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah I. Sultan Hamengku Buwono I adalah seorang raja yang sangat berani dan disegani. Untuk mengimbangi perkembangan Kesultanan Ngayogyakarta itu, Pemerintah Kolonial Belanda (VOC) kemudian membangun sebuah gedung Keresidenan Yogyakarta. Pembangunan gedung keresidenan ini pada hakekatnya adalah akibat adanya dorongan kepentingan VOC untuk meletakkan fondasi bagi pengaruh kekuasaannya dalam rangka mengimbangi perkembangan "Kasultanan Ngayogyakarta"²).

Pembangunan dan perbaikan gedung keresidenan ini bermula dari ide yang diajukan oleh Residen Anthoni Hendrik Smissaert (10 Februari 1823 – 26 September 1825) yang mengusulkan untuk mengubah ruangan tamu resmi (bangunan yang ada) menjadi rumah kediaman residen. Ide itu akhirnya dapat diterima, dan pada tahun 1824 pembangunannya mulai dilaksanakan. Setelah memakan waktu kurang-lebih 30 tahun lamanya serta dengan biaya tidak sedikit, gedung keresidenan ini akhirnya selesai dibangun seluruhnya. Ternyata dalam perjalanan panggung sejarah bangsa Indonesia gedung ini mempunyai peranan yang penting dalam rangka pelaksanaan politik pemerintah kolonial baik di tingkat regional maupun nasional.

Dalam pada itu sejak tahun 1927 peranan gedung ini lebih meningkat lagi yaitu setelah status Keresidenan Yogyakarta diubah menjadi gubernuran. Sebagai gubernur pertama yang mendiami gedung itu adalah J.E.Jasper (1927 – 1929). Adanya perubahan status gedung ini mengakibatkan fungsi dan peranannya semakin kompleks; tidak hanya terbatas pada urusan regional saja, tetapi harus pula menghadapi urusan-urusan yang bersifat nasional, bahkan internasional.

Sementara itu dengan berkuasanya balatentara Jepang di Indonesia, gedung gubernuran di Yogyakarta ini kemudian digunakan sebagai rumah gubernur dan disebut *tyookan kantai*. Gedung itu kemudian didiami secara resmi oleh *koochi zimmukijoku tyookan* pada tanggal 5 Maret 1942³⁾. Untuk lebih memperkuat dan memperkokoh kedudukannya, Pemerintah Balatentara Jepang di samping menempatkan polisi militer yang disebut *kem pei tai* juga menempatkan pasukan tempurnya di Kotabaru. Selanjutnya dengan menyerahnya balatentara Jepang kepada tentara Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini ternyata tidak disia-siakan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia telah berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal Proklamasi itu, situasi amat mencekam dan ketegangan terjadi di mana-mana; bahkan sering terjadi bentrokan dan pertempuran. Demikian pula di Yogyakarta, pada masa awal Proklamasi itu suasana tegang dan panas selalu mencekam.

Pada tanggal 21 September 1945, terjadilah suatu peristiwa heroisme di gedung *tyookan kantai*⁴⁾. Pada waktu itu massa rakyat dan pemuda bergerak menuju gedung *tyookan kantai* yang kemudian berhasil menurunkan bendera *hinomaru* dan diganti dengan Sang Saka Merah Putih. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945, gedung itu akhirnya dapat dikuasai dan diduduki oleh massa rakyat.⁵⁾ Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, gedung bekas *tyookan kantai* itu dipakai untuk kantor Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas memiliterisasi Badan Keamanan Rakyat serta dengan tugas rangkapnya yaitu fungsi-fungsi poli-

tik sebagai saluran kehendak rakyat dan fungsi-fungsi legislatif, karena badan pekerjaanya bertindak sebagai pembuat undang-undang bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu dengan makin tegangnya situasi di Jakarta sebagai akibat konflik yang semakin meruncing antara Pemerintah Republik dengan pasukan Sekutu, pada tanggal 4 Januari 1946 presiden bersama beberapa pejabat tinggi pemerintah pusat pindah ke Yogyakarta⁶). Adapun mengenai alasan pemindahan sebagai diungkapkan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamijoyo, adalah sebagai berikut.

"Pemindahan ini tidak menjadi sebab untuk mengubah pendirian pemerintah terhadap luar maupun dalam negeri. Pemindahan ini beralasan dalam hal :

1. Keadaan tidak aman yang terdapat di Jakarta
2. Untuk menyempurnakan organisasi dalam negeri

Bahwa Kota Jakarta pada masa ini makin lama makin tidak aman buat rakyat Indonesia umumnya dan buat pemimpin-pemimpin negara khususnya. Tidak perlu kami ceritakan panjang lebar lagi, cukuplah kiranya kami peringatkan tentang percobaan pembunuhan atas diri PM. Syahrir dan terhadap saudara Amir Syarifudin SH., yang saudara-saudara tentu sudah maklum.

Siapakah yang menyebabkan tidak aman itu, tidak perlu kami terangkan lagi, meskipun dari pihak serikat katanya telah mengambil tindakan untuk mengendalikannya terorisme Belanda. Nyatalah bahwa keamanan pemimpin-pemimpin kita tidak dapat dijamin lagi. Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat sementara Pemerintah Agung. Alasan itu pada hakekatnya mengenai bagian yang penting dari perhubungan kita, bahkan dari revolusi rakyat Indonesia pada masa itu.

Sebab pemerintah agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah Kota Mataram akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan di daerah-daerah"⁷).

Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 1946, Yogyakarta diresmikan sebagai ibukota Republik Indonesia, dan bekas *tyookan kantai* dipakai sebagai istana presiden, sedangkan wakil presiden menempati bekas kantor asisten residen (seka-

rang Kowilhan II) yang berada di Jalan Reksobayan No. 4, Yogyakarta.

Demikianlah sejak tanggal 6 Januari 1946 sampai dengan Desember 1949 istana kepresidenan yang kemudian dikenal sebagai Gedung Agung (sejak tahun 1950) ini secara resmi berfungsi dan berperan sebagai istana presiden atau gedung kepresidenan. Dengan demikian Istana Yogyakarta atau Gedung Agung adalah istana yang pertama-tama didiami oleh seorang presiden Republik Indonesia yaitu pada periode perjuangan Republik tahun 1946 – 1949. Akibatnya istana kepresidenan ini kemudian menjadi pusat segala kegiatan dan kesibukan, di mana para pejabat pemerintahan dalam dan luar negeri, militer dan sipil datang dan pergi dengan tugas dan kepentingannya masing-masing. Kecuali itu pada periode ini Kota Yogyakarta termasuk pula istana kepresidenan yang menjadi pusat perhatian dunia internasional, sehingga pada waktu Belanda ingin kembali menjajah bumi Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta menjadi ajang pemboman dan serbuan tentara Belanda, dan akhirnya ibukota republik tersebut dapat diduduki oleh tentara Belanda. Namun demikian ternyata istana kepresidenan itu tidak ditempati oleh tentara Belanda. Belanda hanya menempatkan sebuah pos polisi militer di bekas kantor asisten residen.

Dengan ditandatanganinya Persetujuan Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1949, yang antara lain berisi penghentian tembakan, pengembalian Yogyakarta dan kota-kota lain kepada Republik Indonesia, dan membebaskan presiden, wakil presiden serta pemimpin-pemimpin lainnya, pada tanggal 30 Juni 1949 Kota Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Pasukan-pasukan Belanda ditarik mundur seluruhnya dari Kota Yogyakarta. Setelah itu Gedung Agung berfungsi kembali menjadi istana presiden. Namun perannya hanya setahun, karena pada tanggal 28 Desember 1949 Presiden Soekarno meninggalkan Istana Yogyakarta untuk memenuhi tugas sebagai presiden RIS dan mendiami Istana Negara di Jakarta. Sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Gedung Agung dipergunakan sebagai tempat

tinggal Acting Presiden Mr. Assaat. Setelah Republik Indonesia Serikat dilebur kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beribukota di Jakarta, Istana Kepresidenan Yogyakarta diberi nama Gedung Agung dan berfungsi serta berperan sebagai istana presiden. Peranan ini kemudian lebih dikokohkan dengan keluarnya surat keputusan dari Menteri/Sekretaris Negara Nomor: Kep. 046/M.Ses Neg/8/1973 tanggal 8 Agustus 1973 tentang Pengaturan Istana Negara sebagai Rumah Tangga Kepresidenan⁸⁾.

Demikianlah gambaran sekilas Sejarah Gedung Agung Yogyakarta. Semoga apa yang menjadi tujuan penulisan sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan yakni untuk kepentingan pendidikan dalam rangka sejarah perjuangan bangsa dan untuk kepentingan pariwisata sebagai informasi kepada para pengunjungnya, dapat terpenuhi dan terujud.

Yogyakarta, awal Januari 1986

Team Penyusun

CATATAN BAB I

1. Untuk lebih jelasnya baca "Dr. Soekanto, Sekitar Yogyakarta 1755 – 1825, Penerbit Mahabarata, Jakarta-Amsterdam, 1952, hal. 8 secara lengkap isi perjanjian tersebut dimuat pada lampiran 7.
2. Sejarah Gedung Agung, brosur yang belum diterbitkan.
3. Mohammad Roem, Mochtar Lubis. Kustiniyati Mochtar dan S. Maimoen, Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 59.
4. Lihat Tashadi dan kawan-kawan, Sejarah Masa Revolusi kemerdekaan (1945 – 1949). Di daerah Istana Yogyakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DIY. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1979/1980, hal. 73 – 75, belum diterbitkan.
5. Ibid, halaman 102.
6. O.Aman Raliby, Dokumen Sejarah Indonesia 17 Agustus 1945 – 31 Desember 1946, Jakarta 1952, hal. 176. Lihat pula Tashadi, Dkk. Ibid halaman 126.
7. Kempen, Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1953, hal. 130.

8. Lihat lebih lanjut, Sejarah Gedung Agung, brosur yang belum diterbitkan.
9. Lihat, cakupan Tugas Penulisan Sejarah Istana-istana kepresidenan, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Nasional. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1984/1985.

BAB II SEJARAH BERDIRINYA

Pada hari Kamis Kliwon, tanggal 29 Rabiulawal 1680 atau 13 Pebruari 1755 ditandatangani suatu perjanjian perdamaian antara Pangeran Mangkubumi dengan Nicolaas Hartingh, gubernur pantai utara Jawa, sebagai wakil Kompeni. Penandatanganan perjanjian itu dilakukan di Desa Giyanti; salah satu desa kecil di dekat Karanganyar, Surakarta. "Perjanjian Giyanti" atau disebut "Palihan Nagari", karena isi perjanjian itu terutama adalah membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yakni setengah bagian tetap menjadi daerah kekuasaan Sunan Pakubuwono III dengan ibukota Surakarta, dan yang setengah bagian lainnya dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi yang sejak itu bergelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Abdulrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah I. Pada tanggal 13 Februari 1755 itu lahirlah suatu kerajaan baru yang diberi nama "Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat" dengan ibukota "Ngayogyakarta"¹). Setelah itu Sultan Hamengku Buwono I melantik Tumenggung Yudanegara menjadi "Patih Ngayogyakarta" dengan gelar Patih Danureja. Selanjutnya menyusul pengangkatan pejabat-pejabat pemerintah lainnya seperti Raden Ranga Prawirasentika menjadi bupati Madiun merangkap bupati wedana "mancanagara" dengan gelar Raden Ranga Prawiradirja. Setelah pejabat-pejabat pemerintahan kerajaan lengkap, maka sultan memutuskan untuk membangun istana

yang akan dijadikan sebagai tempat kedudukan pemerintahannya. Daerah yang dipilih sebagai lokasi pembangunan kraton sebagai pusat pemerintahan kerajaan yaitu Hutan Beringan.

Menurut *Babad Giyanti*, di Hutan Beringan terdapat suatu desa kecil bernama Desa Pacetokan. Di dekat desa itu Sunan Amangkurat IV (1719 – 1727) pernah membangun suatu pesanggrahan yang diberi nama Garjitawati. Pada waktu Sunan Paku Buwono II berkunjung ke pesanggrahan tersebut pada tahun 1939, nama Garjitawati diganti dengan Ngayogya²). Penggantian nama ini karena adanya bisikan gaib ("wisik") yang diterima Sunan Paku Buwono II.

Dalam pada itu menurut cerita dari mulut ke mulut (diketahui secara terbatas dan hidup di lingkungan istana) dikatakan bahwa Pesanggrahan Garjitawati itu dibangun setelah Sunan Amangkurat IV mendapat bisikan gaib bahwa wahyu Kraton Mataram kelak akan pindah ke Hutan Beringan, karena itu Hutan Beringan akan menjadi negeri yang ramai dan makmur.

Di samping itu, berdasarkan catatan perjalanan Gubernur Jenderal Van Imhoff (1743 – 1750) ke Istana Mataram pada tahun 1746, disebutkan gubernur jenderal beserta pengikutnya dalam perjalanan pulang ke Batavia melalui daerah Bagelen dan Banyumas pernah beristirahat di Pesanggrahan Ngayogya. Catatan itu selanjutnya menyebutkan pula bahwa tidak jauh dari Pesanggrahan Ngayogya terletak Kotagede, bekas ibukota Mataram. Selanjutnya dicatat pula Kotagede itu dilalui jalan menuju ke makam raja-raja di Imogiri dan jalan ke Pesanggrahan Parangtritis di pantai laut selatan.

Selain itu ada juga sebuah legende yang menarik sehubungan dengan pemilihan Hutan Beringan sebagai lokasi pembangunan kraton. Ceritanya adalah sebagai berikut.

Pada suatu hari ada seorang "pekatik" (pencari rumput) sedang mencari rumput di Hutan Beringan. Karena merasa haus, ia berusaha mencari sumber air untuk minum. Tiba-tiba ia melihat beberapa ekor burung bangau terbang menuju ke tengah hutan. "Pekatik" itu menduga bahwa burung bangau itu tentu

terbang ke tempat sumber air. Dugaannya benar, karena di tengah hutan itu ternyata ada kolam air yang jernih. Ketika ia hendak minum, "pekatik" itu terkejut dan lari, sebab di hadapannya ada seekor naga besar. Tetapi ternyata naga itu kemudian menahannya dan mengatakan bahwa namanya Kiai Jaga, jin yang menjaga Hutan Beringan. Ia tidak berniat jahat dan hanya ingin menyampaikan pesan agar "pekatik" itu memberitahu rajanya bahwa Hutan Beringan itu adalah tempat yang paling baik untuk membangun istana. Setelah mendapat pesan itu, "pekatik" segera lari untuk menghadap rajanya yang tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang yang terletak kurang-lebih 5 km di sebelah barat Hutan Beringan. Di hadapan raja, pekatik itu kemudian menyampaikan pesan naga tersebut. Itulah sebabnya kemudian Sultan Hamengku Buwono I memerintahkan agar membuka Hutan Beringan yang akan dipergunakan sebagai tempat pusat pemerintahannya⁴).

Hutan Beringan itu ternyata tanahnya rata dan landai, serta terletak di antara dua buah sungai yang jernih airnya, yaitu Sungai Code di sebelah timur dan Sungai Winongo di sebelah barat. Di samping itu daerah Hutan Beringan ini adalah suatu daerah yang bersejarah sebab pada tahun 1747 dan 1749 di daerah itu pula Pangeran Mangkubumi mengumumkan dirinya sebagai "Susuhunan Ing Mataram", di hadapan rakyatnya sehingga sudah selayaknya apabila sultan memilih tempat itu sebagai lokasi pembangunan kratonnya. Pembangunan istana dimulai pada hari Kamis Pon, tanggal 3 Sura, tahun Wawu 1681 atau tanggal 9 Oktober 1755. Pada hari Kamis Pahing, tanggal 13 Sura tahun Jimakir 1682 atau tanggal 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengkubuwono I mulai menempati Kraton Yogyakarta. Peristiwa ini ditandai dengan lukisan sepasang naga yang ekornya saling melilit. Lukisan ini mengandung makna candra sengkala, yakni "Dwi Naga Rasa Tunggal" (1682 atau tahun 1756 M). Istana ini kemudian diberi nama "Ngayogyakarta" yang selanjutnya di samping menjadi pusat pemerintahan Sultan Hamengku Buwono, juga merupakan titik awal terbentuknya Kota Yogyakarta.

Sementara itu di pihak Kompeni senantiasa mengikuti perkembangan kedua kerajaan, yakni Surakarta dan Yogyakarta yang sedang dalam pertumbuhan itu. Kompeni menyadari bahwa Kerajaan Surakarta mudah dihadapi, karena sudah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan VOC, tetapi Kesultanan Yogyakarta di bawah Sri Sultan Hamengku Buwono I yang selamanya melawan dan menentang politik VOC, perlu diadakan pendekatan yang lebih intensif dengan cara mengawasi setiap gerak perkembangannya. Untuk keperluan itu, VOC menempatkan seorang petugas khusus yang bertanggung jawab kepada gubernur maupun gubernur jenderal. Petugas khusus itu berperan sebagai *koopman* dan *opperhoofd der compagnie* dengan sebutan "*Vertegenwoordiger der compagnie aan het Hof van Sultan Hamengku Buwono I*,⁵). *Koopman* adalah jabatan dalam hirarki VOC yang mengurus perdagangan, dan bukannya politik, sedangkan *opperhoofd* adalah komandan Kompeni yang juga ditunjuk sebagai wakil Kompeni yang ditempatkan di dalam istana sultan. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai *koopman* dan *opperhoofd der compagnie* adalah Kapten Cornelis Donkel. Selanjutnya karena kepentingan-kepentingan VOC yang berhubungan dengan aktivitas politiknya semakin meningkat, maka dirasa perlu untuk mengangkat seorang residen. Karena hal itulah maka ide dan pembangunan gedung Keresidenan Yogyakarta dalam tahun 1755 adalah akibat adanya dorongan kepentingan VOC guna meletakkan fondasi bagi pengaruh kekuasaannya dalam rangka mengimbangi perkembangan Kesultanan Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas-tugas residen diperlukan gedung yang cukup megah dan berwibawa. Namun sebelum gedung keresidenan ini dibangun, terlebih dahulu dibangun benteng Kompeni. Benteng Kompeni yang pada waktu itu disebut "loji" terletak di sebelah utara Alun-alun Utara Yogyakarta. Benteng ini menghadap ke arah barat, artinya pintu gerbang utamanya menghadap ke arah barat. Benteng Kompeni ini mulai dibangun pada tahun 1756.

Menurut N. Hartingh, gubernur pantai utara Jawa di Semarang, pada tahun 1761 benteng Kompeni itu masih berupa tembok tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang kayu pohon

kelapa atau pohon aren. Sedang bangunan-bangunan yang ada di dalam benteng hanya dari kayu atau dari bambu dan beberapa ilalang sehingga mudah terbakar. Karena itu, pada tahun 1765 W.H. van Ossenberch, pengganti Hartingh, memohon sultan agar Kompeni di Yogyakarta dibuatkan benteng dari batu yang kuat demi keamanan sultan. Pada tahun itu juga sultan menyanggupi pembangunan benteng untuk Kompeni. Tetapi ternyata pembangunan benteng tersebut baru dimulai pada permulaan tahun 1776 dan diharapkan selesai pada akhir tahun itu. Pada tahun 1777, J. Vos, pengganti Van Ossenberch, melaporkan bahwa pembangunan benteng di Yogyakarta belum banyak kemajuannya. Pada tahun 1774, J.R. van den Burgh, pengganti J. Vos, melaporkan bahwa pembangunan benteng Kompeni di Surakarta dan Yogyakarta sedang dijalankan dengan giat. Jadi ini berarti bahwa pada tahun 1774 itu benteng tersebut belum juga selesai.

Pada tahun 1781, J. Siberg, gubernur pantai utara Jawa melaporkan bahwa benteng Kompeni di Yogyakarta sudah terwujud, namun belum sempurna. Selanjutnya laporan itu menjelaskan bahwa rumah komandan belum selesai dan beberapa gedung masih belum diberi langit-langit. Kemudian pada tahun 1787 J. Siberg melanjutkan laporannya bahwa pembangunan benteng itu sangat lambat karena sultan selalu sibuk memperluas dan memperbaiki istananya. Namun akhirnya pada tahun 1778 pembangunan benteng Kompeni itu selesai dan kemudian diberi nama *Rustenburg*. Di kemudian hari nama itu diganti menjadi *Vrederberg*. Mengenai sebab-musabab penggantian nama ini masih belum jelas, sebab hingga kini tidak ada dokumen yang dapat memperjelas penggantian nama tersebut. Selanjutnya mengenai gedung yang menjadi tempat tinggal residen yang pertama kali di Yogyakarta belum dapat diketahui dengan jelas. Tempat kediaman itu mungkin sekali terletak di dalam lingkungan benteng Kompeni, *Fort Vrederburg*. Menurut Ricklefs⁶), tempat kediaman residen Yogyakarta yang pertama yaitu Cornelis Donkel (1755 – 1761) adalah di Pedagangan, sedangkan ketika Crawford (1811 – 1814 dan 1816) menjabat residen, yang pada zaman pemerintahan Inggris, tempat ke-

diaman residen terletak di luar kota, yakni di tepi jalan yang menuju ke Magelang ⁷⁾).

Berdasarkan surat dari Residen Antonie Hendrik Smissaert, nomor 6 tanggal 2 Mei 1823 ⁸⁾, yang ditujukan kepada sekretaris negeri gubernur jenderal Hindia Belanda, dapat diketahui bahwa bangunan yang berada di sebuah pekarangan yang luas yang kemudian disebut "Loji Kebon" (*Tuin Logie*) dan yang terletak di sebelah barat benteng *Vrederburg* merupakan sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1722. Karena bangunan ini sudah tua dan keadaannya sudah sangat parah, maka perlu segera diadakan perbaikan dan pembangunan kembali ⁹⁾ Untuk itu, berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang ada, perbaikan dan pembangunan kembali gedung Keresidenan Yogyakarta ini dilakukan secara bertahap, dan akan selesai seluruhnya dalam jangka waktu kurang lebih 30 tahun. Sedangkan mengenai perbaikan-perbaikan dan pembangunannya baru dimulai pada tahun 1824, dengan biaya f. 70.000,— dan selesai pada tahun 1832. Sebagai arsitek pembangunan gedung keresidenan ini adalah A. Payen ¹⁰⁾.

Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang cukup hebat. Akibatnya gedung Keresidenan Yogyakarta rusak dan sebagian runtuh. Oleh karena itu kemudian diajukan suatu usul mengenai perencanaan perbaikan atau pembangunan kembali gedung tersebut dengan rencana biaya sebesar f. 125.000,— terhitung harga material. Akhirnya usulan rencana ini pada tahun 1869 dapat diterima, dan pada tahun itu juga pembangunannya dimulai. Selanjutnya di kemudian hari gedung keresidenan itu berkali-kali mengalami perbaikan, ditambah dan diperluas sehingga menjadi "Gedung Agung" seperti keadaannya yang sekarang ini. Mengenai nama gedung ini ternyata juga mengalami beberapa kali perubahan, disesuaikan dengan fungsi dan peranannya. Pada zaman penjajahan Belanda yaitu pada periode tahun 1755—1927, gedung ini berfungsi sebagai gedung keresidenan, dan pada periode 1927—1942 gedung ini berfungsi sebagai gedung gubernuran. Pada zaman penjajahan Jepang (1942—1945) gedung ini berfungsi sebagai *Zimunukyoku tyookan*, dan tempat kediaman *koochi*, sedang-

kan pada masa Republik, gedung ini berfungsi sebagai istana presiden.

Berbeda dengan gedung keresidenan, kantor Keresidenan Yogyakarta baru dibangun pada zaman Residen Bust van Kempen (1857–1863). Kantor Keresidenan Yogyakarta ini terletak di sebelah utara gedung keresidenan. Semula gedung ini merupakan rumah partikelir. Pembangunannya sebagai gedung kantor residen baru dapat diselesaikan pada tahun 1857. Kemudian kantor residen ini dibuka secara resmi oleh Dominee Bergmann pada tanggal 11 Oktober 1857.

Perlu pula dicatat bahwa di sebelah selatan gedung keresidenan terdapat sebuah gedung pertemuan orang-orang Eropa *societeit*. Gedung ini didirikan pada tahun 1818. Gedung ini semula adalah milik suatu perseroan yang menyediakan tempat minum (minuman keras) dan tempat berbincang-bincang bagi orang-orang Eropa. Oleh karena itu gedung tersebut mendapat nama populer "*geneverhuis*" (rumah tempat minuman keras) atau "rumah bicara". Setelah gedung pertemuan itu menjadi milik suatu perkumpulan orang-orang Eropa bernama *De Vereeniging* pada tanggal 4 Juni 1822, gedung pertemuan itu terkenal dengan nama *Societeit De Vereeniging*, sedangkan penduduk asli Kota Yogyakarta menyebutnya dengan nama "Kamar Bola", karena dipergunakan juga untuk bermain bola sodok (*billiard*).

CATATAN BAB II

1. Kota Yogyakarta 200 tahun, 7 Oktober 1756 – 7 Oktober 1956, Yogyakarta: Panitia Peringatan, 1956, hal. 12.
2. Gegeven Oner Yogyakarta (laporan inti Residen Yogyakarta, 1925, hal. 32.
3. Reis van den Governmen General van inhoof, over Java, in het jaar 1746, BKI I (1853), III. hal. 291 - 440.
4. Kota Yogyakarta 200 tahun, op. at. hal. 14.
5. Hein Buitenweg, de loostste Tempo Doeloe, 'Servire, Den Haag, 1964, hal. 113.
6. M. C. Ricklefs, Yogyakarta under Sultan Mangkubumi, 1749 – 1792. History of the Division of Java, London, Dreford University Press, 1974, hal. 1427.
7. Suhardjo Hatmosuprobo, kota Yogyakarta dan Benteng Vrederburg, dalam Rencana Pelestarian dan Pengembangan Benteng Vrederburg Buku II, Universitas Gajah Mada, dilihat belum diterbitkan.
8. Lihat surat Residen Anthonie Hendrik Smessaert, Nomor 6 tanggal 2 Mei 1823 yang ditujukan kepada Sekretaris Negeri Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
9. Lukisan keadaan bangunan tempat tinggal Residen ini ter-

cermin dalam surat Residen, Yogyakarta, Nomer 6, tanggal 28 Maret 1823.

10. Lihat, Istana Presiden Gedung Agung, Yogyakarta, diktat belum diterbitkan.

BAB III SEJARAH PENGGUNAANNYA

3.1 Masa Kolonial

Sejarah penggunaan Gedung Agung Yogyakarta di masa kolonial tidak terlepas dari keadaan pemerintah pada waktu itu. Peristiwa-peristiwa sejarah dan perubahan-perubahan waktu itu ikut mendukung sejarah tersebut.

Ketika Pemerintah Belanda yang berbentuk Republik Belanda Serikat dihapuskan, maka digantikan pemerintahan yang baru, yaitu Republik *Bataaf* di bawah pengaruh Perancis pada tahun 1795. Wali Negeri Belanda sebelum perubahan tersebut yaitu Willem V, diusir oleh kaum *Patriot* yang dibantu Pemerintah Perancis. Adanya perubahan-perubahan pemerintah dalam Negeri Belanda ini, sangat mempengaruhi Kongsi Dagang Belanda atau Kompeni di Indonesia, bahkan mempengaruhi pula keadaan di daerah-daerah jajahan Belanda.

Perancis yang sangat berpengaruh atas Belanda waktu itu, pada tahun 1806 mengubah Republik *Bataaf* menjadi Kerajaan Belanda dengan Lodewijk Napoleon sebagai raja. Raja Belanda inilah yang pada tahun 1808 mengutus Herman Willem Daendels ke Indonesia sebagai gubernur jenderal, dengan maksud memperbaiki keuangan dan perekonomian negeri jajahan setelah kemunduran (kejatuhan) Kompeni atau Kongsi Dagang Belanda di tahun 1799.

Herman Willem Daendels menjabat gubernur jenderal di Indonesia mulai tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Daerah Yogyakarta dan Surakarta waktu itu berbentuk kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Untuk mengawasi langsung daerah-daerah kerajaan di Jawa termasuk juga Yogyakarta dan Surakarta, di kota-kota ditempatkan seorang residen. Residen inilah yang secara resmi mendiami rumah dinasnya sebagai tempat tinggal residen.

Residen pertama pada waktu itu adalah Cornelis Donkel (1755–1761). Pada masa ini perumahan bangsa Eropa mulai dibangun di lingkungan benteng Kompeni, *Fort Vrederburg*. Selama masa jabatan Residen Cornelis Donkel tidak terjadi peristiwa penting yang menyangkut urusan politik. Namun, perlu dicatat bahwa pada masa Residen Cornelis Donkel terjadi suatu peristiwa bersejarah di mana Sultan Hamengku Buwono I pada tanggal 7 Oktober 1756 pindah dari Pesanggrahan Ambar Ketawang untuk mendiami istananya yang baru selesai pembangunannya yakni "Kraton Ngayogyakarta"¹⁾.

Pada masa jabatan Residen Cornelis Donkel terjadi peristiwa pergantian gubernur Pesisir Utara-Timur dari Nicolás Hartingh kepada Willem Hendrik van Ossenberch yang menjabat sejak 26 Oktober 1761 sampai dengan 31 Mei 1765.

Setelah Cornelis Donkel, residen selanjutnya secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua, Jacob Cornelis van der Sluys (1761–1764)
- 2) Ketiga, Jan Lapro (1764 – 5 Oktober 1773)
- 3) Keempat, Jan Mathijs van Rhijn (5 Oktober 1773 – 15 September 1786)
- 4) Kelima, Wouter Hendrik van Ijseldijk (15 September 1786–1799)
- 5) Keenam, J.G. van den Berg (1799 – 16 Agustus 1803)
- 6) Ketujuh, Waterloo (16 Agustus 1803 – 25 Februari 1808)
- 7) Kedelapan, Pieter Engelhard (25 Februari 1808 – 19 November 1808)

Semasa H.W. Daendels menjabat gubernur jenderal, residen Surakarta dan Yogyakarta diberi pangkat *minister*. Sebagai

minister di Yogyakarta pada masa itu adalah Pieter Engelhard. Ia menjabat *minister* Yogyakarta selama 9 bulan, yaitu mulai 25 Februari 1808 sampai dengan 19 Nopember 1808. Nama P. Engelhard dalam babad disebut dengan sebutan Tuan Ingglar. Pada masa ini H.W. Daendels meningkatkan pertahanannya di Jawa dan membangun jalan yang kemudian terkenal dengan nama Jalan Daendels.

- 8) Kesembilan, Gustaaf Willem Wiese (19 Nopember 1808 – Januari 1810).

Pengganti P. Engelhard adalah G.W. Wiese yang menjabat *minister* mulai 19 Nopember 1808 sampai dengan Januari 1910. Terhadap raja-raja di Jawa, Gubernur H.W. Daendels membuat peraturan baru tentang jalannya upacara-upacara resmi. Kalau dahulu para residenuduknya lebih rendah daripada raja, akan tetapi sekarang duduknya sama tinggi. Jadi upacara-upacara resmi yang dihadiri pembesar Belanda dan raja-raja di Jawa mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, sultan (saat itu Hamengku Buwono I, 1792–1810) merasa direndahkan. Oleh karena itu ia tidak dapat menerimanya. Peristiwa itu seperti diungkapkan dalam *Tijdschrift voor Nederlands Indie 1944, Erste/jaargang, 3^e deel*, dalam judul artikelnya :

“Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjcartashe – Rijk, sedert deszelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tuschen – bestuur in (1815)”.

Artikel ini dikutip dan dicantumkan dalam *Sekitar Jogjakarta* oleh Dr. Soekamto (1952, 60-61) tentang kunjungan Daendels ke Yogyakarta.

” bahwa Gubernur Jendral Daendels pada tanggal 29 Djuli 1809 ada di Jogjakarta hendak berkundjung kepada Sultan dan bahwa upatjara jang ditetapannja untuk kundjungan itu, dengan beberapa perubahan, diterima oleh Sultan. Betul, sikap radja (jang menundjukkan tinggi hatinja) membangkitkan marah Tuan Marsekal pada resepsi pertama di Bantulan (sebelum itu resepsi untuk para Gubernur Djawa dilakukan di Demangan dekat Jogjakarta), sedang Sultan dari pihaknja kemudian marah sekali oleh karena Gubernur (Daendels) ketika Sultan datang berkundjung ke “karesidenan”,

tinggal duduk dan tidak datang menjongsong beliau beberapa langkah serta membawa beliau ke tempat duduk beliau (Sultan hanya diterima oleh beberapa wakil pada kereta di muka rumah lalu dibawa ke tahta); akan tetapi perkara itu berachir dengan tjara jang amat menjenangkan pada kedua belah pihak, sehingga orang-orang jakin, bahwa akibatnja akan menjenangkan juga. Ketika GW.Weise jang menjabat sebagai *minister*, terjadi sedikit perselisihan dengan Sultan Hamengku Buwono II. Karena merasa bersalah dan malu, maka GW.Wiese mengajukan permohonan berhenti bekerja, kepada Gubernur Jendral Daendels.

9) Kesepuluh, J.W.Moorees (Januari 1810 – Oktober 1810)

Jabatan "*minister*" selanjutnya dipegang oleh J.W.Moorees. Ia menjalankan tugasnya dengan tindakan keras. J.W.Moorees tidak dapat mengambil hati. Hubungannya dengan sultan dan para pembantunya pun tidak baik. Maka tidaklah mengherankan apabila sering terjadi perselisihan dengan Sultan Hamengku Buwono II, juga dengan para bupati²⁾. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan tentang tradisi kraton yang telah ada, mengenai tata krama, penghormatan antara *minister* terhadap sultan atau sebaliknya; tata krama tersebut telah diubah oleh H.W. Daendels itu tidak disetujui oleh sultan. Karena persoalan-persoalan tersebut, akhirnya pada bulan Oktober 1810 J.W. Moorees berhenti dan pergi dari Yogyakarta.

10) Kesebelas, Pieter Engelhard (Oktober – Nopember 1810)

Pengganti J.W.Moorees adalah P.Engelhard, yang dulu pernah menjabat *minister*. Jadi untuk kedua kalinya jabatan tersebut dijalani di Yogyakarta. Tetapi pemerintahan P.Engelhard yang kedua ini hanya berjalan sebulan. Dia dinilai tidak dapat bekerja dengan baik. Pada waktu itu hubungan antara Sultan Hamengku Buwono II dengan Daendels semakin memburuk. Bahkan Daendels mengambil tindakan yang mengejutkan warga kraton, yakni memaksa Sultan Hamengku Buwono II untuk turun tahta (1810). Selanjutnya jabatan sultan diganti oleh Hamengku Buwono III yang bergelar Sinuhun Raja. Namun demikian, walaupun Sultan Hamengku Buwono II sudah turun tahta, akan tetapi masih tetap tinggal di dalam istana.

Ia terkenal dengan sebutan Sultan Sepuh³). Kekejaman Daendels ini terdengar sampai ke Negeri Belanda, sehingga pada tahun 1811 ia diganti oleh Jan Willem Janssens.

Ketika Jan Willem Janssens menggantikan Daendels sebagai gubernur jenderal, malang menimpa dirinya. Waktu itu adalah saat yang memang telah ditunggu-tunggu oleh Inggris. Pergantian kekuasaan dari gubernur jenderal yang lama kepada yang baru itu merupakan kesempatan bagi Inggris untuk melaksanakan niatnya. Di bawah pimpinan Lord Minto, Inggris dapat menguasai Belanda. Pulau Jawa pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Letnan Gubernur Raffles. Daerah bekas jajahan Belanda yang ada di Pulau Jawa pun masuk ke tangan Inggris, tidak terkecuali daerah Yogyakarta. Demikian pula residen Yogyakarta diganti oleh Inggris. Salah satu di antara peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Raffles ialah pembagian Pulau Jawa dalam 18 keresidenan⁴).

11) Keduabelas, John Crawfurd (Nopember 1811 – September 1814)

Setelah kedatangan Inggris tahun 1811, yang menjabat residen di Yogyakarta mulai bulan Nopember 1811 adalah John Crawfurd. Pada saat itu gelar *minister* diganti lagi dengan residen. Sudah barang tentu residen di masa Inggris ini menggunakan pula gedung tempat tinggal residen atau *minister* di masa Belanda yang berkuasa sebelumnya. Residen J. Crawfurd paham tentang bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Bahkan karena pergaulannya dan juga karena tempat tinggal residen dekat dengan istana, J. Crawfurd mengetahui adat-istiadat kraton⁵).

Pada tahun 1812 Sultan Sepuh atau Sultan Hamengku Buwono II yang turun tahta, naik tahta kembali. Putra mahkota atau putra Hamengku Buwono II yang pernah naik tahta menjadi Hamengku Buwono III (Sinuhun Raja) kembali menjadi putra mahkota. Dalam keadaan yang serba kalut itu tugas Residen J. Crawfurd di Yogyakarta adalah merapatkan hubungan putra mahkota dengan Pangeran Notokusumo, putra Hamengku Buwono I dari "garwa ampeyan" (selir). Apabila keduanya telah akrab, maka akan mudah melawan Sultan Ha-

mengku Buwono II. Ternyata keduanya menerima dengan senang hati. Apalagi setelah putra mahkota mengetahui bahwa pemerintah bermaksud mengangkatnya menjadi sultan, dan Pangeran Notokusumo menjadi pangeran "amardika" yang mempunyai kekuasaan sendiri⁶). Dengan demikian tujuan Residen J.Crawfurd telah tercapai. Dahulu ketika Daendels berkuasa, ia mengubah peraturan tata krama upacara kraton. Kini setelah Daendels pergi, Sultan Hamengku Buwono I bermaksud menghilangkan kembali peraturan tata krama upacara keraton tersebut. Ia mengirim surat kepada Letnan Gubernur Raffles yang isinya meminta supaya membatalkan peraturan yang dibuat oleh Daendels yang lalu, dan kembali ke tata krama kraton seperti yang telah lampau. Tetapi hal ini tidak disetujui oleh Raffles, bahkan Raffles mengirim tentara untuk menyerang kraton serta menangkap Sultan Hamengku Buwono II pada tanggal 20 Juni 1812. Selanjutnya Sultan diasingkan ke Penang dan Hamengku Buwono III atau Sinuhun Raja naik tahta kembali. Bersamaan itu pula Pangeran Notokusumo, putra Sultan Hamengku Buwono I, dinobatkan menjadi pangeran "amardika" di Kadipaten Pakualaman⁷).

Keadaan pada masa itu, yakni masa-masa penangkapan Sultan Hamengku Buwono II, dalam *Babad Bedhahing Ngayogyakarta*⁸), antara lain digambarkan sebagai berikut.

"Betapa sibuknya orang-orang yang dipekerjakan dengan paksa untuk membawa barang-barang: peti, benda-benda keraton ke Loji Ageng, dan yang berupa surat dibawa ke Loji Kebon. Apabila mereka tidak mau melakukan, maka mereka akan dipukul dengan senapan. Pekerjaan itu memakan waktu sehari-hari. Dalam waktu empat hari pun, pekerjaan mengusung benda-benda dari keraton di bawah pengawasan serdadu Inggris tersebut belum juga selesai".

Dalam kutipan yang dikumpulkan oleh PBR. Carey, situasi demikian digambarkan dalam tembang "Pocung" berikut:

Sekar pocung guma(n)tya dunya kedhatun
pan wus ingusungan
mri(ng) Loji Ageng angili
pinendheti ginrubag myang ngusung jalma

Wadya ing jro prajurit kang neng kedhatun
samy a cinekelan

..... ?????
pethi kothak pan agegotongan

Tan wruh jalma tekan ipe Dalem Prabu
Dyan Prawiranata
Prawiradiwirja rini
kinen gotong pethi ambre kot kadijinya

Wo(n)ten Lurah Ketanggung Jabrata iku
dangu datang mangkat
arsa pinupuh bedhil
gya sinungan kang awrat lajeng binekta

Pan sedaya pra Lurah ingkang kepangguh
tuwin jajanira
lir kadi sikep galidhig
tau amukti amangke samya gegotongan

Kang tan kerèp ginitik pindhiha aru
tan saged menenga
jinaga dhateng wadya Gris
langkung keras printahnya dadya jrih samya

Catur di(n)ten dereng tias pangusungipun
mung sarupaning srat
binekta mring Loji Kebun
duk semanten Master angung serat Pangeran

Ma(ng)kudiningrat aksara pegon iku
kang serat ambiya
kang padha samya pinraos
rerayahan sangking jroning kedhatyan

Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia kurang-lebih sebagai berikut :

Dalam lagu Pocung digambarkan pergantian suasana di kraton. Barang-barang sudah dibawa dengan gerobag menuju Loji Besar, dan dibawa pula manusia. Para prajurit mengangkut peti (kotak), tanpa pandang bulu termasuk ipar sultan, Raden Prawiranata dan Prawiradiwirya. Demikian berat nampaknya. Di antaranya juga terdapat seorang lurah dari Ketanggung bernama Jabrata. Ia tidak segera mengangkat. Ia hendak dipukul dengan senapan. Segera lurah itu pun diberi beban yang berat untuk

terus diangkut. Para lurah maupun "jajar" nampak siap bekerja. Mereka itu biasa hidup enak. Namun kini mereka harus melakukan pekerjaan mengusung. Mereka tidak pernah diperintah bekerja keras, namun kini tak dapat berpangku tangan, karena dijaga dan diawasi oleh tentara Inggris yang sangat kejam dan keras dalam memberikan perintah. Karena itu semua menjadi takut. Pekerjaan mengusung tersebut sampai empat hari belum juga selesai. Sedangkan yang berupa surat-surat (tulisan) dibawa ke Loji Kebon. Waktu itu Master (J. Crawford) memberi naskah kepada Pangeran Mangkudiningrat. Naskah tersebut adalah *Serat Ambiya* yang ditulis dalam huruf Pegon. Yang mereka pikirkan adalah perebutan kekuasaan di dalam kraton.

Dinobatkannya Pangeran Notokusumo menjadi Paku Alam I, seperti tersebut dalam *Babad Pakualaman*⁹), digambarkan dalam tembang "Dhandhanggula" sebagai berikut.

Sarta dugi denira ngayomi; dadya pepundhening putra wayah,
myang pra santana dene, kawula dalem sagung, nahen mang-
kya purwaning rawi, kang minangka bebuka, duk nalikanipun.
Jeng Pangran Natakusuma, winisuda ing Kangjeng Gupermen
Inggris, menggep jejulukira.

Kangjeng Gusti Pangeran Dipati, Paku Alam saha sinatriya,
kang piniji ing Gupermen, kala jumenengipun, ri Isnen Pon
Jumadilakir, tanggal kaping sewelas, Gumbreg wukunipun,
warsa Alip mangsa Asta, sinengkalan *trus ngrana wikuhih
bumi*, samana parengira.

Winisuda ing Kangjeng Gupermen, ingkang putra Dyan Nata-
diningrat, mangke sinantun namane, sarta lelengahipun, asma
Kangjeng Pangeran mantesi, Harya Suryaningrat, lawan rayi-
nipun, Dyan Mas Salya sinung nama, Kangjeng Pangeran Harya
Suryaningprang nenggih, ri sedheng ngalih nama.

Wau wonten salebeting puri, duk samana residen Ngayodya,
maksih minister pangkate, Tuan Kraper ranipun, Kacarita
sawusing jurit, bedhah kraton Ngayodya Jeng Sultan kecakup
dinung neng loji samana, Jenderal Raples gya kondur maring
Semawis, bangun budhal ing Yogya.

Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia kurang-lebih sebagai berikut .

Kangjeng Pangeran Notokusumo dinobatkan menjadi raja oleh gubernur Inggris dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam. Ia adalah figur seorang raja yang ideal menurut pilihan gubernemen. Penobatan dilaksanakan pada hari Senin Pon, Jumadilakhir (Rabiulakhir), tanggal 11, wuku Gumbreg, tahun Alip, musim ketujuh, dengan sengkalan tahun "Trus Ngrana Wikuning Bumi". Ketika gubernur menobatkannya, putra Paku Alam yaitu Natadiningrat, nama dan pangkatnya diubah menjadi Kangjeng Pangeran Harya Suryaningrat. Demikian pula adiknya, R.Mas Salya, diubah namanya menjadi Kangjeng Pangeran Harya Suryaningprang. Ketika itu residen Yogyakarta adalah Tuan Kraper (J.Crawfurd) yang berpangkat "minister". Setelah menyerbu Kraton Yogyakarta, Sri Sultan ditangkap dan dibawa ke loji. Pada pagi harinya Jenderal Raffles meninggalkan Yogyakarta menuju Semarang. Kedatangan Raffles di Yogyakarta disambut oleh raja di Kranggan. Perjalanan itu kemudian diteruskan ke "loji kebon" (gedung kersidenan). Dalam *Babad Pakualaman*, kedatangannya digambarkan dalam tembang "Asmarandana" berikut.

Tannya Tuwan Jendral prapti, ri Saptu jam kalih welas, tanggal selawe warsane, Jimawal sengkolo hatmo, catur pandhito jagad, Tuwan Jendral wus kepengguh, neng Kranggan lawan Sang Nata.

Jendral lawan hingkang swami, mung sahintara bubaran, jrenel kalawan meprone, mring loji kebon wus prapta, ning tan mawi lenggahan, mring kamar leleson sampun, dumadya hamung sang Nata.

Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia kurang-lebih sebagai berikut.

Tuan jendral tiba di Yogyakarta pada hari Sabtu pukul 12.00, tanggal 25 tahun Jimawal, dengan sengkalan tahun "Hatma Catur Pandhita Jagad". Tuan jendral dan raja telah bertemu di Kranggan. Pertemuan jendral dengan raja hanya sebentar. Bersama istrinya, jenderal kemudian menuju "loji kebon". Sesampainya di sana mereka langsung tidur di kamar.

- 12) Ketigabelas, Robert Clement Garnham (September 1814 – Januari 1816)

Setelah John Crawford berhenti dari jabatannya sebagai residen Yogyakarta pada bulan September 1814, kedudukannya digantikan oleh Robert Clement Garnham. Pergantian residen Yogyakarta serta upacara serah terima jabatan ditulis di *Babad Pakualaman* dan dilukiskan dalam tembang "Mijil" berikut¹⁰).

Mister Kraper ing mangkya ginanti, Garnem Kapten Totos, prapta ing Ngayogya pethukane, neng Melati kang para Bupati, Pakualaman nenggih, kang tinuduh methuk.

Pangran Suryaningprang lawan ari, Suryaningprang karoron, saha prawira dregonder kabeh, hamethuk sareng Danurja patih, Garnem wus kepanggih, lan sagung kang methuk.

Tandya lajeng praptanireng Loji, pan sampun patemon, lan Jeng Pangran Dipati kalihe, langkung sami resep ing kang galih, sawusnya mong Gusti, Jeng Pangran kondur.

Mister Garnem enjing maring puri, kepanggih sang katon, Sultan gentos mertamu sontene, sareng lan Gusti Pangran Dipati, maring *Kebon Loji*, pepak pra gung-agung.

Pendhak enjing minister mring puri, kepanggih sang katon ngaturaken lekate Gupermen, hantindra minister puniki, mawi den hormati, angaken handanu.

Lawan sima lan rampogan nenggih, enjingnya kacariyos, minister lami lan anyar karone, maring Pakualaman martami, mawi den hormati, ambujana ngembul.

Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia kurang-lebih sebagai berikut .

Tuan Kraper (J.Crawford) akan diganti Garnem Kapten Totos (R.C.Garnham). Kedatangannya ke Yogyakarta disambut oleh para bupati Pakualaman di Mlati. Pangeran Suryaningrat dan adiknya yaitu Pangeran Suryaningprang ditugaskan menyambut disertai para perwira "dragonder", bersama-sama Patih Danureja. Kesemuanya menyambut Garnem (R.C.Garnham). Kini kedua belah pihak telah bertemu. Segera setelah menuju ke "loji", mereka bertemu dengan kedua pangeran, yaitu Pangeran Suryaningrat dan adiknya. Mereka amat bersenang hati, dan setelah berwawancara, pangeran kembali. Keesokan harinya Mister Garnham ke istana (Pakualaman) untuk bertemu dengan

Sri Paku Alam. Sore harinya sultan dan Gusti Pangeran (Paku Alam) juga bertemu di Loji Kebon. Para pembesar lengkap hadir di tempat itu. Tiap pagi Sang Pangeran datang untuk menunjukkan keakrabannya dengan gubernemen. Upacara pergantian minister ini dimeriahkan dengan pertunjukan adu banteng dengan harimau dan "rampogan" (penyergapan seekor harimau oleh beberapa orang laki-laki bersenjata). Keesokan harinya, minister yang lama serta penggantinya baru bertemu ke Pakualaman. Mereka disambut, dihormati dengan pesta bersama. Pada bulan Januari 1816 Residen R.C.Garnham meletakkan jabatan.

13) Keempatbelas, John Crawford (Januari 1816 – 14 Agustus 1816)

Pengganti R.C.Garnham adalah John Crawford. Untuk kedua kalinya ia menjabat residen di Yogyakarta. Di kalangan Kraton Yogyakarta, J.Crawford sangat dihormati. J.Crawford senang pada orang Jawa dan berusaha mempelajari adat istiadatnya¹¹). Diberitakan bahwa dalam acara perlombaan kuda, kuda-kuda milik J.Crawford diikutsertakan pula dalam perlombaan tersebut.

Pada tanggal 14 Agustus 1816, J.Crawford berhenti dari jabatannya sebagai residen Yogyakarta. Dalam tahun yang sama pula, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles diganti oleh Letnan Gubernur John Fendall.

Kedaaan politik di Eropa pada zaman Hindia Belanda mempengaruhi negara-negara jajahan di Asia, tak terkecuali Indonesia. Bekas jajahan Belanda yang dipegang Inggris berangsur-angsur kembali ke tangan Belanda lagi. Perubahan tersebut juga mempengaruhi keadaan di daerah Yogyakarta. Untuk mengurus daerah jajahan dari tangan Inggris, Belanda membenahi daerah Yogyakarta yaitu dengan menempatkan seorang residen.

14) Kelimabelas, Mr. H.G. Nahuys Heer van Burgst (14 Agustus 1816 – 1 Nopember 1822)

Setelah Yogyakarta kembali ke tangan Belanda dari tangan Inggris, mulai 14 Agustus 1816 Mr. H.G. Nahuys Heer van Burgst (Nahuys) menjabat kedudukan residen menggantikan residen Inggris J. Crawford. Upacara pergantian kekuasaan serta serah terima jabatan ini ditulis di *Babad Pakualaman*, dan dilukiskan dalam tembang "Kinanti" berikut ¹²).

Minister kalih wus mundur, Jan Kraper jam gangsal injing,
wus mangkat saking Ngayogya, nulya antawis tri hari, prapta
prajurit Walanda, rong bregada winatawis.

Hupesir Sumbaga Catur, Pangeran lan para siwi, tanapi Patih
Danureja, pepak Walandi kang lami, samya manggihi sake-
dhap, sontenira wangsul malih.

Duk setengah gangsal gupuh, nurunken bandhera Inggris,
ginanti bandhera Walanda, hormat mariyem mawanti, gya
kumendhaning wong Ingran, sampun papasrahan sami.

Lan komdhaning Wlandi sagung, minister lan sekretaris,
wus sami trima-tinrima, gya dahat prajurit Inggris, budhalan
saking Ngayogya, Wlanda Nederlan ngenggeni.

Duk papasrahan puniku, Inggris kalawan Walandi, pangwa-
saning Tanah Jawa, jam gangsal ri Rebo Paing, anuju wulan
Ramelan, tanggal dei dasa marengi.

Wuku Kuning katelu, lambang Langkir Dal kang warsi, windu
Sancaya tinengran, guna dadi kasing bumi, wong Inggris nang
Tanah Jawa, laminira gangsal warsi.

Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia kurang-lebih sebagai berikut.

Kedua *minister* telah mundur. Pukul lima Jan Kraper (John Crawford) sudah pergi dari Yogyakarta. Tiga hari kemudian, datanglah dua pasukan tentara Belanda. Empat orang opsir Sumbaga, pengeran beserta putranya, Patih Danureja, dan segenap orang Belanda yang lama menemui sebentar. Sore harinya mereka kembali lagi. Pada pukul 16.30, bendera Inggris segera diturunkan dan diganti bendera Belanda. Upacara itu dihormati dengan dentuman meriam berkali-kali. Komandan pembesar Inggris dan komandan pembesar Belanda telah melaksanakan serah terima. Demikian pula serah terima jabatan *minister* dan sekretaris. Kemudian prajurit Inggris pergi mening-

galkan Yogyakarta. Kini giliran Belanda (Nederland) menempati Yogyakarta. Serah terima kekuasaan di Jawa antara Inggris dan Belanda terjadi pada pukul 16.30, hari Rabu Pahing, tanggal 20 bulan Ramadhan, wuku Kuningan, musim ketiga, lambang Langkir, tahun Dal, windu Sancaya, dengan sengkalan "Guna Dadi Kasing Bumi". Inggris memerintah di Jawa selama lima tahun. Demikianlah gambaran serah terima residen pada waktu itu. Mulai saat itu Nahuys menjabat residen di Yogyakarta. Sa- yang sekali residen ini mempunyai kebiasaan yang tidak baik sehingga sangat mempengaruhi pemerintahannya.

Mr. H.G. Nahuys memegang peranan penting dalam hal sewa-menyewa tanah. Namun peranannya itu kemudian diman- faatkan untuk keperluan pribadinya¹³). Tindakannya berakibat buruk terhadap rakyat. Pada waktu itu tahta kerajaan di Yogya- karta berada di tangan Sultan Hamengku Buwono IV (naik tahta 16 Nopember 1814 – 16 Desember 1822). Tetapi karena usianya masih sangat muda, pemerintahan dilaksanakan dengan sistem perwalian. Sri Paku Alam I bertindak sebagai wali sam- pai dengan tanggal 27 Januari 1820. Setelah itu Sri Paku Alam I baru melepaskan jabatannya sebagai wali sultan¹⁴).

Usia sultan yang masih sangat muda itu kemudian diman- faatkan oleh Residen H.G. Nahuys. Dengan sangat mudahnya ia dapat memperoleh tanah sewaan dari sultan. Pada bulan Juli 1817 H.G. Nahuys dapat menyewa tanah Bedoyo di lereng selatan Gunung Merapi dan tanah-tanah itu kemudian disewakan lagi pada orang-orang Eropa¹⁵).

Di atas penderitaan perekonomian rakyat inilah H.G. Na- huys memperoleh uang dan keuntungan. Rakyat mengeluh. Keluhan-keluhan rakyat ini pada akhirnya sampai ke telinga Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengku Buwono III dari selir. Ia yang pada dasarnya sudah tidak senang para orang asing itu, semakin membenci tindakan-tindakan H.C. Nahuys.

Pada tahun 1818, ketika kekuasaan masih berada di bawah pemerintahan Residen H.G. Nahuys, di daerah Kesultanan Yo- gyakarta berlaku pengadilan yang disebut *Residentie Court*. Pengadilan ini diketuai residen. Sedangkan anggota-anggotanya

terdiri atas "pepatih dalem" dan 4 orang "bupati nayaka". Selain itu juga terdapat juru bahasa yang duduk sebagai panitera merangkap *penbare ministerie*¹⁶). Hubungan sultan yang baru berusia 19 tahun dengan residen ketika itu sangat baik, tetapi dengan rakyatnya kurang baik. Pada tanggal 1 Nopember 1822, Residen H.G. Nahuys mengakhiri masa jabatannya.

15) Keenam belas, A.M.Th. Baron de Salis (1 Nopember 1822 – 10 Pebruari 1823)

Pengganti Residen H.G. Nahuys adalah A.M.Th. Baron de Salis. Ia menunaikan tugasnya mulai 1 Nopember 1822. Sebagai residen, ia mengalami dan menyaksikan pergantian sultan. Sultan Hamengku Buwono IV yang meninggal secara mendadak pada tanggal 6 Desember 1822 kemudian diganti oleh putranya, Raden Mas Menol bergelar Sultan Hamengku Buwono V. Sama halnya dengan ayahandanya dahulu, karena usianya masih sangat muda, pemerintahannya pun diperwalikan kepada Pangeran Diponegoro (putra Sultan Hamengku Buwono III, Pangeran Mangkubumi (putra Sultan Hamengku Buwono II), Ratu Kencono (ibu sultan) dan Ratu Agung (nenek sultan)¹⁷). Residen de Salis meletakkan jabatannya pada 10 Pebruari 1823.

16) Ketujuh belas, Anthonie Hendrik Smissaert (10 Pebruari 1823 – 26 September 1825)

Pengganti de Salis adalah Anthonie Hendrik Smissaert. Ia tinggal di gedung keresidenan. Ketika itu ia mengajukan usul kepada Gubernur Jenderal Godert Alexander Gerard Phillip Baron van der Capelen agar gedung keresidenan (loji kebon) diadakan perubahan. Setelah menerima usulan tersebut, gubernur jenderal mengutus A. Payen untuk meninjaunya. Akhirnya usulan tersebut disetujui. Bersama A.H. Smissaert, A. Payen melaksanakan rencana itu dengan tambahan-tambahan bangunan seperlunya¹⁸).

Perbaikan gedung keresidenan dapat diselesaikan pada tahun 1824. Sementara itu keadaan di Yogyakarta semakin dicekam kesengsaraan. Situasi demikian tidak hanya melanda kalangan bawah, tetapi di kalangan istana pun banyak yang mengalami kemunduran moral. Hal ini sangat mencemaskan

Pangeran Diponegoro.¹⁹⁾

Semua itu adalah sebagai ulah Belanda, dan hal demikian justru dikehendakinya. Untuk menentramkan diri, tiap hari Kamis dan Jum'at P. Diponegoro berada di tempat tinggalnya, Tegalrejo. Di sana ia banyak menempe rakyat di sekitarnya. Ajaran-ajaran kerohanian banyak diberikan kepada rakyat. Kebencian P. Diponegoro pada Belanda bertambah tatkala penobatan sultan ke-5 pada tanggal 19 Desember 1822. Sebagai salah seorang pamannya, ia tidak diundang. Tetapi sebenarnya tindakan ini adalah ulah Patih Danurejo II yang ingin mencari pengaruh di istana.²⁰⁾

Menghangatnya situasi di ibukota Yogyakarta ternyata tidak diacuhkan oleh Residen A.H. Smissaert. Sebagai residen Yogyakarta, ia sering berada di Bedoyo; suatu daerah di lereng Gunung Merapi. Bahkan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 1825 Residen A.H. Smissaert menerima berita dari residen Surakarta (Mae Gillavry) bahwa P. Diponegoro sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Namun mendengar kabar itu Residen A.H. Smissaert masih juga bermalas-malasan. Dua hari kemudian (18 Juli 1825), barulah Residen Smissaert kembali ke Yogyakarta²¹⁾.

Sampai di Yogyakarta Residen Smissaert mendapat laporan dari Asisten Residen Chevallier bahwa P. Diponegoro mengumpulkan beberapa penduduk. Chevallier mengusulkan kepada Smissaert supaya P. Diponegoro ditangkap. Namun Residen Smissaert menolak. Lebih baik mengundangnya dengan surat panggilan. Akan tetapi walau dilakukan dengan berbagai cara, bahkan dengan perantaraan P. Mangkubumi, P. Diponegoro tidak mau menghadap residen, karena ia tahu akan ditangkap²²⁾.

Akhirnya pada tanggal 20 Juli 1825 ± pukul 17.00, Chevallier dengan membawa 75 orang infanteri, 50 pasukan kuda dan 2 meriam pergi ke tempat kediaman P. Diponegoro. Pangeran Diponegoro beserta keluarganya melarikan diri lewat pintu belakang, dan Chevallier beserta pasukannya pun kembali ke benteng²³⁾. Mulai saat itu pecahlah perang yang terkenal de-

ngan Perang Diponegoro selama 5 tahun.

Karena ketahuan bahwa A.H. Smissaert sering berada di tempat yang berlainan dan kurang mengacuhkan keadaan kota, akhirnya pada tahun 1825 A.H. Smissaert dipecat dari jabatannya²⁴).

17) Kedelapanbelas, Mac Gillavry (26 September 1825 – 28 Oktober 1825)

Setelah A.H. Smissaert dihentikan dari jabatannya, untuk sementara pemerintahan Yogyakarta diserahkan kepada Mac Gillavry sebagai pejabat residen, merangkap residen Surakarta²⁵).

18) Kesembilanbelas, Jan Isaac van Sevenhoven (28 Oktober 1825 – 10 Maret 1827)

Pengganti Mac Gillavry adalah Jan Isaac van Sevenhoven. Sedangkan Gubernur Jenderal van der Capellen juga diganti oleh Letnan Gubernur Jenderal Hendrik Merkus de Kock (1826 – 1830).

Pada tanggal 11 April 1826, para residen Belanda, terutama yang daerah-daerahnya terlibat dalam Perang Diponegoro, termasuk juga residen Yogyakarta Jan Isaac van Sevenhoven, dikumpulkan di Salatiga²⁶). Di antara keputusan yang diambil dalam pertemuan itu adalah upaya menambah kekuatan pasukan-pasukan Belanda yang tenaga-tenaganya dari orang Indonesia sendiri di bawah bupati-bupati yang setia kepada Belanda.

Di dalam *Babad Pakualaman* diceritakan bahwa Residen J. Sevenhoven mempunyai pinjaman uang pada Paku Alam I. Pengembaliannya dilakukan dengan mengangsur. Ketika Sri Paku Alam I mengawinkan putranya, J. Sevenhoven memberikan uang angsuran dengan maksud agar Sri Paku Alam dapat membiayai perkawinan putranya²⁷). Berikut ini kutipan dari *Babad Pakualaman* halaman 85.

" , Risiden kang winarna, tamtu sung arta mung nicil, sambutannya mring Jeng Pangeran Dipadya.

Wolungatus langung semat, linnya Risiden puniki, karya ngragadi pangadyan, kados sampun anyekapi, mangsuli kang sinung ling, kajawi wragading mantu, salong karya paringan, dhumateng penganten estri, yen ta mboten makaten awon tingalnya "

Adapun tejemahan bebas dalam bahasa Indonesia kurang-lebih sebagai berikut.

Suatu ketika residen (J. Sevenhoven) harus memberikan uang cicilan atas pinjamannya kepada Kanjeng Pangeran Adipati (Paku Alam). Residen mengatakan bahwa uang yang diberikan hanya delapan ratus lebih seringgit dengan harapan dapat mencukupi biaya perkawinan putranya. Sri Paku Alam menjawab, bahwa selain biaya untuk hajat perkawinan, sebagian juga untuk pemberian (mahar) pada calon mempelai putri. Kalau tidak demikian, sungguh aib nampaknya.

Di dalam babad tersebut juga dikatakan bahwa selama J. Sevenhoven menjadi residen Yogyakarta, banyak sekali masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu dia ingin meletakkan jabatan saja dan akan kembali ke Batavia untuk beristirahat. Kata-kata J. Sevenhoven ini terlukis dalam bentuk tembang "Sinom" berikut.

Yen ngantos kocaping liyan, tanpa pethukan sademi, sarehning mangsa samangkiya, limrah tiyang kasrakat sami, liya saking Gupremin, tan wonten yogya tutulung, dening Kangjeng Gupremin, Bapa - kaki ning sabumi, Risiden ling meh dhateng kang ngganti kula.

Nama Tuwan Lawif Vam Bab, ambeg miguna linuwih, kula wus tan bisa jaga, wonten ing Nagari ngiriki, kathah temen prakawis, eca neng Batawi nganggur, mangkana kang winartan, katon pangunguning liring, sawusira pamit kondur Jeng Pangeran.

Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia kurang-lebih sebagai berikut.

Pemberian mahar kepada calon mempelai wanita sudah merupakan suatu kelaziman, bahkan orang melarat sekalipun.

Apa kata orang nanti, jika ada pengantin tanpa pemberian mahar. Hanya tuan gubernur yang dapat memberi pertolongan. Menanggapi hal tersebut residen kemudian mengatakan bahwa ia sudah tidak mampu bekerja di negeri ini karena terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Penggantinya sudah hampir datang yaitu Tuan Lawif Van Bab (P.H. Baron Van Lawick Van Pabst). Selanjutnya ia mengatakan lebih enak tinggal di Jakarta. Setelah itu residen berpamitan pada Kanjeng Pangeran (Paku Alam). Pada 10 Maret 1827 Jan Issac Van Sevenhoven sebagai residen Yogyakarta.

- 19) Keduapuluh, P.H. Baron Van Lawick Van Pabst (10 Maret 1827 – Oktober 1827)

Pengganti Jan Issac van Sevenhoven adalah P.H. Baron van Lawick van Pabst; tepatnya mulai 10 Maret 1827. Pada masa Perang Diponegoro, Residen van Lawick van Pabst ini selalu berusaha berhubungan dan mendekati para pemimpin perlawanan. Atas bujukan-bujukannya, pada tanggal 21 Juni 1827 tokoh-tokoh perlawanan seperti Pangeran Natapraja dan Pangeran Serang (Sumawijaya) beserta pengikut-pengikutnya yang berjumlah ± 850 orang menyerah kepada Belanda²⁸). Apa yang telah dilakukan residen Yogyakarta ini sangat menguntungkan pihak Pemerintah Belanda. Sebaliknya merupakan pukulan berat bagi para pejuang Indonesia. Dengan mengaji pengalaman yang lalu, yaitu selama periode perang tahun 1825 – 1826 di mana Belanda mengalami kesulitan, maka sejak tahun 1827 pimpinan militer Belanda menggunakan siasat baru yang disebut Sistem Benteng. Tujuan sistem ini adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro²⁹). Pada bulan Oktober 1827, van Lawick van Pabst berhenti sebagai residen Yogyakarta.

- 20) Keduapuluhsatu, Mr. Johan Frederik Walrave van Nes (Oktober 1827 – Nopember 1830)

Pada bulan Oktober 1827 residen Yogyakarta diganti oleh Mr. Johan Frederik Walrave van Nes. Sebagai residen di daerah yang sedang dilanda perang, ia berusaha untuk memadamkannya. Bujukan dan imbauan van Nes dilakukan terhadap para

pejuang pengikut Pangeran Diponegoro. Usaha van Nes untuk melunakkan hati mereka ialah dengan cara mengajak berdamai.

Pada tanggal 28 Juni 1829 van Nes mengirim surat kepada Pangeran Mangkubumi agar supaya menghentikan perang, namun ajakannya ditolak. Demi kepentingan pemerintahan Belanda, ia tidak berputus asa. Berbagai upaya dijalankan agar P. Diponegoro mau menyerah³⁰).

Melalui putra-putra P. Mangkubumi, van Nes berusaha keras agar dapat menaklukkan hatinya. Akhirnya pada tanggal 27 September 1829, salah seorang putra pangeran itu menemui ayahnya. Dengan bujukan-bujukan sang anak berhasil mengantarkan sang ayah untuk menyerah pada Residen van Nes³¹). Untuk menghadapi tokoh-tokoh perlawanan tersebut, usaha yang sama juga dilaksanakan oleh Residen van Nes. Pada tanggal 27 Juli 1829 van Nes juga mengirim surat kepada Sentot Prawirodirjo. Isi surat tersebut mengajak damai. Selain itu Belanda menjamin keselamatan dan menjanjikan kedudukan baik bagi Sentot Prawirodirjo³²). Pemerintah Belanda juga berusaha melunakkan hati Sentot melalui salah seorang krabatnya untuk membujuknya. Akhirnya tanggal 24 Oktober 1829 Sentot dan pasukannya datang ke Kota Yogyakarta untuk menyerah³³).

Usaha-usaha residen van Nes tersebut menggembirakan pihak Belanda, akan tetapi tidak demikian bagi para pejuang kemerdekaan. Menyerahnya tokoh-tokoh perjuangan itu membuat Pangeran Diponegoro sebagai pimpinan merasa terpukul. Lebih-lebih dengan semakin banyaknya orang yang berperanan penting bagi perjuangan P. Diponegoro menyerah pada Belanda. Dengan susah-payah akhirnya Belanda berhasil memperdaya P. Diponegoro dalam suatu perundingan di tempat kediaman residen Kedu tanggal 28 Maret 1830³⁴). Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya diasingkan ke Makasar.

Demikianlah usaha-usaha van Nes selaku residen Yogyakarta. Pada bulan Nopember 1830 van Nes berhenti dari jabatannya.

21) Keduapuluhdua, Jan Isaac Sevenhoven (Nopember 1830 – Desember 1830)

Sejak bulan Nopember 1830 jabatan residen Yogyakarta digantikan oleh Jan Isaac van Sevenhoven. Baginya, jabatan residen Yogyakarta ini adalah yang keduakalinya. Namun demikian tugasnya hanyalah sebulan, yaitu sampai dengan bulan Desember 1830³⁵).

Sehubungan dengan jabatannya itu, Residen Isaac mengetahui, bahkan pernah mengalami menghadapi perlawanan P. Diponegoro. Banyak hal dan peristiwa pada waktu itu yang masuk dalam catatannya. Tentu saja tentang perlawanan P. Diponegoro dan pasukannya, yang kemudian terkenal dengan sebutan perang Jawa mulai tahun 1825 – 1830.

22) Keduapuluhtiga, Mr. Johan Frederik Walrave van Nes (Desember 1830 – Maret 1831)

Pengganti Van Sevenhoven adalah Van Nes. Ia menjabat residen Yogyakarta mulai bulan Desember 1830. Jabatan ini adalah untuk keduakalinya. Tak lama kemudian, yaitu pada bulan Maret 1831, ia berhenti dari jabatannya sebagai residen.

23) Keduapuluhempat, Frans Gerardus Valk (Maret 1831. – Juli 1838)

Pengganti Van Nes adalah Frans Gerardus Valk. Ia menjabat residen Yogyakarta sejak Maret 1831³⁶). Residen F.G. Falck menaruh perhatian terhadap kelanjutan perbaikan gedung kediaman residen. Seusai peperangan (Perang Diponegoro), dengan tambahan biaya f. 70.000, gedung kediaman residen yang juga disebut Loji Kebon tersebut dapat diselesaikan tembok dan atapnya.

Berdasarkan denah yang ada, di depan gedung induk terdapat dua buah kolam. Tidak jauh dari kolam tersebut terdapat suatu ruangan khusus yang dikenal sebagai ruang penerima tamu dan sebagian ruang kerja residen. Ruangan tersebut kemudian runtuh dan dibongkar. Kedua kolam dihubungkan oleh sebuah pipa leding yang pada tahun 1858 disumbat. Penghubung kedua kolam itu kemudian diganti dengan saluran air dari batu³⁷). Pada 5 Juli 1838 Frans Gerardus Valck berhenti dari jabatannya sebagai residen.

Pengganti-pengganti Frans Gerardus Valck ialah ³⁸⁾ :

- 24) Keduapuluhlima, J.F.J. Mayor, sebagai penjabat (5 Juli 1838 – 14 Desember 1838)
- 25) Keduapuluhenam, F.G. Valck, menjabat untuk kedua kalinya (14 Desember 1838 – Juli 1841)
- 26) Keduapuluhtujuh, Arnoldus Adriaan Buyskes (Mei 1845 – Nopember 1845)
- 27) Keduapuluhdelapan, Reinier de Filliettar Bousquet (Mei 1845 – Nopember 1845)
- 28) Keduapuluhsembilan, Albert Hendrik Wendelieu Baron de Kock (28 Desember 1848 – Mei 1851)
- 29) Ketigapuluh, Johannes Jerphaas Hasselman (8 Juli 1851 – Januari 1855)
- 30) Ketigapuluh satu, Mr. Willem Carel Emille de Geer (Pebruari 1855 – 6 Mei 1856)
- 31) Ketigapuluh dua, Dirk Adolf Buyn (Juni 1856 – 8 Juni 1857)
- 32) Ketigapuluh tiga, Carel Pieter Brest van Kempen (29 September 1857 – 13 Pebruari 1863).

Pada kira-kira awal tahun seribu delapanratus enampuluhan di sebelah selatan gedung gereja Protestan dibangun gedung baru. Gedung yang termasuk dalam komplek gedung kerresidenan ini digunakan untuk penginapan para tamu. Kelak di kemudian hari di tempat ini dipergunakan sebagai kantor asisten residen ³⁹⁾. Residen Carel Pieter Brest van Kempen akhirnya mendapat gangguan jiwa dan berhenti sebagai residen pada 13 Pebruari 1863.

Pengganti-pengganti van Kempen ialah ⁴⁰⁾ :

- 34) Ketigapuluh empat, F.N. Nieuwnhuizen (13 Pebruari 1863 – 29 Juni 1863)
- 34) Ketigapuluh lima, Nicolas Anne Theodoor Ariens (29 Juni 1863 – Desember 1864)
- 35) Ketigapuluhenam, Adolphe Jean Phillippe Hubert Desire Bosch (2 Januari 1865 – 4 Maret 1873).

Tanggal 10 Juni 1867 terjadi gempa bumi di Yogyakarta. Banyak gedung yang roboh, termasuk gedung kerresidenan dan

banyak bagian yang rusak. Akhirnya pada tahun 1869 kerusakan-kerusakan gedung keresidenan diperkirakan menelan biaya f. 125.000. Pada tanggal 4 Maret 1873 Adolphe Jean - Phillippe Huberst Desire Bosch meletakkan jabatan.

- 36) Ketigapuluhtujuh, Adolph Joan Bernard Waltendorf (4 Maret 1873 – 26 April 1878)
- 37) Ketigapuluhdelapan, Bastiaan Van Baak (20 April 1878 – 12 Mei 1889)
- 38) Ketigapuluhsembilan, Johannes Mullemeister (12 Mei 1889 – 15 Agustus 1891)
- 39) Keempatpuluh, Christiaan Marinus Ketting Oliver (15 Agustus 1891 – 5 Juli 1896)
- 40) Keempatpuluhatsu, Jan Abraham Ament (5 Juli 1896 – 8 Mei 1902)
- 41) Keempatpuluhdua, John Rivus Couperus (1802 – 1902).

Pada tahun 1903 di sebelah utara gedung utama didirikan bangunan yang disebut Paviliun Jenderal. Bangunan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk penginapan, tetapi kemudian dijadikan kantor asisten residen.

Pada tanggal 17 September 1906 di Loji Keresidenan diselenggarakan upacara penyempahan BRMH. Surarjaningrat yang diangkat menjadi kepala Kadipaten Pakualaman. Hadir dalam upacara di loji tersebut antara lain para pembesar Kadipaten Pakualaman, pembesar Pemerintah Hindia Belanda, komandan militer Belanda, juru bahasa, dan para undangan⁴¹).

Sebulan kemudian dikeluarkan surat keputusan gubernur Belanda tanggal 16 Oktober 1906 no. 16 yang isinya antara lain tentang penobatan BRMH. Surarjaningrat sebagai kepala keluarga Kadipaten Pakualaman dengan gelar KGPAA Prabu Suryodilogo dengan pangkat militer *Luitenant Kolonel bij den Generalen Staf van het Koninklijk Nederlandsch Indische Leger* (kelak ia bergelar KGPAA. Paku Alam VII dengan pangkat kolonel). Atas kehendaknya, upacara penobatannya secara resmi dilaksanakan pada 17 Desember 1906 di loji tempat kediaman residen⁴²).

- 42) Keempatpuluhtiga, Pieter Hugo von Andel (1908 – 1911)

- 43) Keempatpuluhempat, Jacob Hendrik Lieftrinck (1911 – 1913)

Residen Yogyakarta mulai tahun 1911 dipegang oleh Jacob Hendrik Lieftrinck. Semasa residen ini, yaitu ketika tahun 1912, gedung keresidenan bertambah. Tambahan tersebut ialah di sudut barat laut, juga dinding halaman sebelah utara, untuk menggantikan gedung tambahan sebelah utara yang dibongkar sehubungan dengan pembangunan Sekolah Dasar Putri Pertama⁴³).

Selain Sekolah Dasar Putri Pertama, bagian utara ini juga dipakai tempat kediaman asisten residen, Rumah Gadai Negara dan Kantor Kas Negeri⁴⁴).

- 44) Keempatpuluhlima, Barend Leonardus van Bijlevelt (1913 – 1915)

Mulai tahun 1913 residen Yogyakarta adalah Barend Leonardus van Bijlevelt. Pada masa residen ini kedua rumah jaga pada jalan besar yang disebut *Residentieaan* dibongkar⁴⁵).

- 45) Keempatpuluhenam, Cornelis Canne (1915 – 1919)

- 46) Keempatpuluh tujuh, Petrus Willem Jonquiere (1919 – 1924)

- 47) Keempatpuluhdelapan, Louis Frederik Dingemans (1924 – 1926)

- 48) Keempatpuluhsembilan, J.E. Jasper (1926 – 1927)

Berdasarkan ketetapan direktur BOW tanggal 5 Mei 1922 No. 13911/F, gedung keresidenan di Yogyakarta termasuk golongan gedung-gedung pemerintah kelas satu. Gedung keresidenan ini mempunyai halaman keliling. Di dalam gedung keresidenan ini terdapat :

- 1) Gedung induk yang sebagian digunakan untuk kamar-kamar, dilengkapi pula dengan kamar mandi dan WC. Di bagian belakang terdapat ruang makan atau ruang pesta yang luas, tempat penyimpanan, dan kamar rias;
- 2) Bangunan samping selatan ruang makan dipergunakan untuk kamar-kamar tidur, kamar mandi dan WC, kamar-kamar pembantu, dan tempat penyimpanan. Sebelah

- selatannya dipergunakan untuk kandang ayam;
- 3) Sebelah utara ruang pesta atau ruang makan dipergunakan sebagai dapur, tempat penyimpanan, kamar pembantu dan WC;
 - 4) Dalam kebun, sebelah utara bangunan induk tersendiri terdapat paviliun untuk tidur, kamar mandi, dan kamar pembantu;
 - 5) Di sudut barat laut halaman keresidenan terdapat bangunan samping untuk garasi mobil, kamar pembantu, penyimpanan rumput dan WC. Di dekatnya terdapat kandang kuda.

Berdasarkan *Staatsblad* 1927 No. 561, maka sejak tahun 1927 status Keresidenan Yogyakarta ditingkatkan menjadi gubernuran, (di bawah seorang gubernur). Dengan demikian gedung yang semula sebagai tempat tinggal residen, sejak saat itu menjadi tempat tinggal gubernur.

Adapun gubernur-gubernur yang menjabat di Yogyakarta berturut-turut adalah J.E. Jasper (1927 – 1929), P.R. W. van Gesseler Verschuur (1929 – 1932), H.H. de Cock (1932 – 1935), J. Bijleveld (1935 – 1940)⁴⁶, dan Dr. L. Adam (1940 – 1942).

Pada bulan September 1937, gedung gubernuran ini pernah digunakan untuk upacara menyambut tamu agung Gubernur Jenderal Jhr. Mr. A. AWL Tjarda van Starckenborgh Stachauwer. Gubernur jenderal berkunjung ke Yogyakarta setelah perjalanannya di Kota Semarang dan Solo. Dengan menaiki kereta api, pada hari Jum'at siang tanggal 24 September 1937 Gubernur Jenderal Tjarda tiba di Stasiun Tugu disambut oleh Gubernur J. Bijleveld, Sri Sultan dan Sri Paku Alam VII, serta diiringi pula oleh pejabat-pejabat lain. Selanjutnya Tjarda bersama sultan naik kereta kencana Kiai Garuda Yekso menuju Loji Gubernuran diikuti oleh pengiring. Saat itu Yogyakarta dihias meriah, lebih-lebih di depan Benteng Vrederburg. Pada hari Jum'at malam diadakan resepsi di gubernuran. Keesokan harinya dilanjutkan kunjungan-kunjungan ke lain tempat di Kota Yogyakarta. Upacara penyambutan gubernur jenderal kemudian dikenal oleh masyarakat dengan nama "jendralan"⁴⁷).

Pada tahun 1940, yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Dr. L. Adam, berhubung dengan penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, diadakanlah pertunjukan tari Bedaya Sinom di gedung gubernuran oleh perkumpulan Senitari Krida Beksa Wirama ⁴⁸).

Pada bulan Maret 1942 Jepang mendarat di P. Jawa dan masuk Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1942. Seluruh tentara Hindia Belanda pun menyerah kepada Jepang. Yogyakarta dijadikan sebagai "daerah istimewa" atau *koochi*, di daerah ini bertahta seorang raja (sultan untuk Kesultanan Yogyakarta) dengan sebutan *koo*. Di Yogyakarta *koochi* ada "Yang Mulia Yogyakarta Koo", yaitu Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII ⁴⁹).

Gedung gubernuran, yaitu gedung yang semula dipakai untuk berkantor dan tempat tinggal gubernur, setelah Jepang datang, mulai tanggal 5 Maret 1942 dipakai sebagai *Tyookan Kantai* dan juga sebagai tempat tinggal *Kochi Zimmukyoku Tyookan* yang dijabat oleh Keiki Jamanouchi ⁵⁰). *Koochi Zimmukyoku Tyookan* bertanggung jawab atas kesibukan-kesibukan latihan ketentaraan yang diadakan oleh pihak Jepang. Pada waktu kepala daerah yang bangsa Jepang itu bertempat tinggal di *tyookan kantai* (bekas gedung gubernuran), di muka gedung ini dijaga oleh militer Jepang. Orang-orang yang akan menghadap Pemerintah Jepang maupun melewati di muka penjagaan tersebut diwajibkan *seikerai* (hormat dengan membungkuk) kepada serdadu penjaga Jepang. Kalau tidak mau, orang-orang itu dipukuli oleh serdadu Jepang ⁵¹).

Pada tanggal 1 Agustus 1942, panglima besar tentara penjajah Jepang mengeluarkan "petunjuk dari *gunseikan* kepada *koo* (sultan) Yogyakarta. Di antara petunjuk-petunjuk itu adalah tentang pengangkatan "pembesar urusan umum" (*sumutyokan*) atau "pepatih dalem" oleh *gunsetreikan* atas usul Sri Sultan harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari gubernur Jepang. Semua undang-undang Jepang berlaku di daerah Kesultanan Yogyakarta. Sultan berhak mengeluarkan peraturan untuk daerah Kesultanan Yogyakarta, asal tidak bertentangan dengan Jepang dan lebih dahulu mendapatkan persetujuan gubernur Jepang ⁵²).

Usaha Jepang untuk mengorganisasi tentara cadangan Indonesia di Yogyakarta, mengilhami pemuda Indonesia untuk melakukan aksi yang militan⁵³); karena itu pada saat yang tepat, saat akan berakhirnya kekuasaan penjajah Jepang di Indonesia, para pemuda bersiap diri untuk bertindak. Tindakan para pemuda ini ternyata membuahkan apa yang selama ini diidam-idamkan, seperti apa yang diamanatkan oleh Sri Sultan IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 30 Oktober 1945. Di antara amanatnya, yaitu amanat no. 3, dinyatakan sebagai berikut.

"Bahwa kekuasaan-kekuasaan yang dahulu dipegang oleh Pemerintah Jajahan (dalam zaman Belanda dijalankan oleh gubernur dengan kantornya, dalam zaman Jepang oleh *koochi zimmukyoku tyokan* dengan kantornya) telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kembali pada kami berdua"⁵⁴)

Demikianlah keadaan gedung yang semula dipergunakan sebagai kantor dan tempat tinggal *tyokan* atau pembesar penjajah Jepang itu, setelah kemerdekaan Indonesia dapat direbut oleh rakyat dan diserahkan pada Sri Sultan dan Sri Paku Alam.

3.2 Masa Republik Indonesia

Dipandang dari segi peranan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dari beberapa kediaman resmi presiden, istana di Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting. Istana Yogyakarta ini kemudian lebih dikenal dengan nama Gedung Agung. Gedung Agung adalah pusat pemerintahan Republik Indonesia selama tahun-tahun revolusi dan sebagai istana yang pertama, menjadi tempat kediaman seorang presiden Republik Indonesia.

Pada bulan Juli 1944 Pulau Saipan yaitu pangkalan Angkatan Laut Jepang berhasil direbut oleh pihak Sekutu. Dengan jatuhnya Pulau Saipan ke tangan Sekutu berarti hubungan *nanpo* (wilayah selatan) dengan Negeri Jepang terancam. Keadaan ini di Tokyo dianggap sangat penting dan menimbulkan krisis kabinet. Sesudah itu kabinet *Tojo* jatuh pada tanggal 17 Juli 1944, kemudian diganti oleh *Kuniaki Koiso* sebagai perdana menteri.

Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso di dalam sidang istimewa *Teikoku Gekai* (Parlemen Jepang) ke-85 di Tokyo mengumumkan bahwa rakyat Indonesia akan diberi kemerdekaan "di kelak kemudian hari". Bertalian dengan itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 Pemerintah Militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan *Saiko Syikikan* Kumakici Harada mengumumkan pembentukan suatu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Jumbi Cosakai*).⁵⁵) Pembentukan badan penyelidik ini berdasarkan Maklumat *Gunseikan* Nomor 23 tanggal 29 April 1945. Pelantikan badan penyelidik ini dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 dan bertugas untuk merancang Undang-undang Dasar, beranggotakan 60 orang dengan ketua Dokter Rajiman Wedyodiningrat⁵⁶).

Pada waktu panitia bekerja memenuhi tugasnya, suasana perang bagi balatentara Jepang makin memburuk, dan terlalu cepat menuju ke arah keruntuhan. Menjelang keruntuhan Jepang tidak mudah untuk mengetahui, kapan mulai keruntuhan kekuasaan Jepang, karena pada waktu itu semua radio disegel, radio harus dibawa ke kantor *Hosokyoku* dan di situ ada bagian dinas radio Jepang sehingga yang dapat didengar hanya gelombang radio Jepang di Indonesia saja.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 atas panggilan Terauci berangkatlah Soekarno-Hatta beserta Dokter Rajiman ke Dalat dengan diantar Letnan Kolonel Nomura dan Myosji sebagai juru bahasa, untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 diumumkan oleh Presiden Truman dari USA dan Perdana Menteri Atlee dari Inggris, bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu tersebut, setelah jatuhnya bom atom di Jepang yaitu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus di Nagasaki. Juga dikeluarkan pernyataan dari kaisar Jepang sendiri untuk menghentikan seluruh perlawanan dan memerintahkan untuk menyerah. Kemudian Jepang yang begitu tiba-tiba menghadapkan Indonesia dengan ketegasan yang diperlukan untuk mengambil sikap yang pasti, sekalipun berlawanan dengan harapan semula; sebab perlucutan senjata balatentara

Jepang oleh tentara Sekutu di Indonesia akan membawa konsekuensi lebih jauh dengan kemungkinan kembalinya pemerintahan Belanda yang memboncong tentara Sekutu untuk kembali menguasai bekas jajahannya.

Keadaan politik Indonesia sudah jelas. Dengan adanya bermacam-macam inisiatif, seperti yang telah disusun sejak tahun-tahun tigapuluhan (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, disingkat PPI) sampai Zaman Jepang dari masa Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), *Jawa Kokokay* dan BPUPKI berusaha secara langsung atau tidak langsung merebut dan memproklamasikan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada saat diumumkan oleh Dewan Nasional yang menyatakan bahwa "Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia".

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, teks Proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Moh. Hatta di tempat kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Dengan proklamasi itu tercapailah Indonesia Merdeka yang susunan negaranya diatur dengan Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Dari hasil sidang dikeluarkan keputusan (a) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (b) Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, dan (c) Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional⁵⁷). Presiden segera membentuk Dewan Menteri sebagai pembantu presiden dan pada hakekatnya menjadi Kabinet Presidensiil sebelum penunjukan Kabinet Syahrir.

Pada saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak dapat diterima tepat pada waktunya di Yogyakarta, karena berita penting itu dicegah untuk disiarkan oleh *gunseikanbu*. Tetapi berkat ketangkasan para watawan (Indonesia) berita

tersebut dapat tersebar juga pada 18 Agustus 1945. Proklamasi itu disiarkan begitu cepat dengan perantara telepon ke kabupaten-kabupaten, Mesjid Besar dan Mesjid Paku Alaman oleh wartawan-wartawan. Kebetulan hari itu adalah hari Jum'at, sehingga dengan cepat sekali berita yang sangat penting itu tersiar ke seluruh pelosok. Kemudian Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta serta menyatakan berdiri di belakang mereka.

Walaupun pembesar-pembesar Jepang yang berkuasa di Yogyakarta sudah tahu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka tahu juga bahwa rakyat Indonesia di Yogyakarta bagaikan tertekan, kini meloncat bersemangat merdeka, tetapi Jepang enggan memberikan segala kekuasaan kepada rakyat Indonesia. Dengan jalan damai jelas kekuasaan itu sukar didapat. Pilihan lain tidak ada, kecuali merebut dengan jalan kekerasan. Kekuasaan Jepang harus direbut dengan jalan apa saja.

Pada tanggal 1 September 1945 di Yogyakarta dibentuk organisasi pemuda dengan nama Promotor Pemuda Nasional atau disingkat PPN. Di samping organisasi tersebut ada pula Organisasi Pelajar bernama GASEMA, yaitu Gabungan Sekolah Menengah Mataram. Pemuda-pemuda ini ikut aktif mengadakan aksi-aksi dalam menghadapi Jepang. Aksi-aksi dari para pemuda kian hari berkembang dan mulailah mereka mengadakan gerakan perebutan kekuasaan⁵⁶).

Pada tanggal 21 September 1945 lebih kurang pukul 12.00 terjadilah suatu peristiwa yang dikenal dengan nama "insiden bendera" di gedung *cokan kantai*. Dengan semangat yang menyala-nyala rakyat dan pemuda berduyun-duyun mendatangi gedung *cokan kantai*. Mereka dengan bersenjata bambu runcing, golok, tombak, palu, pentung, dan sebagainya. Sambil meneriakan kata-kata "Siap" dan pekik "Merdeka" mereka menuju gedung *cokan kantai*. Dibakar semangat api proklamasi dan revolusi, mereka datang dengan tekad dan tujuan yang sama yakni menurunkan bendera *hinomaru* yang masih berkibar di gedung *cokan kantai*. Kemudian menggantikannya dengan

mengibarkan bendera "merah putih". Dengan semangat yang menyala-nyala massa rakyat dan pemuda berusaha menerobos penjaga Jepang yang bersenjata. Tanpa mempedulikan bahaya yang mengancam di depannya, lima orang pemuda yang terdiri atas empat orang laki-laki dan seorang wanita berhasil menerobos penjaga Jepang dan kemudian naik di atas atap gedung *cokan kantai* untuk menurunkan bendera Jepang *hinomaru* serta menggantikannya dengan menaikkan dan mengibarkan bendera "merah putih". Kelima pemuda tersebut adalah Kapten (Polisi) Slamet, Sultan Ilyas, Sapardi, Rusli dan Siti Ngaisah. Setelah *hinomaru* berhasil diturunkan dan bendera "merah putih" dikibarkan di Gedung Agung, massa rakyat dan pemuda spontan meneriakkan yel-yel "merdeka" ⁵⁹).

Pada tanggal 23 September 1945 pihak Jepang berhasil melucuti senjata kesatuan polisi istimewa di Gayam. Pada malam harinya sekitar pukul 21.00 rakyat dan pemuda serta polisi mengepung markas Jepang. Akhirnya senjata-senjata itu dapat direbut kembali dan segera dibagi-bagikan untuk digunakan sebagai senjata perjuangan. Dengan direbutnya kembali senjata-senjata Polisi di Gayam itu, maka gerakan persatuan kekuasaan dan perebutan senjata Jepang di Yogyakarta semakin meningkat. Suasana Kota Yogyakarta mulai makin panas. Di mana-mana timbul insiden dan bentrokan-bentrokan ⁶⁰).

Pada tanggal 26 September 1945 segenap pegawai kantor baik kantor-kantor negeri maupun partikelir, perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik seluruh Yogyakarta mulai pukul 10.00 menyatakan aksi serentak untuk mengambil alih kekuasaan atau pimpinan yang ada pada saat itu masih di tangan Jepang. Aksi pemogokan ini mendapat bantuan sepenuhnya dari barisan rakyat, pemuda-pemuda, dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang secara rapi mengepung tempat-tempat tertentu. Di bawah pimpinan KNI (Komite Nasional Indonesia) dan kekuasaan yang teratur, mereka mendesak dengan keras agar supaya pimpinan dan kekuasaan diserahkan kepada pegawai Indonesia. Sampai pada pukul 20.00 pimpinan semua kantor telah berada di tangan bangsa Indonesia ⁶¹).

Selanjutnya guna penyempurnaan penjagaan keamanan, pada tanggal 28 September 1945 atas perkenan Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dengan maksud untuk lebih tertib dan kuatnya penjagaan keamanan di bawah satu pimpinan, maka Pusat Pimpinan Keamanan yang berkantor di Kepatihan diserahkan kepada KNI dan di bawah pimpinan Sri Paduka Sultan.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 terjadilah usaha perebutan gedung *cokan kantai* yang masih diduduki pihak Jepang oleh pemuda dan rakyat yang terdiri atas Barisan Penjaga Umum (BPU), BKR, Polisi, pemuda pelajar, buruh, pedagang, dan sebagainya. Mereka datang berduyun-duyun sambil mencriakkan pekik merdeka. Akhirnya gedung *cokan kantai* dapat diduduki dan kemudian ditempati sebagai gedung KNI Daerah (yang semula menempati bekas gedung *hoo koo kai*, (sekarang Kanwil Departemen Penerangan, Jalan KHA. Dahlan) dan selanjutnya diberi nama "Gedung Nasional" atau "Gedung Agung" ⁶²).

Pada tanggal 7 Oktober terjadi pertempuran di Kotabaru. Sebelum terjadi pertempuran *kido butai* di Kotabaru terlebih dahulu diadakan perundingan-perundingan yang terpisah atau berlainan tempat antara KNI dengan pimpinan tentara Jepang yang bermarkas di Kotabaru dan di lain tempat antara BKR yang diwakili oleh Moh. Saleh, RP. Sudarsono, Bardosono dan Sunyoto dengan pihak Jepang Mayor Otsuka, Ken Petai Taico Sasake, Kapten Ito dan Cianbuco bertempat di rumah Bataico Kotabaru. Dalam perundingan tersebut pihak Indonesia yang diwakili KNI dan BKR meminta agar Jepang suka menyerahkan senjatanya dan berkewajiban menjaga ketentraman dan keamanan dalam negeri, tetapi Jepang tetap berkeras tidak mau menyerahkan senjata. Karena perundingan menemui jalan buntu maka tidak ada jalan lain selain merebutnya dengan cara kekerasan. Pada tanggal 6 Oktober 1945 pukul 23.00 di kampung-kampung disiapkan untuk mengerahkan pemuda. Dengan bersenjatakan bambu runcing, golok, tombak dan lain sebagainya mereka menggabungkan diri dalam laskar rakyat yang secara bersama-sama bersiap-siap menyerbu Kotabaru, pusat tentara Jepang. Mereka bersama-sama dengan Pasu-

kan BKR, Polisi Istimewa mengadakan pengepungan markas tentara Jepang. Penyerbuan dilakukan sekitar pukul 0.400 dengan ditandai letusan granat untuk dimulai penyerangan. Serangan dari massa rakyat mendapat balasan dari pasukan militer Jepang, sehingga terjadilah pertempuran seru. Pada hari berikutnya tanggal 7 Oktober 1945 pukul 10.30 Jepang mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Kemudian semua senjata tentara Jepang dikumpulkan dan semua tentaranya ditawan. Dalam pertempuran Kotabaru ini telah meminta korban para pejuang, 21 orang gugur dan 32 orang luka-luka, sedangkan pihak Jepang 9 orang tewas dan 20 orang luka-luka. Adapun para pejuang kita yang telah gugur antara lain ialah I Dewa Nyoman Oka, Amat Jajuli, Faridah M. Noto, Sunoto, Syuhada, Supadi, Sabirin, Abubakar Ali, Atmo Sukarto, Wardhani, dan lain-lain. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran Kotabaru, maka nama-nama para pahlawan tersebut diabadikan sebagai nama-nama jalan di Kotabaru. Pemakaman jenazah para pahlawan korban pertempuran tersebut, dilakukan pada pukul 16.00 berangkat dari Gedung Agung menuju Taman Bahagia di Semaki dan ada pula yang dimakamkan di Kauman dan Karangkejèn⁶³). Dengan berakhirnya pertempuran di Kotabaru berarti berakhirilah kekuasaan Jepang di Yogyakarta.

Sesudah berhasil menaklukkan dan melucuti sebagian besar senjata tentara Jepang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatra, disusul kemudian lembaran baru dari sejarah kemerdekaan, yaitu menghadapi pendaratan tentara Sekutu (Inggris) yang diboncengi oleh orang-orang NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) yang hendak menegakkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda. Pada mulanya kedatangan pasukan-pasukan Serikat disambut dengan sikap netral, tetapi setelah diketahui pasukan Serikat membawa orang-orang NICA, maka sikap pihak Indonesia berubah menjadi permusuhan.

Pasukan Serikat yang bertugas di Indonesia ini merupakan komando khusus dari *South East Asia Command* (SEAC) diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) yang mempunyai tiga divisi di bawah Letnan Jendral Sir Philip Christison.

Sewaktu mendarat di Tanjung Priok, Jakarta, Letnan Jendral Philip Christison menerangkan bahwa kewajiban tentara Inggris di Jawa adalah sebagai berikut.

- 1) Menerima penyerahan pasukan-pasukan Jepang;
- 2) Membebaskan tawanan perang dan interniran Sekutu;
- 3) Melucuti dan mengumpulkan pasukan Jepang untuk dikembalikan ke negerinya sendiri;
- 4) Menegakkan dan mempertahankan situasi damai, kemudian menyerahkannya pada Pemerintah Sipil; dan
- 5) Mengumpulkan keterangan-keterangan tentang penjahat perang dan mengajukan mereka ke depan pengadilan. ⁶⁴⁾

Pada dasarnya misi Christison di Jawa ialah untuk menjaga keamanan dan tidak akan mencampuri politik dalam negeri. Bendera kebangsaan "merah putih" boleh terus berkibar. Tentara Belanda tidak akan diperbolehkan turut mendarat, tetapi ternyata pihak Inggris kurang jujur dalam tindakannya. Tentara Belanda dengan tipu daya mendarat juga, dan dengan terang-terangan mereka membuat kacau suasana.

Di kota-kota yang didatangi pasukan Serikat seringkali terjadi insiden-insiden bahkan pertempuran-pertempuran dengan pihak Republik Indonesia. Tingkah laku tentara Inggris pun banyak yang mengecewakan. Di Surabaya terjadi pertempuran antara tentara Sekutu dengan rakyat Surabaya. Dalam pertempuran ini mengakibatkan matinya Brigadir Jendral Mallaby. Jendral Mansergh sebagai pengganti Mallaby lalu mengultimatum para pemuda Surabaya yang memiliki senjata supaya menyerahkan senjatanya dengan tidak bersyarat. Apabila mereka tidak mau menyerahkan senjatanya dalam waktu yang telah ditentukan, maka Surabaya akan digempur dari laut, darat dan udara. Tuntutan Mansergh ditolak oleh pimpinan-pimpinan rakyat. Pada tanggal 10 Nopember 1945 yaitu saat berakhirnya tempo ultimatum Mansergh, berkobarlah pertempuran yang maha dahsyat selama 15 hari.

Pertempuran dimulai dengan suatu insiden bendera di Hotel Oranye Simpang, rakyat menyerbu beramai-ramai menurunkan bendera "triwarna" kemudian merobek bagian

paling bawah dan menaikkan kembali sebagai "dwiwarna". Seluruh rakyat turut bertempur. Pemuda-pemuda Jawa Timur yang pada hari itu mengunjungi Kongres Pemuda yang pertama di Yogyakarta dengan segera dan serentak meninggalkan sidang dan berangkat ke Surabaya untuk turut bertempur. Peristiwa ini diakui sebagai Hari Pahlawan dan diperingati setiap tahun. Pertempuran Surabaya ini menjalar ke Semarang, Ambarawa, Salatiga dan Magelang menuju Yogyakarta. Karena hebatnya perlawanan rakyat pada tanggal 21 Nopember 1945 tentara Inggris terpaksa meninggalkan Kota Magelang. Satuan-satuan gerilya Indonesia di bawah bekas Daidanco Soedirman berhasil memukul dan menguasai tentara Inggris di Ambarawa. Karena dalam pertempuran di Ambarawa mengalami kegagalan, maka tentara Sekutu mengirimkan pesawat *Royal Air Force* untuk menyerang Stasiun RRI Yogyakarta, Balai Mataram dan Sana Budaya.

Menghadapi situasi konflik yang semakin gawat antara Republik dan pasukan-pasukan Sekutu di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengajukan suatu gagasan pada Presiden Soekarno. Gagasan tersebut adalah untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat ke Yogyakarta. Tentara Belanda makin merajalela di ibukota dan hendak menegakkan kembali pemerintahan kolonialnya makin menjadi kuat dengan mendaratnya pasukan-pasukan marinir di Tanjung Priok menjelang tahun baru. Berhubung dengan meningkatnya teror di Jakarta, maka gagasan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk memindahkan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta diterima.

Pada tanggal 4 Januari 1946 menjelang magrib, sebuah kereta api berhenti di belakang rumah Pegangsaan Timur 56 untuk menjemput presiden, wakil presiden, para menteri dan pembantu dekatnya. Tak seorang pun diperbolehkan membawa harta bendanya. Setelah rombongan semua naik, kereta bergerak perlahan-lahan hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua hari kemudian Yogyakarta diresmikan sebagai ibukota Republik Indonesia yang baru. Gedung Agung menjadi tempat kediaman resmi presiden dan mendapat julukan dari rakyat

sebagai kepresidenan ⁶⁵). Sebagai tempat kediaman wakil presiden adalah bekas kediaman wakil residen yang berseberangan dengan Gedung Agung di Jalan Reksabayan (Kowilhan II Jawa Madura sekarang).

Kepresidenan selain berfungsi sebagai istana juga tempat sidang kabinet, sebagai markas kursus-kursus politik, sebagai pesanggrahan bagi pemimpin-pemimpin yang belum memiliki rumah atau karena masih bujangan seperti Bung Sjahrir dan lain-lain ⁶⁶). Ruangan paling belakang dipergunakan Bung Karno memberikan kursus politik bagi kaum wanita dan massa pemuda. Di samping untuk memberikan kursus politik, ruangan tersebut juga sering digunakan untuk memutar film keluarga presiden.

Usaha-usaha Perdana Menteri Sutan Sjahrir untuk berunding dengan wakil Inggris Sir Archibald Clark Kerr dan Letnan Gubernur Dr.H.J.Van Mook di Hoge Veluwe (Holland), kemudian dilanjutkan di Indonesia pada tanggal 10 Pebruari 1946 tidak membawa hasil, sebab statemen politik Pemerintah Belanda mengajukan empat syarat sebagai ulangan pidato ratu pada tanggal 7 Desember 1942, yang isinya adalah sebagai berikut.

- 1) Indonesia akan dijadikan negara *commonwealth* berbentuk federasi yang memiliki *self government*;
- 2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sendiri, sedangkan untuk urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda;
- 3) Sebelum dibentuk *commonwealth* akan dibentuk pemerintah perwakilan selama 10 tahun; dan
- 4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB ⁶⁷).

Syahrir mengajukan usul balasan menuntut pengakuan kekuasaan *de facto* bagi Republik atas Jawa, Madura dan Sumatra. Usul balasan pihak Indonesia ditolak oleh Pemerintah Belanda. Sementara itu di dalam negeri terjadi krisis politik. Kabinet Syahrir I jatuh, karena Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka tidak puas dengan kerja Kabinet Syahrir, kemudian presiden menunjuk Syahrir untuk membentuk kabinet

baru lagi dan Kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi lawan-lawan Syahrir tetap aktif, dan pada tanggal 27 Juni 1946 Syahrir diculik oleh unsur-unsur Persatuan Perjuangan. Sebagai balasan peristiwa penculikan Syahrir, pada tanggal 3 Juli 1946 komandan Divisi Mayor Jendral Sudarsono mendatangi Istana Presiden, memaksa presiden untuk menandatangani komposisi kabinet yang sudah dipersiapkan lebih dahulu, tetapi Sudarsono dan kawan-kawan segera dapat diringkus. Peristiwa perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Tan Malaka dan kawan-kawannya ini terkenal dengan sebutan Peristiwa 3 Juli 1946.

Dengan adanya peristiwa 3 Juli 1946, Kabinet Syahrir II jatuh. Pada tanggal 14 Agustus 1946 presiden memerintahkan Syahrir untuk membentuk kabinet baru yang berdasarkan nasionalitas. Syahrir berhasil dan ia tetap menjabat sebagai perdana menteri dalam Kabinet Syahrir III. Yogyakarta berperan sebagai ibukota Republik Indonesia, sedangkan Istana Kepresidenan (sekarang Gedung Agung) menjadi jantung segala kesibukan.

Belanda berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dilakukan oleh *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di bawah pimpinan Letnan Gubernur Jendral H.I. Van Mook (1942 – 1948) sebagai pengganti Carda Van Starckenborgh Stachouwer yang beroperasi di luar Indonesia selama pendudukan Jepang. NICA dibantu oleh *Netherlands Expeditionary Intelligence Service* (NEFIS) yang didirikan selama Perang Dunia II di Australia di bawah Jendral I.H. Spoor. Di daerah-daerah tingkat provinsi yang diduduki dibentuk pemerintahan administratif dengan masing-masing disebut *Regerings Commisaris Bestuur Aangelegen* disingkat *Recomba*. Tugas badan ini adalah mengatur daerah-daerah sesuai dengan kepentingan Belanda. Namun demikian keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengembalikan sistem kolonialnya. Bangsa Indonesia sudah mengalami kemajuan didukung oleh iklim politik dunia yang ikut serta membantu mempertahankan dan mengembangkan kemajuan tersebut. Hal ini sesuai dengan *Atlantic Charter* yang dirumuskan oleh Presiden Franklin D.

Roosevelt dari USA dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941 tentang hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua bangsa.

Di kota-kota besar yang diduduki Inggris, tentara Belanda sudah mendapat tempat yang baik, meskipun pada mulanya Inggris menyatakan tidak akan membawa tentara Belanda mendarat, tetapi kenyataannya Belanda terus-menerus didatangkan. Pada tanggal 13 Juli 1946 Sekutu menyerahkan kekuasaan penuh kepada Belanda untuk daerah di luar Jawa dan Sumatra. Belanda mulai dengan politik separatismenya. Van Mook mengadakan Konperensi Malino dan Pangkal Pinang. Kepulauan dan rakyat Indonesia dipecah-belah. Di pihak Republik tidak ada keuntungan selain dari langkah pemuda. Perjuangan Indonesia saat itu mempertahankan Jawa dan Sumatra, sedangkan daerah-daerah lain sukar dipertahankan, meskipun rakyat di daerah itu mati-matian berjuang mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945⁶⁸).

Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berunding kembali. Atas persetujuan Pemerintah Indonesia dan Belanda, Lord Killern – duta istimewa Inggris di Asia Tenggara – ditunjuk menjadi perantara. Pada tanggal 21 Juni 1946 diadakan pertemuan di Istana Presiden antara Sutan Syahrir dan Lord Killern. Dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa hal persetujuan, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Mengadakan perletakan senjata sebelum perundingan dimulai;
- 2) Menentukan penyingkiran Apri; dan
- 3) Terjaminnya penduduk Tionghoa dan India dari bahaya.

Tentang perletakan senjata, Sutan Syahrir sebelumnya sudah beberapa kali mengajukan usul kepada pihak Serikat, tetapi belum pernah mendapat jawaban yang memuaskan⁶⁹).

Pada tanggal 5 Oktober 1946 dilangsungkan peringatan pertama angkatan bersenjata Indonesia di halaman depan Istana Presiden di Yogyakarta dengan parade militer besar-besaran. Kejadian-kejadian selanjutnya yang tersurat dalam sejarah Republik Indonesia, ialah konperensi antara pemerintah c.q.

kementerian dalam negeri dan golongan "Indo" pada tanggal 1 Januari 1947. Pelantikan anggota-anggota Mahkamah Militer Tinggi di bawah Mr. Kusumaatmaja di Istana Presiden pada tanggal 17 Pebruari 1947, dan kunjungan Konsul Jendral Mesir Abdul Munir ke Yogyakarta pada 13 Maret 1947.

Pada waktu Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia, perwakilan India bertempat tinggal di Hotel Merdeka (sekarang Hotel Garuda) dan sebagai pimpinan adalah Moh. Yunus; begitu pula perwakilan Tiongkok di bawah pimpinan Wen Su Chein. Di Kaliurang dan di Jalan Terban, Kauman digunakan sebagai tempat kediaman perwakilan utusan Persekutuan Bangsa-bangsa yaitu anggota Komisi Tiga Negara (KTN) yang bertugas menengahi sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda. KTN tersebut membantu terselenggaranya perundingan-perundingan politik antara RI dan Belanda. Hal itu memperkuat posisi RI sebagai negara berdaulat di dunia internasional. Walaupun pelabuhan-pelabuhan besar dan pusat-pusat perekonomian diduduki oleh Belanda dengan kekerasan, tetapi rakyat di daerah pendudukan dan juga di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan lain-lain bergolak terus. Semuanya berkiblat ke Yogyakarta ⁷⁰).

Perundingan-perundingan yang gagal biasanya dimulai lagi dengan persetujuan gencatan senjata (*cease fire*). Perundingan dan persetujuan *cease fire* disusul dengan ditandatanganinya Persetujuan Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1946. Persetujuan ini mendapat reaksi, baik reaksi dari pihak Indonesia maupun dari pihak Nederland. Dalam Persetujuan Linggarjati Belanda mengakui RI secara *de facto* di Jawa, Madura dan Sumatra. Sebenarnya perjanjian itu tidak dapat diterima oleh Pemerintah Belanda, karena sudah terlalu jauh dari pendirian Belanda sehingga perjanjian itu ditafsirkan secara sepihak oleh Belanda. Kemudian Belanda meminta agar RI menandatangani Persetujuan Linggarjati dengan tafsiran Belanda, tetapi oleh RI ditolak dan RI akari menafsirkan Persetujuan Linggarjati menurut notulen yang dibuat di Linggarjati. Karena terdesak keadaan dan untuk menghindari peperangan, maka Persetujuan Linggarjadi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 oleh

Sutan Syahrir, Schemerhorn (Belanda) dan Lord Killern (Inggris).

Ternyata Persetujuan Linggarjati ini tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak. Belanda melanjutkan untuk menyponsori negara-negara boneka. Daerah Istimewa Kalimantan Barat didirikan di bawah Sultan Hamid Alqadri II, kemudian Negara Pasundan di bawah Surya Kartalegawa, di samping itu Belanda membuat tekanan ekonomi terhadap "Republik Yogya" dengan melakukan embargo barang-barang dari luar negeri. Tetapi tekanan-tekanan ekonomi ini tidak banyak mempengaruhi perjuangan, sebab kekuasaan Belanda hanya terbatas dalam kota, sedangkan daerah-daerah pedesaan sebagian besar masih dikuasai oleh satuan-satuan gerilya.

Pada tanggal 28 Mei 1947 misi Belanda di bawah pimpinan Van Idenburg masih mengunjungi Yogyakarta, kemudian Konsul Jendral Inggris Mr. Mitcheson dan Wakil Konsul Lambert pada tanggal 6 Juni 1947. Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno melantik Jendral Sudirman sebagai panglima besar TNI di Istana Kepresidenan Yogyakarta, kemudian juga sebagai pucuk pimpinan TNI pada tanggal 28 Juni 1947⁷¹).

Sesudah Persetujuan Linggarjati, situasi politik menjadi tegang. Perdana Menteri Sutan Syahrir dari Partai Sosialis kehilangan kepercayaan partainya sendiri dan meletakkan jabatan. Setelah jatuhnya Kabinet Syahrir III, presiden menunjuk Mr. Amir Syarifuddin untuk menyusun kabinet baru. Sementara itu pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda memulai aksi militernya yang kemudian terkenal dengan *Clash I*. Semua lapangan terbang Republik dibom oleh angkatan udara Belanda. Tank-tank serta tentara Belanda dengan dilindungi oleh pesawat udara menyerbu ke segala penjuru. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menerobos pertahanan TNI. Serangan Belanda ini menjadi batu ujian bagi TNI yang meskipun tidak dapat menghadapi secara frontal, tetapi dapat mengadakan perlawanan yang dipandang dengan aturan internasional benar-benar merupakan keadaan perang.

Agresi militer Belanda pertama itu menimbulkan kekhawatiran mengenai bahaya terhadap ibukota. Presiden terpaksa diungsikan secara rahasia ke Gunung Wilis, 120 km dari Madiun sampai terjadinya gencatan senjata, dua minggu kemudian⁷²).

Garis-garis demarkasi dibentuk di mana-mana selama terjadi kancah pertempuran yang sedang berlangsung, diselingi pula pertemuan-pertemuan untuk mencari kesepakatan. Ketika pesawat milik PAT naik membawa obat-obatan untuk Palang Merah Indonesia dari Singapura hendak mendarat di Yogyakarta, pesawat-pesawat pemburu Belanda menyergap dan menembak jatuh pada tanggal 29 Juli 1947 di sebuah desa di selatan Kota Yogyakarta. Para korban penembakan pesawat tersebut adalah Laksamana Muda Adisucipto, Dr. Abdurakhman Saleh, Hadi Sumarmo, Wiryokusumo – eks Wing Commandan Constantin –, Mrs. Constantin, dan eks Wing Leader Maxelhurst. Tetapi pengiriman obat-obatan dari India datang juga, diserahkan oleh Dr. Nirula, Dr. Seuda dan Dr. I.K. Rey pada tanggal 26 Agustus 1947. Di tengah-tengah perjuangan melawan Belanda, terbentuklah *International Brigade* di bawah Abdulwahid Khan (India), Dr. Estrada (Pilipina), Tomy Wen (Cina) dan Adnan (Malaysia) pada bulan Agustus 1947⁷³). Tentara tetap bergerak di kantong-kantong gerilya Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatra, bahkan menyusup ke Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Perjuangan dipimpin dari Yogyakarta sebagai otak dan tumpuan harapan bangsa, dengan keyakinan kemenangan akan tercapai.

Pada tanggal 31 Juli 1947 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa menerima resolusi dari India dan Australia agar segera diadakan gencatan senjata dan perundingan. Untuk mengawasi gencatan senjata ini dibentuk sebuah "komisi jasa-jasa baik" atas usul Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan. Indonesia dan Belanda dipersilakan untuk memilih satu negara yang dipercaya untuk mengawasi penghentian tembak-menembak. Pemerintah Indonesia menunjuk Kirby dari Australia, Belanda menunjuk Van Zeeland dari Belgia dan kedua anggota yang terpilih ini menunjuk Graham dari Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Komisi PBB ini di Indonesia dikenal sebagai

Komisi Tiga Negara (KTN) yang bertugas menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda.

Pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika "Renville" ditandatangani Persetujuan Renville. Kedua belah pihak akan menyelesaikan persengketaan politik tentang Jawa, Madura dan Sumatra dengan perantaraan KTN. Kerja sama akan diwujudkan di bidang ekonomi dan perhubungan, terutama Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong. Untuk menentukan daerah-daerah Republik di masa depan akan dibuat plebisit di Jawa, Madura dan Sumatra, di bawah pengawasan KTN.

Akan tetapi Belanda masih aktif menyponsori timbulnya negara-negara boneka, antara lain Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Madura dan lain-lain. Dengan adanya Perjanjian Renville maka Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Kemudian presiden memerintahkan Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet baru dengan segera. Pada tanggal 31 Januari 1948 susunan kabinet baru diumumkan, dengan Moh. Hatta sebagai perdana menteri merangkap menteri pertahanan⁷⁴).

Selama Kabinet Hatta, presiden telah menerima kunjungan Misi Parlemen Indonesia Timur di bawah Arnold Mononutu pada tanggal 8 Pebruari 1948 di istana kepresidenan. Sesudah itu pada tanggal 17 Agustus 1948 diterima pula oleh presiden kunjungan Pangeran Abdullah dari Hadramaut, Saudi Arabia. Presiden juga membentuk amnesti dan abolisi pada 145 pemimpin yang terlibat "Peristiwa 3 Juli".

Belanda terang-terangan mengingkari Perjanjian Renville untuk mematahkan semangat perjuangan Republik Indonesia; di bidang politik Belanda memecah-belah persatuan Indonesia dengan mendirikan negara-negara bagian, di bidang ekonomi Belanda mengadakan blokade yang ketat, sedang di bidang militer Belanda memusatkan tentaranya di perbatasan daerah-daerah yang dikuasai Republik.

Pada saat-saat yang genting, pada tanggal 18 Desember 1948 PKI (Partai Komunis Indonesia) melakukan pemboikotan

di Madiun. PKI dapat mempengaruhi Brigade 29 di daerah itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dachlan. Banyak pimpinan tentara dan pejabat pemerintah ditangkap dan dibunuh. Ribuan rakyat yang tak tahu-menahu menjadi korban pembunuhan. Pemerintah segera mengambil tindakan untuk menumpas pembontakan PKI. Pada tanggal 30 September 1948 pukul 16.15 Kota Madiun berhasil direbut kembali oleh Gerakan Operasi Militer I. Muso terbunuh dalam pengejaran rakyat secara beramai-ramai, Amir Syarifuddin dengan beberapa pemimpin menjalani hukuman mati.

Sementara itu delegasi-delegasi Indonesia dan Belanda masih melanjutkan perundingan-perundingan di Jakarta dan Kaliurang. Penggantian Van Mook oleh Dr. Beel sebagai wakil tinggi mahkota Belanda mengakibatkan suasana yang lebih gawat. Akhirnya Belanda untuk kedua kalinya hendak memaksakan pendiriannya. Pemerintah Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville. Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda melakukan kembali aksi militernya yang kedua (*Clash II*). Lapangan Terbang Maguwo dibom kemudian mendaratkan tentara payungnya. Mula-mula penduduk Yogyakarta menyangka bahwa tentara kita sedang mengadakan latihan perang, karena sebelumnya telah diumumkan bahwa pada tanggal 19 Desember tentara kita akan mengadakan latihan di sekitar Yogyakarta. Sore harinya seluruh Kota Yogyakarta sudah diduduki tentara Belanda. Pagi itu di Istana Negara diadakan sidang kabinet dipimpin oleh Presiden Soekarno untuk menentukan apa yang harus diperbuat.

Panglima Besar Sudirman yang sedang sakit mendesak Bung Karno untuk meninggalkan kota dan bergerilya di hutan. Tetapi presiden menolak sehingga Jendral Sudirman dengan kecewa berangkat, mengambil jalan yang masih terbuka ke arah tenggara Yogyakarta, memenuhi janjinya akan memegang kembali pimpinan angkatan perang dan memimpin gerilya jika musuh menyerang kembali. Menjelang tengah hari seluruh kota telah diduduki kecuali kraton, dan istana presiden dikepung dari segala jurusan dengan kendaraan berlapis baja. Tetapi sebelumnya pemerintah sempat juga mengeluarkan beberapa pengu-

muman yang disiarkan Kementerian Penerangan melalui Radio Republik Indonesia yang tak seberapa jauh letaknya dari istana. Pertama diumumkan bahwa Belanda telah mulai dengan agresi kedua dan menganjurkan supaya rakyat berjuang terus. Pengumuman kedua pada mulanya menyerukan kepada rakyat untuk memilih pimpinan pemerintahan yang baru guna meneruskan perjuangan jika presiden dan wakil presiden sampai terbunuh atau tertawan. Pengumuman tersebut diubah atas usul H. Syahrir agar jangan sampai terjadi pembentukan berbagai pemerintahan sekaligus. Pada pukul 11.00 RRI Yogyakarta mengudarkan siaran yang isinya bahwa jika sampai pemimpin-pemimpin pemerintahan di Yogyakarta ditangkap Belanda, maka Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra ditunjuk untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, atau jika dia tak berhasil, Menteri Keuangan Mr. AA Maramis yang sedang berada di India diperintahkan membentuk pemerintahan darurat di luar negeri. Beberapa waktu kemudian, setelah pasukan Belanda menghujani daerah sekitar istana dengan serentetan tembakan secara terus-menerus, Bung Karno keluar bersama seorang perwira yang membawa bendera putih, diiringi beberapa menteri berjalan menuju ke arah komandan tentara Belanda di pinggir Jalan Suryadiningratan⁷⁶).

Ibukota Yogyakarta diduduki oleh tentara Belanda. Pada tanggal 22 Desember 1948 Presiden Soekarno, HA. Salim dan H. Syahrir diasingkan ke Berastagi, sedangkan Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Moh. Rum, Mr. A.G. Pringgodigdo, Mr. Asaat dan Marsekal Udara Suryadarma diasingkan ke Bangka. Pasukan Belanda mengira dengan jatuhnya Yogyakarta dan ditangkapnya presiden, wakil presiden serta pemimpin-pemimpin lainnya, perjuangan RI sudah berakhir. Ternyata perkiraan Belanda itu meleset, karena pemerintah daerah di bawah Syafruddin Prawiranegara meneruskan pimpinan negara dalam perang dan TNI terus mengadakan perlawanan. Dewan Keamanan PBB campur tangan lagi dan sidang-sidang Dewan Keamanan diadakan. Kekuatan-kekuatan internasional yang tadinya netral, kemudian berbalik dan reaksi dunia menjadi gencar. Pendapat dunia

bergerak mendukung RI. Konperensi Asia diadakan di New Delhi di bawah pimpinan Pandit Jawaharlal Nehru pada tanggal 23 Januari 1949. Bersama-sama dengan 19 bangsa Asia lainnya Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru membuat resolusi menuntut pembebasan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dari pengasingan dan penarikan mundur pasukan-pasukan Belanda dari Yogyakarta. Berdasarkan resolusi yang diajukan di konperensi tersebut pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB memerintahkan Belanda untuk menghentikan permusuhan dan mengembalikan pemimpin-pemimpin Republik ke Yogyakarta.

Walaupun Yogyakarta diduduki Belanda, presiden dan wakil presiden diasingkan ke Sumatra, tetapi secara *de jure* Republik Indonesia masih tetap berdiri, karena (1) Pemerintah darurat Republik Indonesia tetap bertahan di bawah Acting Presiden Mr. Syafruddin Prawiranegara dan (2) Di Jawa, Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan tokoh yang dihargai oleh musuh, dan di samping itu menjadi sumber ilham bagi perjuangan gerilya. Ketika itu Istana Kepresidenan (Gedung Agung sekarang) tidak ditempati, kecuali sebuah pos polisi militer di bekas kantor asisten residen (*Guest House* sekarang)⁷⁷).

Sementara itu serangan-serangan gerilya Indonesia menghebat. Hampir tiap kali terjadi pertempuran di daerah Yogyakarta. Puncak serangan pejuang-pejuang Indonesia terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh pasukan *Wehrkreise III* di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto (presiden Republik Indonesia sekarang). Serangan dilaksanakan pada tengah malam sampai fajar, mengakibatkan kerusakan dan korban besar di pihak Belanda. Kota Yogyakarta berhasil diduduki oleh pejuang-pejuang kita selama 6 jam. Dari pihak luar Belanda ditekankan oleh PBB, sedang dari dalam Belanda tidak dapat menghadapi perang gerilya Indonesia.

Sesudah penarikan mundur satuan-satuan gerilya, Mayor Dr. Argement, Kolonel Van Langen dan Stok (penasihat Pemerintah Yogyakarta) membuat hubungan dengan sultan dan berkonsultasi tentang urusan keamanan, tetapi ditolak. Pada tanggal 2 Maret 1949 J.H. Spoor sendiri memeriksa keadaan tentara

pendudukannya di Yogyakarta. Sementara itu BFO (*Bijeenkomst Voor Federaal Overleg*) yakni wakil-wakil dari negara federal menyatakan dukungan mereka pada tuntutan pengembalian ibukota Yogyakarta kepada Republik. Tidak ada jalan lain bagi Belanda selain menerima resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 untuk dapat melaksanakan putusan PBB itu. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara Mr. Moh. Roem dan Dr. Van Royen di bawah pimpinan Coehran anggota komisi PBB untuk masalah Indonesia (*United National Commission*).

Pada tanggal 7 Mei 1949 ditandatangani Persetujuan Roem-Royen, yang isinya antara lain adalah penghentian tembak-menembak, mengembalikan Yogyakarta dan kota-kota lain kepada RI, membebaskan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta serta pemimpin-pemimpin lainnya. Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Konperensi Meja Bundar.

Sesuai dengan Persetujuan Roem-Royen, pada tanggal 30 Juni 1949 Kota Yogyakarta dikembalikan kepada RI dan pasukan-pasukan Belanda ditarik mundur seluruhnya dari Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949 presiden dan wakil presiden bersama pemimpin-pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai acting presiden Republik Indonesia mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada tanggal 4 Agustus 1949 kabinet baru dibentuk dengan Wakil Presiden Moh. Hatta ditunjuk sebagai perdana menteri dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri pertahanan dan koordinator keamanan.

Sebelum Konperensi Meja Bundar dilaksanakan terlebih dahulu diselenggarakan "Konperensi Antar Indonesia" yaitu antara Republik Indonesia dan BFO pada tanggal 19 Juli 1949. Konperensi ini mempersiapkan prinsip-prinsip pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang diambil ialah RIS akan menggunakan "Sang Merah Putih" sebagai bendera dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan.

Konperensi Meja Bundar (KMB) berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 23 Nopember 1949 di Den Haag, Negeri Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin Moh. Hatta (RI); Sultan Hamid (BFO) dan Marseveen (Belanda) di bawah pengawasan UNCI (*United Nation Commission for Indonesia*). Hasil-hasilnya ialah penyerahan kedaulatan RIS akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 1949, penyerahan Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun; suatu "Uni" akan dibuat oleh RIS dan Neland, dan RIS turut bertanggung jawab terhadap hutang-hutang Belanda sejumlah 4 milyar gulden.

Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS oleh wakil-wakil 16 negara bagian. Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden RIS, sedangkan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Pelantikan dilakukan di Siti Hinggil pada tanggal 20 Desember 1949. Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku perdana menteri dilantik oleh presiden.

Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Negeri Belanda untuk menandatangani akte "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Negeri Belanda diadakan upacara penandatanganan naskah "penyerahan" kedaulatan. Di Amsterdam berlangsung penyerahan kedaulatan RIS dari Ratu Yuliana kepada Drs. Moh. Hatta. Di Jakarta penyerahan kekuasaan dari Wakil Belanda Lovink kepada Wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di Yogyakarta penyerahan kedaulatan dari RI kepada RIS, kemudian "triwarna" diturunkan dari atas istana gubernur jenderal dan "dwi warna" dinaikkan dan berkibar dengan megahnya di atas gedung yang sama sebagai Istana Negara RIS.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Mr. Asaat dilantik menjadi presiden RI, dan Gedung Agung tetap berfungsi sebagai istana kepresidenan. Dengan berakhirnya pemerintahan RIS, maka fungsi Gedung Agung sebagai istana kepresidenan pun menjadi berkurang. Pada tanggal 28 Desember 1949 Presiden Soekarno meninggalkan Istana Negara Yogyakarta untuk memenuhi tugas sebagai presiden RIS menduduki Istana Negara di Jakarta. Pada tanggal 29 Desember 1949 Doktor Lovink masih sempat ber-

audiensi di Istana Negara Jakarta untuk berpamitan sebelum kembali ke tanah airnya. Hal ini untuk membuktikan hubungan baik antara kedua negara yang merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan dan dibentuk negara kesatuan yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persetujuan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan tercapai tanggal 19 Mei 1950.

Sejak "Republik Yogya" dalam tahun 1950 dilebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Istana Kepresidenan Yogyakarta memperoleh nama lain yakni Gedung Agung. Wajarlah apabila gedung tersebut dinamakan gedung agung, karena pernah membuktikan keagungan cita-cita di masa lampau sebagai sumber semangat dan kiblat perjuangan bagi perjuangan nasional dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Gedung Agung telah memberikan pengabdianannya bagi tujuan-tujuan pemerintah selama periode VOC, periode Republik Bataaf, periode Interregumen Inggris, periode Hindia Belanda, periode Pendudukan Jepang, dan periode Republik Indonesia.⁷⁸)

Walaupun demikian tugas-tugasnya tidak terbatas sampai di sini. Sekarang Gedung Agung di samping berfungsi sebagai istana negara biasa seperti di Bogor, Cinapas, Bali, dan lain-lain juga mempunyai fungsi monumental sejarah yang tidak kurang pentingnya dibanding dengan monumen-monumen lainnya.

Sesudah Republik Yogya dilebur, gedung ini dikembalikan pada pengawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemeliharaan gedung tersebut diserahkan pada staf personal sebagai berikut.

1) Tamjih (1950 – 1954)

Pada masa ini Gedung Agung sebagai tempat untuk melayani pertemuan dan upacara yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 1954 pengawasan terhadap Gedung Agung dialihkan ke Kepatihan Danurejan dan pemeliharaannya diserahkan pada staf personal.

personal.

2) G. Rejo Utomo (1954 – 1960)

Selama periode ini tidak banyak dicatat kejadian/peristiwa penting, kecuali pada tanggal 26 Juni – 1 Juli 1957 konferensi *International Rubber Study Group* (IRSG) dilangsungkan dengan menggunakan Gedung Agung. Konperensi dibuka pukul 09.00 oleh Perdana Menteri Ir. Juanda dan dihadiri oleh para menteri; di antaranya ialah Menteri Pertanian Sajarwo, Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, Menteri Perindustrian Inkiriwang, Menteri Perdagangan Prof. Drs. Sumarjo, Menteri PP dan K. Prof. Dr. Priyono dan Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata. Konperensi berakhir pada tanggal 1 Juli 1957⁷⁹). Pada tanggal 24 Oktober 1957 diselenggarakan *ECAFE Conferense* yang juga menempati Gedung Agung. Pada pukul 09.00 Konperensi ECAFE dibuka resmi oleh Menteri Pelayaran Kolonel Mohammad Nazir. Pembukaan didahului dengan upacara penaikan bendera PBB di halaman depan Gedung Negara Yogyakarta, dipimpin oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Hamengku Buwono IX selaku ketua panitia penyelenggara Konperensi ECAFE. Konperensi berlangsung sampai tanggal 31 Oktober 1957. Negara-negara yang mengirimkan delegasinya ke konperensi ECAFE di Yogyakarta adalah Nederland, Burma, Kamboja, Taiwan, Amerika Serikat, India, Jerman Barat, Jepang, Perancis, Pakistan, Muangthai dan Vietnam. ECAFE (*Economic Comission For Asia and The Far East*) berkedudukan di Bangkok⁸⁰).

3) Alip Pajono (1960 – 1974)

Selama 14 tahun tanggung jawab Gedung Agung dipegang oleh Alip Parjono. Selama itu pula Gedung Agung hanya merupakan tempat pelayanan tamu-tamu asing.

4) Sumarso Hs (1974 – 1977)

Setelah Alip Parjono, tanggung jawab pengurusan dipegang oleh Sumarso Hs. Sejak tahun 1973 menteri sekretaris

negara mengeluarkan ketetapan tentang pengaturan Istana Negara sebagai Rumah Tangga Kepresidenan. Sejak tahun 1977 Rumah Tangga Kepresidenan dalam Gedung Agung diserahkan kepada Djoko Sutono.

5) Djoko Sutono (1977 – sekarang)

Dalam tahun 1973 menteri sekretaris negara Republik Indonesia mengeluarkan ketetapan tertanggal 8 Agustus 1973 No. Kep. 046/MSekneg/8/1973 tentang susunan organisasi dan tugas Rumah Tangga Negara Kepresidenan dalam Istana Negara. Dalam ketetapan ini tugas-tugas Rumah Tangga Kepresidenan adalah sebagai berikut.

- a) Menyelenggarakan pelayanan terhadap presiden/wakil presiden dan keluarganya serta tamu-tamu kepala negara/kepala pemerintahan asing yang menjadi tamu presiden/wakil presiden Republik Indonesia.
- b) Menyelenggarakan pengadaan dan pengaturan ruang/tempat halaman dan lain-lain yang diperlukan oleh presiden/wakil presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c) Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sehari-hari atas bangunan yang digunakan sebagai istana tempat kediaman presiden/wakil presiden beserta keluarganya serta bangunan yang diperuntukkan bagi kediaman tamu kepala negara/kepala pemerintahan asing.
- d) Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan perawatan atas barang-barang inventaris serta alat-alat rumah tangga, hiasan dinding, alat-alat penerangan dan lain-lain yang ada dalam lingkungan istana-istana kepresidenan.

Sesuai dengan ketetapan tersebut maka saat ini Gedung Agung di Yogyakarta membawahkan Unit Peralatan, Unit Perawatan yang mempunyai tugas (a) menyelenggarakan perencanaan, pengawasan, perawatan dan pemeliharaan pengadaan/peralatan dan dapur dalam lingkungan Istana Negara Yogyakarta dan (b) menyelenggarakan perencanaan, pengawasan, perawatan dan pemeliharaan gedung-gedung, taman,

dan instansi. Sedangkan komposisi staf Gedung Agung sebagai rumah tangga kepresidenan terdiri atas kepala Gedung Agung, kepala Seksi Umum dan Personalia, kepala Seksi Keuangan, kepala Seksi Perlengkapan, dan kepala Seksi Teknik⁸¹).

Tamu-tamu yang mengunjungi ataupun bermalam di Gedung Agung adalah tamu-tamu agung presiden/wakil presiden dari luar negeri dan juga petugas-petugas sipil dan militer dari pemerintahan pusat dan daerah yang sedang melaksanakan tugas, yang kadang-kadang diikuti pengiring atau pun keluarganya. Di samping itu Gedung Agung dipakai pula untuk konperensi-konperensi, upacara-upacara dan pelantikan oleh pemerintah pusat dan daerah maupun organisasi-organisasi yang bersifat nasional maupun internasional.

Pada tanggal 4 Maret 1979 Gedung Agung tercatat kembali sebagai tempat bersejarah, yakni dengan diadakannya perundingan empat mata antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Hussein Onn. Pembicaraan dimulai pukul 19.00 dan berakhir pukul 21.00. Pembicaraan dilanjutkan pada hari Senen tanggal 5 Maret 1979, pukul 10.00.

Sementara PM. Hussein Onn dan Presiden Soeharto berbicara "empat mata", pejabat-pejabat tinggi kedua pemerintahan mengadakan pembicaraan terpisah di ruang depan sebelah utara Gedung Agung. Tamu-tamu yang hadir antara lain Menhankam Jenderal M. Jusuf, Menteri Sekretaris Negara Sudharmono SH, Kapolri Letjen (Pol) Awaludin Jamin, sedangkan dari pihak Malaysia antara lain Menteri Dalam Negeri Tan Sri Gazali Sya-fei, Menteri Luar Negeri Rithaudin dan kepala Kepolisian Negara Tan Sri Mohd. Hanief Omar⁸²).

PM. Malaysia Datuk Hussein Onn dan Presiden Soeharto menyerukan kepada para pemimpin negara untuk menghindarkan diri dari tindakan yang akan berakibat meluasnya pertikaian di Indocina. Sebagai aksi gerak lanjut dalam kontak ini, diharapkan agar pertikaian dapat diselesaikan oleh negara-negara yang terlibat. Kedua pimpinan negara juga menyatakan rasa bimbangannya serta menganggap persoalan Indocina ini sudah sedemikian beratnya, karena situasi Indocina mempunyai im-

plikasi terhadap keamanan dan kestabilan di seluruh Asia Tenggara.

Presiden Soeharto dan PM. Hussein Onn juga menekankan hasil pernyataan Bangkok serta pernyataan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmaja yang mengimbau semua pihak yang tengah bersengketa untuk segera menghentikan pertikaian bersenjata. Selain membicarakan masalah-masalah bilateral juga dibicarakan masalah-masalah yang menyangkut pengungsi-pengungsi Vietnam, ekonomi internasional, dan masalah ASEAN termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keamanan kedua negara.

Demikianlah penegasan dua pemimpin negara, yang disampaikan oleh PM. Hussein Onn pada kesempatan temu muka dengan para wartawan dalam dan luar negeri di Gedung Agung Yogyakarta, Selasa siang. Perundingan empat mata antara dua pemimpin negara tersebut berlangsung di balik pintu tertutup.⁸³)

Pada tanggal 28 Juni 1980 Festival Film Asia ke-26 dibuka di Gedung Agung Yogyakarta oleh Wakil Presiden Adam Malik, didahului dengan kata sambutan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku gubernur kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah panggung raksasa telah disiapkan di teras depan Gedung Agung untuk pertunjukan malam kesenian memeriahkan pembukaan Festival Film Asia (FFA) yang untuk ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia.

Hingga tahun 1984 tidak banyak dicatat peristiwa penting. Selama ini Gedung Agung hanya sebagai tempat pelayanan tamu-tamu asing. Pada tanggal 10, 11 dan 12 Oktober Putri Maha Cakri Sirindhon dari Thailand berkunjung ke Indonesia. Selama kunjungannya ke Indonesia ia singgah di Yogyakarta dan menginap di gedung Agung. Selama menginap di Gedung Agung ia tidak pernah mengadakan pertemuan-pertemuan yang bersifat resmi baik dengan kepala-kepala pemerintahan daerah maupun pusat. Hari berikutnya, tanggal 24 – 25 Oktober Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan Raja Istri Pangeran Anak Saleha berkunjung ke Indonesia. Seperti halnya Putri

Sirindhon dari Thailand, Sultan Brunei Darussalam ini pun memerlukan singgah ke Yogyakarta dan menginap pula di Gedung Agung. Selama menginap di Gedung Agung sultan Brunei Darussalam juga tidak mengadakan acara-acara yang bersifat resmi⁸⁴).

CATATAN BAB III

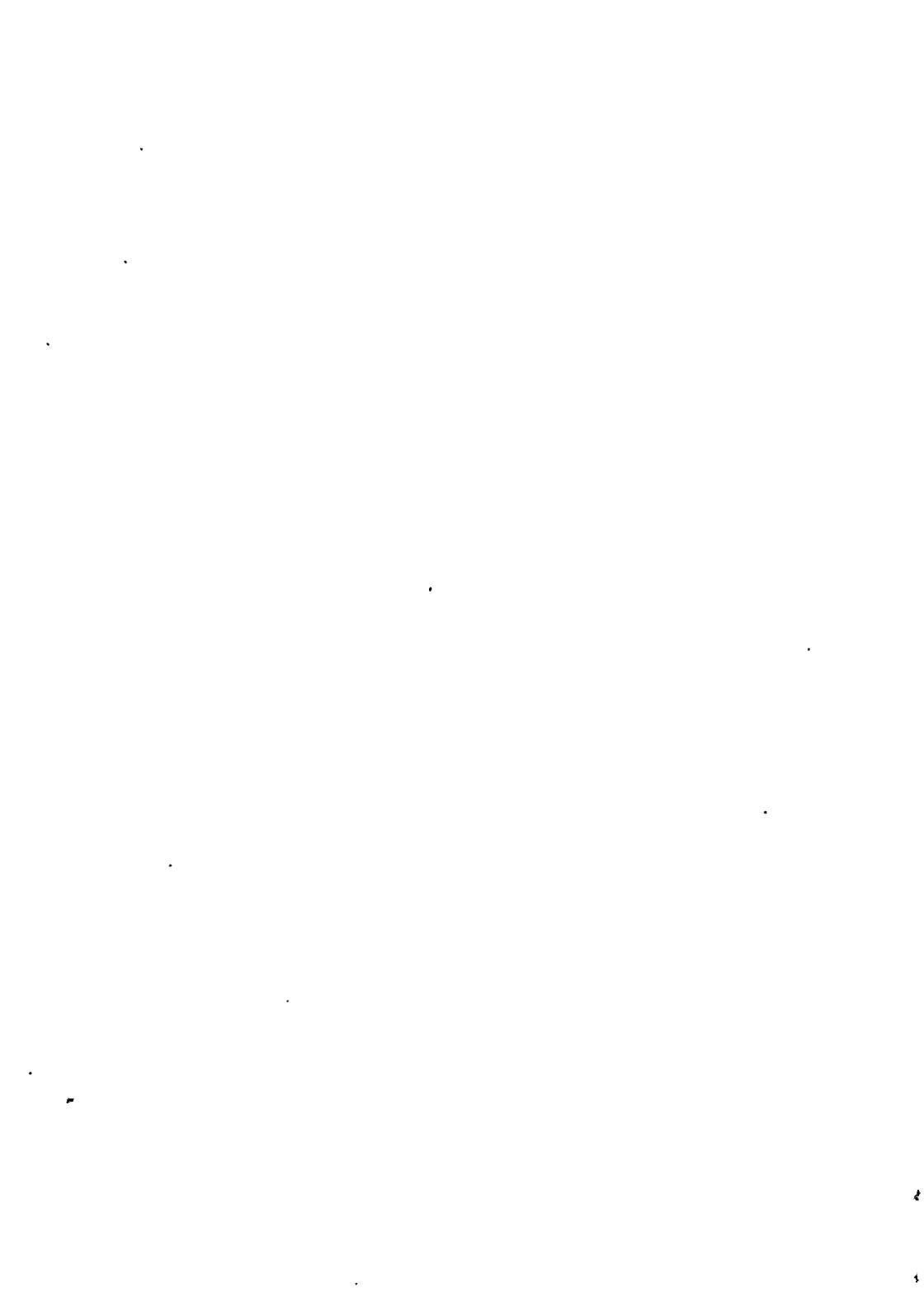
1. Soeroto, *Indonesia Di Tengah-tengah Dunia Baru Abad Ke Abad*, III, Penerbit Djambatan, Djakarta 1958, hal. 147.
2. Dr. Soekanto, *Sekitar Yogyakarta 1755 – 1825 (Perjanjian Gianti – Perang Diponegoro)*, Penerbit Mahabarata, Djakarta, 1952. hal. 63.
3. M. Alwi Dahlan, PHD (et al), *Istana Presiden Indonesia*, Penerbit Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1979, halaman 20.
4. Soeroto, *Op Cit*, hal. 157.
5. Dr. Soekanto, *Op Cit*, hal. 136.
6. *Ibid*, hal. 29.
7. *Ibid*, hal. 95.
8. PBR Corcy, *The Archive Of Yogyakarta Vol. I*, Documents Relating to Politics and Internal Court Affairs. Published for the British Academy by the Oxpord University Press, 1980, hal. 12.
9. G.K.B.R.A.A. Paku Alam VI, *Babad Pakualaman*, dilaksanakan oleh Lurah Jayeng utara, dialihhaksarakan dari huruf Jawa ke Latin oleh BRA. Jurumartani Dkk, Yogyakarta 1977, hal. 1.
10. *Ibid*, hal. 6.

11. Dr. Soekanto, *Op Cit*, hal. 136.
12. G.K.B.R.A.A. Paku Alam VI, *Op Cit*, hal. 9.
13. Dr. Soekanto, *Op Cit*, hal. 103, 104.
14. *Ibid*, hal. 100.
15. *Ibid*, hal. 104.
16. M. Alwi Dahlan, PHD (et al), *Op Cit*, hal. 23.
17. Dr. Soekanto, *Op Cit*, hal. 104, 109.
18. M. Alwi Dahlan, PHD (et al), *Loc Cit*.
19. Soeroto, *Op Cit*, hal. 166.
20. TB. Soemadidjojo, *Babad Diponegoro Ngayogyakarta*. Hadiningrat, 1953, hal. 6.
21. Dr. Soekanto, *Op Cit*, hal. 141.
22. R.L. Leirissa (ed), *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Jakarta, Proyek I.D.S.N. 1982/1983, hal. 127.
23. *Ibid*.
24. Drs. Soekanto, *Loc Cit*.
25. G.P. Rouffaer, Vorstenlanden, Overdruk mit Adat rechandandel XXXIV seri D, No. 81, 1931, hal. 33.
26. Sagimun MD, *Pahlawan Diponegoro Berjuang*, Tjabang Bag. Bahasa, Djakeb. Kem PP dan K Yogyakarta MCMLVII, 1956, hal. 124.
27. G.K.B.R.A.A. Pakualam VI, *Op Cit*, hal. 83, 85.
28. Sagimun MD, *Op Cit*, hal. 164, 165.
29. R.L. Leirissa (ed), *Op Cit*, hal. 132.
30. *Ibid*, hal. 135.
31. *Ibid*.
32. *Ibid*.
33. *Ibid*, hal. 136.
34. *Ibid*.

35. M. Alwi Dahlan, PHD (et al), *Op Cit*, hal. 25.
36. *Ibid*.
37. *Gegevens Over Yogyakarta*, 1925, hal. 34.
38. M. Alwi Dahlan, PHD (et al), *Op Cit*, hal. 27.
39. *Gegeven, Loc Cit*.
40. M. Alwi Dahlan, PHD (et al), *Op Cit*, hal. 28.
41. L.PH. Soedarisman Poerwokoesoemo, *Kadipaten Pakualaman*, Sebuah Naskah Persiapan/belum diterbitkan, hal. 308.
42. *Ibid*.
43. M. Alwi Dahlan, PHD (et al), *Op Cit*, hal. 29.
44. *Ibid*.
45. *Ibid*.
46. *Ibid*, hal. 23, 33.
47. Mandiri Gitoyuwono, "Acara Jendralan di Yogyakarta Sambutan Gubernur Starda", KR, 25 September 1984.
48. Sutrisno Kutojo (ed), *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Dep. P dan K. 1976/1977, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 213.
49. Mandiri Gitoyuwono, "Ada 4 Koo Di Yogya dan Solo Tata Pemerintahan Daerah Jaman Hindia Belanda" K.R. 27 Oktober 1984.
50. M. Alwi Dahlan, PHD (et al), *Op Cit*, hal. 36, 37.
51. Sutrisno Kutojo (ed), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Yogyakarta*, Dep. P dan K, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978. Balai Pustaka Jakarta, hal. 160, 163.
52. KPH. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984, hal. 7.

53. Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Terjemahan H.J. Koesoemanto dari judul asli *Social Changes in Yogyakarta*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1981, hal. 47.
54. KPH. Mr Soedarisman Poerwokoesoemo, *Op Cit*, hal. 19.
55. Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Indonesia VI*, hal. 16.
56. Sukatno, *Ki Bagus Hadikusumo*, hal. 79.
57. Sartono Kartodirdjo, *Op Cit*, hal. 29.
58. Suratmin, Dkk. *Sejarah Perlawanan*, hal. 220.
59. Tashadi, Dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) DIY*, hal. 74, 75.
60. *Ibid*, hal. 99.
61. Kementerian Penerangan RI. DIY, hal. 39.
62. Tashadi, Dkk. hal. 102.
63. Suratmin, Dkk. *Sejarah Perlawanan*, hal. 229.
64. Sartono Kartodirdjo, *Op Cit*, hal. 32.
65. M. Alwi Dahlan, *Istana Presiden Indonesia*, hal. 164.
66. Fatmawati, *Catatan Kecil Bersama Bung Karno I*, hal. 68.
67. Sartono Kartodirdjo, *Op Cit*, hal. 34.
68. Wonohito, *25 Tahun Merdeka*, hal. 25.
69. *Ibid*, hal. 36.
70. Fatmawati, *Op Cit*, hal. 66.
71. R.I. Suryakusuma, *Gedung Agung Sejarah dan Perkembangannya*, hal. —.
72. M. Alwi Dahlan, PHD., *Op Cit*, hal. 166.
73. Darmo Sugito, Dkk., *Yogyakarta 200 Tahun*, hal. 60, 61.
74. Sartono Kartodirdjo, *Op Cit*, hal. 54.
75. R.I. Suryokusuma, *Op Cit*, hal. 53.
76. M. Alwi Dahlan, *Op Cit*, hal. 168.
77. R.I. Suryakusuma, *Op Cit*, hal. 55.
78. *Ibid*, hal. 59.

79. Jamogoo Pagimi, Konperensi Karet dibuka, K.R. Senen 24 Juni 1957, hal. 1.
80. Hari ini jam 09.00 Konperensi ECAFE dibuka, K.R. 24 Oktober 1957, hal. 1.
81. R.I. Suryakusuma, *Op Cit*, hal. 65.
82. Empat Mata Pak Harto dengan Datuk Onn, K.R. 5 Maret 1979.
83. Persoalan Indo China Berat, Berita Buana, Rabu 7 Maret 1979.
84. Sultan Brunai hari ini di Yogya, K.R. 24 Oktober 1984, hal. 1.



BAB IV ARSITEKTUR

4.1 *Bangunan Asli*

Sebelum Perang Dunia II, bentuk bangunan pemukiman penduduk Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kota selatan sampai dengan batas pintu Gerbang Pangeran (batas utara Alun-alun Utara) memiliki bangunan dengan ciri-ciri arsitektur Jawa (termasuk dalam kelompok ini antara lain Kraton Sultan, Museum Sonobudoyo, rumah-rumah dalam lingkungan tembok benteng Kraton Yogyakarta ke selatan). Adapun bagian kota utara, bangunan-bangunannya memiliki ciri-ciri bangunan Eropa (rumah residen, bank, benteng Vrederburg), rumah-rumah bangsa Eropa di Loji Kecil dan Kotabaru) dan bangunan berciri arsitektur Cina di sekitar Pacinan (pertokoan di Jalan Pacinan dan Malioboro serta rumah-rumah orang Tionghoa di sekitarnya).

Sampai dengan perempat akhir abad XX ini bentuk bangunan di Kota Yogyakarta masih tetap seperti tersebut di atas, bahkan hingga sekarang sungguhpun wajah kota sudah berubah, namun ciri-ciri tersebut masih mudah dilihat. Baru pada tahun tujuh puluhan mulai terjadi perubahan dengan dibangunnya toko-toko, perhotelan, perkantoran dan tempat usaha lainnya yang menggunakan bangunan bertingkat, mengakibatkan perubahan wajah Kota Yogyakarta, khususnya di

sepanjang jalan protokol. Sebaliknya kota bagian belahan selatan, penduduk masih banyak mempertahankan wajah bangunan tradisional Jawa, sungguhpun dalam hal ini ciri-ciri seni bangunan Barat ada pula.

Apabila orang menelusuri jalan utama Kota Yogyakarta ke selatan (yang kini dikenal dengan Jalan Mangkubumi atau Jalan Malioboro), pada ujung jalan menjelang perempatan jalan ke Alun-alun Utara, orang akan mendapatkan bangunan bergaya Eropa kuno. Pada kiri (barat) jalan terdapat bangunan berpagar dinding tinggi dan tebal, inilah benteng Vrederburg yang semasa kekuasaan penjajah merupakan tempat kekuatan pemukul terhadap perlawanan kekuasaannya. Sedangkan tepat di arah hadapan bangunan benteng Vrederburg ini berdiri bangunan kokoh berwibawa di tengah halaman yang luas sebagai tempat tinggal penguasa tertinggi penjajah di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Kedua bangunan tersebut merupakan lambang kekuasaan penjajah yang masing-masing merupakan saksi bisu pada zamannya. Sebaliknya semasa kemerdekaan bangsa Indonesia, bangunan ini mencatat peristiwa-peristiwa bersejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Pada kesempatan ini dalam rangka penulisan "Istana-istana Presiden Republik Indonesia", perhatian dikhususkan pada bangunan bekas tempat tinggal residen Belanda, penguasa tertinggi di wilayah Kesultanan Yogyakarta, yang dalam alam kemerdekaan Indonesia dipergunakan sebagai istana presiden.

Tentang peranan dan sejarah bangunan Gedung Agung (lazim juga masyarakat Yogyakarta menyebut juga Gedung Negara, Presidenan dan sebelum Perang Dunia II disebut Loji atau Loji Taman, karena memiliki taman yang luas) dalam alam kemerdekaan Indonesia, dapat dibaca dalam bab-bab sebelumnya. Kini bangunan Gedung Agung ini merupakan salah satu dari enam istana presiden Republik Indonesia.

Encyclopaedie van Nederlands Indie menyebutkan bahwa bangunan Gedung Agung didirikan pada tahun 1760 bersamaan dengan berdirinya bangunan Kraton Sultan. Pada waktu itu juga

didirikan Benteng Rustenburg yang kemudian diberi nama Vrederburg, dan bangunan gereja untuk melengkapi kehidupan beragama para pemeluk agama Nasrani. Gereja ini sampai sekarang masih berfungsi. Tiga bangunan inilah yang merupakan bangunan pertama bergaya Eropa di kawasan Kesultanan Yogyakarta.

Gedung Agung yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 2\frac{1}{2}$ hektar bergaya arsitektur Barat "Doria" tidak murni. Ciri-ciri pokok Doria dapat dikenal dari batang-batang tiangnya yang besar (dua batang di depan dan dua batang di belakang) serta adanya hiasan *triglyphen* dan *metopen* mengelilingi seluruh bagian *kroonlijst* gedung induk. Sedang pada bagian atap tanpa menggunakan *tympanon* seperti lazimnya bangunan Doria. Atapnya sendiri berbentuk atap pelana yang membujur ke belakang sejumlah tiga deret (lihat foto no. 1). Pada bangunan Doria dari zaman Yunani Kuna beratapkan pelana dengan *metopen* (Jawa: tutup keong) dengan kemiringan ± 30 derajat. Apabila kita amati bentuk atap gedung ini mengingatkan kita pada atap *limasan* Jawa yang dijabarkan tiga lajur ke belakang. Sementara itu *kroonlijst* dengan *fries* yang berisi hiasan *triglyphen* dan *metopen* berhiaskan bunga rozet memberi kesan bangunan Gedung Agung tampak lebih tambun (foto no. 1 dan 63). Kesan ini lebih diperkuat adanya tambahan penutup atap serambi yang dipikul oleh deretan tiang-tiang besi bergaya *Korintia*. Penutup atap serambi ini pula yang menutupi kepala tiang Doria yang megah, sebagai lambang bangunan penguasa. Demikian pula kepala tiang *Korintia* penyangga atap serambi ini tak tampak dari luar gedung. Justru tertutupnya kepala-kepala tiang gaya Barat (Doria dan *Korintia*) oleh atap serambi itu mengingatkan kita pada bangunan rumah Jawa, menghilangkan kemegahan ciri bangunan Eropa.

Tiang-tiang *Korintia* berjumlah sepuluh batang berderet memikul atap serambi yang terbuat dari logam besi; tiang-tiang ini diimpor dari Eropa. Tiang *Korintia* yang berperhiasan mewah semacam itu lazim dipergunakan untuk menambah semaraknya hiasan suatu istana (foto no. 6). Kraton Sultan Yogyakarta juga menggunakan tiang-tiang gaya *Korintia* dari

besi cor yang diimpor dari Eropa untuk memperindah bangunan Sitinggil (Pagelaran) dan bagian bangunan-bangunan lainnya. Tiang gaya Korintia memberi kesan agung dan kaya hiasan, sementara itu bentuknya yang langsing memberikan kesan bangunan menjadi ringan, ramping dan mewah. Gaya Korintia memang tepat untuk menunjukkan kekayaan, kemewahan dan keagungan. Sebaliknya tiang gaya Doria yang besar dan kokoh dengan hiasan sederhana (yang juga terdapat di Gedung Agung) memberi kesan berwibawa, bahkan memberi kesan keras dan kaku, sesuai watak bangsa penciptanya, yaitu suku bangsa Doria yang hidup ± abad V sebelum Masehi di Yunani. Suku Doria berjiwa militeris, suka berperang dan berwatak keras. Memang tepat apabila tiang-tiang Doria digunakan menghias Gedung Agung sebagai tempat tinggal penguasa. Sayang keindahan batang-batang tiang Korintia dan Doria di Gedung Agung ini tidak tampak dari luar, karena tertutup oleh atap serambi.

Dua bangunan beratap datar dengan lambang lengkung yang besar mengapit dan menempel pada bangunan gedung induk, di sebelah kanan dan kiri. Bangunan ini dahulu dipergunakan untuk tempat pengawal istana. Rupa-rupanya kedua bangunan pengapit yang dicat putih ini tambahan pada waktu kemudian, namun tambahan bangunan tersebut justru menambah kesan wibawa pada keseluruhan bangunan Gedung Agung dan memperjelas bangunan hasil cipta seni rupa Barat.

Untuk memasuki ruang tengah Gedung Agung terdapat tujuh buah pintu berukuran besar dan tinggi yang terbuat dari kayu jati kualitas tinggi. Untuk memasuki Ruang Pertemuan orang dapat melalui tiga buah pintu utama yang lebar, lewat pintu ini udara segar masuk ke ruang utama dan sebaliknya juga lewat pintu ini pula orang dapat melihat keindahan taman yang luas di halaman depan gedung. Secara samar-samar tampak kesibukan lalu-lalang jalan di depan Gedung Agung (foto no. 4).

Seluruh lantai bangunan Gedung Agung berlantainya marmer putih dari Italia berukuran besar; dengan demikian

seluruh ruang memberi kesan tampak luas dan bersih, lantainya diberi alas babud merah dengan hiasan kecil-kecil ditambah prabotan hasil ukiran Jepara bermutu tinggi. Kecuali meja, kursi, dan warana (*schutsel*), tiang-tiang berbendera hasil karya pengukir Jepara yang sudah tersohor, ruang ini dihias pula dengan pahatan burung-burung garuda wahana dewa Wishnu hasil pahatan seniman-seniman Bali yang terkenal pula. Di samping Garuda Pancasila lambang negara Republik Indonesia yang terpancang pada dinding sebelah belakang, pada ambang pintu masuk ke dalam Ruang Pertemuan ini para tamu disambut sebuah patung kayu garuda kendaraan Dewa Wishnu berukuran besar ± 2 meter. Patung kayu dengan warna-warni ini menambah semaraknya Ruang Pertemuan. Dua ekor patung garuda yang sama berukuran lebih kecil, menempel pada dinding mengapit patung garuda berukuran besar tersebut. Dengan adanya patung-patung garuda dan pada dinding sisi belakang terdapat lambang negara Garuda Pancasila, maka Ruang Pertemuan atau Ruang Tengah ini dinamai juga Ruang Garuda.

Pada kanan kiri dinding Ruang Pertemuan dihias lukisan para pahlawan Indonesia dalam ukuran besar. Empat cermin berukuran sangat besar tergantung pula pada dinding tersebut. Cermin berukuran besar lazim dipergunakan untuk menghiasi istana dan rumah bangsawan atau pembesar, baik di Eropa maupun di Indonesia. Pemakaian cermin sebagai hiasan dimaksudkan untuk memberi kesan ruangan tampak lebih luas dan berwibawa. Cermin semacam ini dapat pula untuk menggantikan lukisan-lukisan dinding berukuran besar atau babud berlukis ukuran besar yang disebut *gobellin*. *Gobellin* berukuran besar sudah dipergunakan oleh Louis XIV untuk menghias istana-istananya. Sedang lukisan-lukisan berukuran besar sudah dipergunakan untuk memberi kesan luas suatu ruangan oleh para kaisar dan bangsawan Romawi. Peninggalan dari reruntuhan rumah-rumah yang terbenam oleh lahar Gunung Vesuvius yang meletus dan bekas Kota Pompei dan Herculenum menunjukkan adanya usaha untuk mendapatkan kesan ruangan menjadi tampak lebih luas dengan melukiskan pemandangan atau gambar gedung-gedung pada dindingnya.

Cermin-cermin besar sebanyak empat buah di Ruang Pertemuan ini serta lampu-lampu gantung dari kristal yang menghias ruang ini adalah peninggalan dari masa kekuasaan Belanda dahulu. Semua prabotan dalam ruang ini adalah buatan baru, yaitu hasil karya seniman-seniman Jepara dan Bali.

Di samping cermin dan babut berukuran besar, lampu gantung dari kristal yang berukuran besar juga sebagai lambang kebesaran dan kekayaan. Cermin berukuran besar berbingkai ukir warna keemasan, babut warna merah berukuran besar dan lampu kristal berukuran besar, serta prabotan berukiran adalah merupakan lambang status tinggi yang berlaku baik di Eropa/dunia yang juga berlaku di Indonesia. Akan keagungan Ruang Pertemuan Gedung Agung yang juga merupakan ruang utama gedung ini periksa foto-foto nomor: 9, 18, 24, 31 dan sebagainya.

Tepat di belakang serambi depan Gedung Agung, sedikit ke arah depan Ruang Pertemuan arah kiri dan kanan terdapat dua buah ruangan panjang membujur dari utara ke selatan. Ruang tersebut yang terletak di arah utara dinamakan Ruang Diponegoro, sedang yang di sebelah selatan dinamakan Ruang Soedirman. Kedua ruang ini berprabot sama, sehingga seolah-olah seperti ruang kembar, hanya dibedakan pada Ruang Soedirman terdapat patung dada Panglima Besar Soedirman berpakaian seragam militer, yang diletakkan pada ujung-ujung ruangan arah selatan tepat di ambang pintu. Dua buah cermin besar berukir pahatan Jepara mengapit pintu ini yang diberi bergorden penuh menutupi pintu berwarna merah anggur. Pada langit-langit tergantung sebuah lampu gantung kristal yang besar. Tigabelas kursi berukir dari Jepara disusun melingkar dengan dua meja di tengah, sedang pada dinding-dindingnya digantungkan lukisan-lukisan karya seniman Indonesia. Demikian pula susunan Ruang Diponegoro. Kedua ruang ini dipergunakan sebagai ruang pertemuan dengan jumlah orang yang tidak banyak, kadang dipergunakan juga untuk menunggu para tamu yang akan datang. Ruang ini lantai seluruhnya tertutup oleh karpet berwarna merah.

4.1.1 Ruang Makan dan Ruang Istana VIP

Tepat pada arah belakang Ruang Pertemuan (Ruang Garuda) dengan melewati dua pintu yang besar, masuklah kita ke Ruang Makan VIP. Ruang ini dipergunakan untuk menjamu makan tamu agung dalam jumlah besar dengan resmi, karenanya ada tambahan kata VIP untuk membedakan dengan ruang-ruang makan yang lebih kecil yang terdapat pada kamar-kamar tidur pada sayap kanan dan kiri Gedung Agung. Ruang makan ini terasa hangat dengan adanya deretan kursi yang melingkari meja makan dan di atasnya menggantung dua lampu gantung kandelar kristal, sedang lantainya tertutup oleh permadani Isfahan merah secara penuh. Ruang Makan ini terasa agung dengan adanya pintu-pintu besar yang mengelilinginya dengan gordena penuh yang menjuntai ke bawah berwarna merah anggur; lebih semarak lagi dengan adanya dua batang tiang Doria dan pilaster yang mengapitnya. Batang tiang ditambah hiasan tumpul bagian bawah dan atas, serta lis-lis berukir memberi suasana Indonesia. Kemegahan ruang ini akan tampak apabila semua lampu dinyalakan, apalagi bila di atas meja makan terhidang makanan yang lezat cita-rasanya di atas perlengkapan makan yang mewah teratur rapi. Pada dinding tergantung lukisan-lukisan batik dan wanita berukuran besar serta lampu-lampu dinding yang artistik. Langit-langit tanpa hiasan hanya berupa garis-garis tepi, demikian pula pada friesnya. Ruang ini tampak lebih megah apabila kita duduk menghadap ke arah Ruang Istirahat VIP yang terletak pada arah barat. Untuk meresapi keindahan Ruang Makan ini periksa foto no. 17.

4.1.2 Ruang Istirahat VIP

Pada arah belakang Ruang makan VIP tanpa dinding pembatas terdapat Ruang Istirahat VIP, sehingga dari ruang ini dengan bebas tamu dapat mencapainya dan tanpa terhalang pandangan. Kursi yang tersedia memang tidak sebanyak kursi makan yang terdapat di Ruang Makan VIP, jadi yang menggukannya tentunya hanya tamu-tamu VIP saja, atau beberapa tamu yang memerlukannya saja sedang tamu-tamu yang lain hanya berdiri sambil berbincang-bincang. Prabotan berupa

kursi-kursi beludru besar dan tiga meja kayu bundar berukir terletak di tengah, di atas karpet Isfahan berbunga-bunga merah menutupi seluruh permukaan lantai. Pada dinding sisi belakang tergantung gambar relief Ramayana hasil pahatan kayu seniman Jepara. Adegan relief berukuran besar ini menggambarkan Rahwana yang sedang melarikan Dewi Sita berperang melawan Jatayu. Hiasan relief Ramayana ini adalah satu-satunya hiasan pada dinding sisi belakang Ruang VIP ini. Pada sudut-sudut ruangan diisi hiasan patung garuda pahatan seniman Bali berukuran besar. Pada *architraf* yang menghubungkan satu pilar dengan pilar lainnya, diisi dengan relief krawangan (*ajour relief*) bermotif sulur tumbuh-tumbuhan yang bermula pada burung garuda. Pahatan kayu ini hasil karya seniman Jepara. Sebuah lampu gantung kandelar yang besar tergantung di tengah langit-langit. Burung garuda merupakan hiasan yang menonjol di ruang-ruang istana ini. (foto no. 19).

Di samping Ruang Istirahat VIP ini, pada setiap kamar tidur terdapat juga ruang-ruang istirahat berukuran kecil menghadap ke halaman samping kanan dan kiri bangunan induk. Ruang-ruang istirahat ini dipergunakan untuk melepas lelah para tamu sambil menikmati keindahan serta kesegaran udara kebun. Adapun Ruang Istirahat VIP ini hanya dipergunakan saat usai acara makan bersama, atau apabila sangat diperlukan dalam menjamu makan tamu negara dalam jumlah yang besar, kekurangan tempat. Jadi ruang ini berfungsi ganda, sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai perluasan Ruang Makan VIP.

Mengamati hiasan kedua ruang ini (Ruang Makan dan Ruang Istirahat VIP) sebenarnya sangat sederhana. Kemegahan hiasan adalah tambahan masa-masa kemudian yaitu sesudah tahun tujuhpuluhan, dengan adanya tambahan berupa hiasan ukir-ukiran sebagai hiasan tempel (pasif). Hiasan ini terasa sebagai tambahan untuk memberi suasana Indonesia (khususnya Jawa), misalnya tambahan hiasan tumpal berukir warna keemasan pada *kanalirus* tiang gaya Doria, baik pada kaki dan leher batang tiang (foto no. 18 dan 30); hiasan pasif pada bagian bawah *architraf* berupa relief krawangan hasil pahatan Jepara dan patung-patung lepas berupa patung garuda ukir

Bali (foto no. 21 dan 22). Memang terasa agak dipaksakan, namun seharusnya demikian, untuk mengajak tamu asing ke-suasanaan Jawa Tengah. Lebih-lebih tamu asing dari Eropa untuk diajak menikmati keindahan Candi Prambanan atau Borobudur yang memiliki ragam hias klasik, secara perlahan-lahan perlu dikenal dengan suasana dan ragam-ragam hias setempat lebih dahulu. Pemakaian warna-warna yang mencolok memberikan suasana meriah, sesuai ruang makan dan istirahat.

Dari tambahan ragam hias tersebut dapat diduga bahwa sebelum tahun 1970 kedua ruang ini sangat sederhana, tanpa banyak hiasan. Hal ini dikuatkan peninggalan beberapa foto yang masih dapat dirunut kembali, bahkan Ruang Pertemuan yang merupakan ruang utama dari Gedung Agung ini berprabotan dan berhiasan sangat sederhana.

4.1.3 Ruang Kesenian

Melewati pintu besar ke arah belakang Ruang Istirahat VIP sampailah ke Ruang Kesenian. Ruang seluas ± 500 meter persegi ini pada waktu kekuasaan Pemerintah Belanda dahulu dipergunakan untuk beranda belakang sebagai tempat untuk berangin-angin. Seluruh ruangan terbuka dengan pagar keliling yang rendah, sedang lantainya tinggi. Pada arah sisi belakang terdapat podium (panggung), yang sejak semula dipergunakan untuk pentas kesenian (foto no. 44).

Pada masa revolusi dan waktu dipergunakan sebagai istana Presiden Republik Indonesia yang pertama, ruang ini dipergunakan untuk kursus politik atau ceramah-ceramah politik. Setiap hari Minggu antara tahun-tahun 1946 – 1947 massa rakyat berbondong-bondong ke Gedung Agung untuk mendengarkan ceramah para pemimpin Republik di Ruang Kesenian ini. Banyak pendengar ceramah hanya duduk di lantai, karena tidak kebagian tempat duduk. Kini ruang ini dijadikan Ruang Kesenian. Banyak perubahan dan perbaikan pada ruang ini. Ruang yang terbuka telah diberi dinding kaca keliling, lantai dan podium diperluas, langit-langit serta batang-batang tiang yang menyangga atap dipercantik dengan hiasan tempel (*passif*)

motif *mangkoro* berwarna merah dan kuning keemasan. Kaki tiang (*umpak*, Jawa) dari batu andesiet, batang tiang berbentuk pilar, bagian bawah dilapis kuningan dan di atasnya dipahat daun palmet warna keemasan, sedang kepala tiang dihias *mirong* warna merah dengan ukiran simbar warna keemasan. Batang-batang tiang kayu ini berderet-deret sepanjang sisi ruangan memikul belandar (*architraaf*) bersusun enam, yang pada setiap sudutnya berukir tumpal (foto no. 45, 46). Pada langit-langit tergantung lampu-lampu gantung kandelar dan lampu kecil sebagai penerangan di malam hari. Lantai marmer putih memberi kesan ruangan tampak lebih luas dari sebenarnya. *Rana* (*schutsel*) berukir dari Jepara dengan gambar tokoh-tokoh wayang, kita dapatkan beberapa buah menghias ruang ini. Pada sisi belakang Ruang Kesenian ini dihias dengan dua buah payung agung bersusun lima, yang mengingatkan pada bangunan meru di Bali (foto no. 46).

Hiasan yang mewah terpusat pada podium tempat pentas dan bagian depannya. Lantai di depan podium ditutup permadani Isfahan berbunga-bunga merah. Fries yang menghias podium diwujudkan pahatan sulur-sulur gelung warna keemasan di atas latar belakang merah darah. Fries berukir ini menghubungkan satu tiang dengan tiang yang lain, memanjang sepanjang podium (foto no. 44).

Gambar presiden dan wakil presiden berdampingan diletakkan pada pigura berkaki di depan podium, sedang pada dinding belakang podium tergantung dua buah *gunungan wayang* Jawa, sehingga dari kejauhan tampak seperti mengapit gambar presiden dan wakil presiden. Langit-langit podium dihias mewah, yang di atas podium sebelah kiri terdapat dua perangkat gamelan slendro dan pelog, sedang pada sisi kanan podium terdapat piano vleugel yang besar dan perangkat sound system dan peralatan lampu-lampu tersimpan di ruang belakangnya. Tempat rias yang luas membujur sepanjang podium di belakang ruang kesenian ini. (periksa foto-foto no. 45 - 47).

Kecuali sebagai tempat mempertunjukkan kesenian ruang ini kadang-kadang dipergunakan untuk pertemuan dengan pe-

serta yang besar. Kadang kala dipergunakan untuk mempertunjukkan hasil-hasil karya seni seniman kepada para tamu.

4.1.4 Kamar Tidur Presiden, Kamar Tidur Tamu dan Kelengkapannya

Apabila kita akan bertamu dengan bermalam ke rumah salah seorang sahabat, teman atau kerabat, sejenak di rumah sudah terbayang apakah tidak merepotkan tuan rumah, bagaimana kira-kira kamar dan tempat tidur serta kelengkapannya, perlengkapan bermalam yang harus dibawa apa saja, dan sebagainya memenuhi benak kita. Demikian halnya dalam mengunjungi gedung kepresidenan ini, setelah mengagumi ruang-ruang garuda, kesenian dan lain-lainnya seperti tersebut di atas, hati kita segera akan ingin tahu bagaimana ruang tidur tempat presiden beserta keluarganya beristirahat, bagaimana ruang tidur untuk tamu-tamu negara, bagaimana perlengkapannya, bagaimana perabotannya dan sebagainya.

Untuk mencapai ruang-ruang tempat tidur, kita melalui koridor (gang, Jawa = *longkangan*): Koridor yang memanjang pada sisi selatan sepanjang Ruang Garuda digelari permadani merah, di sepanjang koridor inilah berderet ke belakang Ruang Tempat Tidur Presiden, ibu negara dan kamar-kamar keluarga presiden. Adapun koridor yang memanjang pada sisi utara sepanjang Ruang Garuda diberi alas permadani hijau, sepanjang koridor ini berderet-deret kamar-kamar tamu negara dengan keluarganya.

Kamar Tidur Presiden sungguhpun bersuasanakan kamar tidur Eropa, karena prabotan dan hiasannya menggunakan hasil karya seni Jawa, terasa alam Kejawaen sangat dominan. Tempat tidur berukir Jepara yang besar masih ditambah penutup di atasnya semacam penutup singgasana dengan kelambu yang halus, serta batang-batang tiangnya berukir halus untuk mendukung kelambu. (periksa foto no. 25, 26, 28). Alas tempat tidur (seprei) ditutup kain batik tulis bermotif parang dan lar yang besar-besar. Demikian halnya bagian atas dan langit-langit tempat motif parang dan lar, jadi seolah-olah tempat tidur ini terletak dalam kamar kelambu. Pada sisi depannya terdapat

sepasang tempat abu rokok sepasang hasil karya seniman Kasongan, Yogyakarta. Tempat abu rokok ini dari tanah liat yang diberi bentuk binatang mitos lembu naga. Pada kanan kiri tempat tidur terdapat meja berukir sepasang tempat meletakkan lampu berbentuk jambangan keramik. Tidak jauh dari tempat tidur terdapat satu stel kursi beludru empuk bergaya Eropa.

Masih dalam bagian Ruang Tempat Tidur Presiden ini terdapat Ruang Kamar Mandi yang luas, seluruh dinding bercat warna putih berukir warna keemasan dengan cermin yang besar pula. Perlengkapan kamar mandi ini seluruhnya bergaya Eropa. Permadani lantai yang menutup seluruh permukaan berwarna krem berbunga-bunga lembut (foto no. 30 dan 31).

Ruang Tempat Tidur Presiden dihubungkan dengan pintu menuju ke Kamar Tidur Ibu Negara, yang berprabotan dan kelengkapan tidak jauh berbeda dengan Kamar Tidur Presiden, hanya cermin untuk berhias (toilet) yang besar berukir Jepara membedakannya. Melewati ambang pintu yang lain dari kamar tidur presiden dan sempailah ke Kamar Kerja Presiden. Kamar ini berprabotan ukir kayu Jepara juga. Meja tulis besar berukir dengan kursi bersandaran tinggi tempat alat tulis dan beberapa buah buku, almari buku berukir dengan beberapa benda-benda hiasan di atasnya (foto no. 29).

Lukisan-lukisan dinding karya para pelukis Indonesia menghiasi seluruh dinding kamar tidur dan kamar kerja ini. Penyusunan yang serasi dan tidak berdesakan, baik prabotan maupun lukisan serta hiasan pada kamar-kamar ini menjadikan suasana menjadi tenang dan teduh. Masih ada satu kamar lagi sebagai bagian kelengkapan kamar presiden ini ialah kamar makan pribadi presiden. Satu meja makan persegi yang besar dikelilingi enam buah kursi makan berukir segera menarik perhatian pengunjung. Masih ada beberapa pasang kursi terdapat di beberapa bagian ruang ini untuk beristirahat usai makan. Dinding bercat putih, dengan digantungi beberapa lukisan dinding berwarna cerah. Tidak banyak lukisan dan barang-barang hiasan terdapat dalam ruang makan ini, babut atau permadani berwarna coklat muda dengan hiasan bunga-bunga warna coklat

tua serta gordijn yang berukuran sangat besar pada pintu-pintu dan jendela-jendela sudah cukup meramaikan kelengkapan Ruang Makan ini. Pada sisi belakang ruang ini terdapat dapur kecil dan tempat menyiapkan makanan sebelum disajikan di meja makan (foto no. 32, 33, 34).

4.1.5 Tempat Tidur Tamu VIP beserta Keluarga

Di seberang koridor yang memanjang pada sisi utara yang digelari permadani berwarna hijau terdapat deretan kamar-kamar yang diperuntukkan para tamu VIP beserta keluarganya. Sebenarnya apabila diamati dengan sungguh-sungguh tidaklah jauh berbeda antara kamar-kamar untuk presiden dengan kamar utama untuk tamu negara VIP ini. Bedanya yang mencolok ialah pada hiasan kamar dan prabotannya yang bergaya Eropa, bukan gaya Eropa Modern, tetapi terasa gaya klasiknya. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada ragam hias pada gordijn yang tergantung pada pintu-pintu, juga pada tempat tidur tamu VIP seperti halnya tempat tidur presiden dengan kelambu yang tergantung pada pilar-pilar. Bedanya pilar-pilar ini tidak berukir tetapi hanya dengan *canalirus* sebagai hiasan, sedang langit-langit dan penghias *lambrisering* menggunakan batik berubai. Penutup alas kasur kain berenda putih halus, demikian halnya kelambunya juga berwarna putih halus. Alas kasur berenda putih berhiaskan *damask*, motif ragam hias Eropa ini menjadikan tempat tidur terasa bersuasanakan Eropa. Bunga mata hari merupakan hiasan utama dari kain seprei ini. Sementara itu permadani yang menutup seluruh permukaan lantai berwarna coklat muda, berbunga-bunga coklat tua. Hanya tempat tidurnya pada bagian kepala masih terdapat hiasan tepi berukir Jepara, memang karya dari Jepara ditutupi alas kasur motif Eropa. Juga kamar kerja berisikan prabotan bergaya Eropa tanpa ukiran, misalnya meja kerja, almari buku dan almari hiasan, buffet dan sebagainya. Isi almari hiasan berupa patung-patung, jambangan dan gelas-gelas gaya Eropa. Hiasan dinding antara lain lukisan wanita Bali (*naturalis*), serta lukisan-lukisan abstrak. Bahkan lampu membaca di atas meja tulis pun berben-tuk modern (foto no. 38, 39).

Ruang tidur tamu VIP untuk keluarga, seluruhnya menggunakan prabotan dan hiasan Eropa modern. Cermin hias (toilet), meja, kursi seluruhnya gaya Eropa (buatan Indonesia) periksa foto no. 40, juga televisi kita dapatkan di kamar tidur ini. Lampu tidur, tempat handuk, gantungan baju semuanya barang-barang baru yang banyak kita dapatkan dijual di toko-toko meubel terkemuka di kota. Rasa-rasanya Ruang Tempat Tidur para tamu VIP ini sengaja dibuat bersuasanakan dan bergaya internasional, untuk tidak mengajak para tamu tidak asing sehingga dapat tidur nyenyak seperti tidur di rumah dan negara sendiri.

Dari kamar-kamar tidur untuk Presiden dan keluarga, masih ada satu bagian ruang yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Ruang Serambi Kamar Tidur Presiden. Serambi ini terletak menghadap taman arah selatan Gedung Agung. Perlu mendapat perhatian khusus, karena sungguhpun tidak terlalu besar tetapi mungil dengan hiasan yang indah dan serasi, *little but cosey*. Sangat tepat untuk beristirahat atau duduk menyendiri, melepaskan ketegangan sesudah Presiden bekerja keras. Dapat pula ruang ini untuk menerima tamu pribadi presiden. Ruang serambi ini bersuasanakan arsitektur Jawa. Pintu-pintu dan langit-langit berukir halus. Lampu-lampu antik dan tanaman hias menambah keindahan dan kesejukan ruangan. Pintu-pintu ukir, tiang dan "ander pengeret" berukir halus menyempurnakan keindahan serambi. Apabila duduk di serambi ini dan menengok ke luar (ke halaman) atau melihat ke dalam (kamar), semuanya tampak serasi. Andaikan di serambi ini digantungkan sangkar burung perkutut atau tekukur; lengkaplah sudah keindahan menurut selera orang Jawa. (foto no. 41, 42 a, 43).

4.2 *Bangunan Tambahan/Perbaikan Gedung Wisma Negara*

Sesudah tahun 1970-an, kehidupan kenegaraan Indonesia semakin baik; kehidupan masyarakat pun makin kecukupan. Permusuhan dan pertentangan baik di luar maupun dalam negeri tidak ada lagi, laju ekonomi dan pembangunan berjalan lancar. Dengan demikian kedatangan wisatawan ke Indonesia makin ramai. Tidak luput Gedung Agung juga makin banyak dising-

gahi atau kedatangan tamu-tamu negara. Sejak saat itu (tahun 1970-an) banyak kepala-kepala negara atau pemuka-pemuka negara asing datang pergi ke Indonesia, banyak di antaranya singgah dan berkunjung ke Kota Yogyakarta yang berlokasi tidak jauh dari tempat-tempat wisata dan bersejarah. Untuk menampung jumlah tamu negara yang makin banyak khususnya kepala-kepala negara asing dengan pengiringnya yang besar, kamar-kamar Gedung Negara tidak lagi dapat menampung, untuk keperluan itu dibangun Wisma Negara di halaman sisi utara. Gedung berlantai dua dengan atap joglo tidak tampak mencolok berdampingan dengan gedung induk. Menginjak serambi depan pengunjung disambut dua patung dwarapala berukuran $\pm 1,5$ meter, dengan melewati pintu berukir penuh, sekali lagi tamu disambut oleh patung garuda kayu ukiran Bali, sampailah di lobi Wisma Negara. (foto no. 65).

Memasuki Wisma ini rasanya seperti masuk ke sebuah hotel diisi seperangkat tempat tidur berukir besar dan cermin-hias berukir pula, di samping kelengkapan kamar tidur lainnya. Memang ruang-ruang kamar tidur di sini serba berukir mewah dan lengkap dengan peralatannya. Permadani cokelat muda menutupi seluruh permukaan lantai (foto no. 65, 66, 67, 68).

Yang menarik adalah Ruang Makan dan Ruang Santai. Ruang Makan disusun dengan kelompok-kelompok satu meja dikelilingi empat kursi, mengingatkan orang pada rumah makan. Semua prabotan terbuat dari bahan rotan, mulai kursi, kap lampu, pemisah ruang, hiasan dinding, semuanya rotan (periksa foto no. 58, 59, 60). Susunan ruang yang sangat serasi dan hiasan-hiasan yang khas "penjalin" (rotan) menunjukkan bahwa ruang makan ini ditangani oleh ahli dekorasi ruang dalam. Kursi dan hiasan-hiasan tetap memberikan suasana klasik tetapi meriah. Di sini juga terdapat ruang kesenian kecil dengan seperangkat gamelan Jawa, dengan demikian bila dikehendaki dapatlah dipertunjukkan kesenian Jawa seperti uyon-uyon atau tari fragmen sederhana, para penonton duduk pada kursi yang diatur mengelilingi arena pertunjukan. Pada langit-langit terdapat lampu antik buatan desa Batur, Klaten, yang megah. (periksa foto no. 74 dan 75). Ruang Kesenian dan Ruang Santai

serta lobi semua prabot dari kayu berukir Jepara. Demikian halnya lampu, lukisan, cermin bahkan tangga ke tingkat atas semuanya berhiaskan ukiran. Singkatnya bagi penggemar barang-barang prabotan berukir dapat melihat di sini sepuas-puasnya. Sebenarnya masih ada satu lagi Wisma Negara yang terletak di sebelah Timur Gedung Wisma ini ± 100 meter saja dari Jalan Raya Malioboro. Gedung ini dahulu sebuah kantor pemerintah yang dirombak dijadikan Wisma Negara berlantai satu. Susunan interiornya tidak jauh berbeda dengan Wisma tersebut di atas. Yang menarik justru prabotan kebanyakan menggunakan bahan dari rotan. Singkatnya bagi penggemar prabotan rotan di sinilah dapat melihat sepuas-puasnya. Bahkan apabila ingin memiliki atau meniru *design* ruangan beserta kelengkapannya orang dapat banyak mendapat ilham di sini. (periksa foto no. 57, 58, 59 dan 73).

4.3 Lain-lain

4.3.1 Halaman Gedung Agung

Para tamu yang mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta ini setelah melewati gerbang halaman sampailah ke halaman yang luas dengan rerumputan hijau yang terpelihara rapi, serta pepohonan besar yang rindang mengelilingi gedung. Halaman seluas ± 2 Ha dengan bangunan Gedung Agung di tengah-tengahnya bergaya Doria sebagai lambang kekuasaan Eropa pada abad XVIII, memberi kesan agak ganjil di tengah alam Kejawen seperti Yogyakarta. Apalagi kira-kira lima ratus meter dari sini terdapat *aloon-aloon* Kraton Sultan Hamengku Buwono dengan bangunan kraton bergaya arsitektur Jawa. Bagi penikmat seni akan merasakan adanya kontras yang mencolok. Marilah kita bandingkan keindahan seni Jawa (Indonesia) yang diwakili oleh komplek kraton dengan *aloon-aloonnya*, dengan gedung bekas penguasa Kolonial (Gedung Agung) halamannya yang diatur menurut tata rasa keindahan Barat.

Kraton Yogyakarta dengan arsitektur Jawa yang merupakan puncak keindahan seni bangunan rumah Jawa, menghadap ke utara ke arah Gunung Merapi dan langsung menghadap ke *aloon-aloon* yang luas dengan dibelah dua oleh jalan. Di kanan-

kiri jalan ini ditanam dua batang pohon beringin yang dianggap keramat (Kiai-Nyi Dewadaru). Dahulu kala apabila ada "kawula" yang merasa mendapat perlakuan tidak wajar melakukan *pepe*. Dengan tindakan demikian penguasa sudah mengerti maksud si pemohon keadilan. Singkatnya bangunan istana (kraton), beserta bagian-bagiannya, jenis pohon yang ditanam, arah hadap kraton dan sebagainya, masing-masing mempunyai arti simbolik tertentu menurut konsep orang Jawa. Tidak jauh arah selatan kraton sultan terdapat kompleks bangunan istana air (*water kasteel*) Taman Sari. Taman Sari yang dahulu didirikan sezaman dengan kraton dan Gedung Agung mempunyai halaman luas yang dikelola sangat indah, dengan berbagai ragam tanaman hias dan bunga-bunga. Kraton Sultan dan Taman Sari (milik Sultan juga), merupakan bangunan dengan pertamanan yang dikelola secara tradisional Jawa, dengan arti simbolik yang luas. Sedangkan Gedung Agung yang mewakili arsitektur Barat dengan cita rasa keindahan yang berbeda, dengan keindahan duniawi yang megah.

Kiai Juru Taman mengelola petamanan kraton dengan cita rasa Kejawen, sedangkan insinyur petamanan mengelola halaman Gedung Agung dengan inspirasi taman-taman istana raja-raja di Eropa. Dengan demikian apabila kita renungkan dalam wilayah yang berdekatan dahulu terdapat tiga kompleks (kraton, Taman Sari dan Gedung Agung) yang memiliki halaman/kebun yang terpelihara baik, yang masing-masing memiliki keindahan mempesona dengan cita rasa yang berbeda.

Halaman Gedung Agung sungguhpun ditangani secara cita rasa keindahan Barat, namun keselarasan dengan lingkungan alam Kejawen tidak terasa terlalu kontras. Hal ini tersamun dengan ditematkannya patung-patung batu dan Candi Cupu Watu di halaman depan dan samping dari gedung induk. Juga tidak adanya *tympanon* berelief pada bangunan induk sebagai ciri utama bangunan gaya Doria, menambah keserasian dengan bangunan-bangunan berarsitektur Jawa di sekelilingnya. Apalagi di Jalan Secodiningratan (Jalan Senopati sekarang), di sebelah selatan Benteng Vrederburg sejak dahulu ditempatkan pa-

tung-patung batu dari candi-candi Jawa-Hindu yang diketemukan dari sekitar Yogyakarta.

Halaman Gedung Agung yang luas dengan rerumputan yang hijau ditata dengan dasar pengetahuan seni Barat dan diperkaya dengan benda-benda karya seni Jawa-Hindu. Sesudah memasuki pintu gerbang para tamu disambut sebuah patung Dwarapala (semula patung dwarapala di halaman ini berjumlah dua buah, pada tahun 1950 sebuah dibawa ke Jakarta, kini menghias Istana Merdeka). Patung Dwarapala adalah patung raksasa penjaga pintu candi. Kata dwarapala sendiri berarti penjaga pintu, biasanya sepasang patung ini mengapit pintu masuk candi, bertugas menjaga bangunan suci untuk melindungi dari roh jahat. Patung Dwarapala penjaga istana Negara ini adalah salah satu dari empat patung dwarapala yang berasal dari Candi Budha Kalasan, 14 km dari Kota Yogyakarta. Dua buah dwarapala kini berada di Museum Negeri Sonobudoyo dan sebuah lagi di Istana Negara Jakarta. Patung Dwarapala ini tidak tampak seram, menakutkan. Hanya dua buah gigi taring, mata melotot dan ular sebagai upawita serta gada dan pisau yang dibawanya memberi gambaran yang menakutkan. Bahkan makin lama menatap patung ini tampak makin ramah, karena mulutnya yang terbuka sedikit itu bukannya menyeringai menunjukkan sedang geram atau marah, tetapi justru tampak seperti tersenyum manis. Patung Dwarapala setinggi dua meter ini adalah satu di antara 56 buah patung yang kini menghias halaman Gedung Agung. (foto no. 2). Banyak patung yang lain terletak di sekitar kolam yang terletak di selatan arah belakang gedung induk. Patung-patung tersebut dahulu dikumpulkan di sini oleh para residen, kecuali sebagai hiasan taman juga dimaksudkan untuk menyelamatkan peninggalan kuna Jawa-Hindu. Dahulu patung-patung ini berasal dari berbagai tempat di wilayah Yogyakarta. Kebiasaan mengumpulkan patung-patung dari berbagai tempat ke suatu lokasi seperti tempat tinggal residen, bupati atau administratur pabrik, lazim dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Baru kemudian dengan adanya Dinas Purbakala (*Oudheidkundige Dienst*) usaha pengumpulan dan penyelamatan peninggalan kuna ini dilakukan oleh lembaga tersebut.

Tepat pada arah belakang patung Dwarapala di seberang ujung halaman berumput hijau ini berdiri Candi Cupu Watu, masyarakat lazim menyebutnya candi tugu atau lilin, karena bentuknya yang langsing setinggi $3\frac{1}{2}$ meter. (foto no. 3). Dahulu candi ini berasal dari Desa Cupu Watu, daerah Prambanan, \pm 17 km dari Yogyakarta. Candi Cupu Watu atau Candi Tugu Lilin menurut istilah rakyat, memang memiliki ciri-ciri unik. Bentuknya yang langsing dengan *soubbasemen*-nya mengingatkan pada lingga sebuah lambang agama Ciwa, sedangkan bila diamati bagian puncaknya mengingatkan pada dagob atau stupa – lambang agama Budha. Ada yang menduga menilik ragam hias dan bentuknya bangunan ini adalah sebuah dagob yang berfungsi sebagai penyimpan relik atau abu jenazah. Namun yang menarik adalah dalam abad IX – X semasa dengan dibangunnya Candi Prambanan terjadi adanya *syncretisme* agama Ciwa-Budha yang mulai nampak samar-samar, nanti pada masa Jawa Timur muncul dengan jelas, antara lain tampak pada Candi Singosari dekat Malang. Inilah keunikan kerukunan beragama di Indonesia.

Apabila rakyat kebanyakan kemudian menyebutnya sebagai Tugu Lilin adalah tidak mengherankan karena bentuknya yang tinggi langsung dengan kemuncaknya berbentuk seperti nyala api, apabila diamati mengingatkan pada sebuah lilin yang sedang menyala. Konon ada yang menyebutkan kemuncak berbentuk nyala api itu adalah tambahan baru. Penempatan Candi Cupu Watu tepat di depan serambi Gedung Agung menambah keanggunan pandangan bangunan keseluruhan, baik dilihat dari kejauhan (dari sisi luar), maupun dilihat dari dalam gedung ke arah halaman (periksa foto no. 3 dan 4).

Berjalan sekeliling halaman Gedung Agung yang seluas 2,5 ha melewati jalan protokol atau jalan setapak ini rasanya seperti mengadakan *tour* menikmati seni Jawa-Hindu dan seni Eropa sekaligus. Di halaman yang ditata bergaya Eropa dengan pepohonan dan tanaman hias yang tidak lazim ditanam orang Jawa (tanpa makna simbolik menurut pemahaman Jawa, dengan patung-patung hasil seni Jawa-Hindu di sepanjang jalanan sekeliling taman, merupakan pandangan perpaduan keindahan

Indonesia-Eropa yang sangat harmonis.

Patung-patung sejumlah tidak kurang dari 56 buah hasil karya seniman jaman keemasan Jawa-Hindu, diletakkan dengan serasi tersebar di halaman ini. Disayangkan bahwa beberapa di antaranya sudah rusak yang justru ditambah semen, sehingga tampak lebih menyedihkan karena penambalan tanpa mengerti arti dan maksudnya, sehingga dapat disebut sebagai pemalsuan. Kapan dan oleh siapa penambalan tersebut tidak lagi diketahui.

Halaman Gedung Agung dengan rerumputan hijau yang luas dan pepohonan yang rimbun, ditingkah dengan kicauan suara burung-burung, memberi suasana kedamaian penghuninya. Kiranya tepatlah apabila gedung ini oleh masyarakat Yogyakarta dalam abad XVIII – XIX disebut dalam naskah-naskah juga dengan nama "Gedong Loji Taman", karena memang memiliki taman yang indah dan luas. (foto no. 61 dan 63).

Di sekeliling bangunan induk adalah taman dengan berbagai pepohonan sebagai tanaman perindangan. Pada sisi selatan gedung terdapat kolam yang luas, di sekelilingnya dihias dengan patung-patung yang dikumpulkan dari candi-candi yang banyak terdapat di sekitar kota Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah tahun 1970-an seiring dengan laju ekonomi negara Indonesia yang makin membaik, ditambah dengan makin luasnya hubungan dengan negara-negara di dunia, maka makin banyaklah tamu negara yang berkunjung dan tinggal ke Gedung Agung ini. Untuk menampung jumlah tamu yang makin banyak beserta para pengiringnya, maka kemudian berturut-turut dibangunlah bangunan-bangunan baru, khususnya terletak di samping utara bangunan induk. Tambahan utama yang besar berupa bangunan untuk menampung para tamu sebagai pengiring tamu agung, yaitu bangunan yang dinamakan "Wisma Negara" (periksa foto no. 65). Bangunan ini berlantai dua, beratapkan bangunan tradisional Jawa "joglo", tetapi kaki dan tubuh bangunan sama sekali berbeda, terlebih susunan interior beserta prabotan di dalamnya, tidak ada yang memberi kesan rumah Jawa. Sungguhpun demikian usaha untuk memberi kesan klasik,

baik ruang maupun prabotan sangat terasa. Hal ini tampak pada foto no. 67, 71, 72, 73 dan 74. Di samping Wisma Negara masih ada tambahan bangunan-bangunan lain sebagai bangunan pelengkap, misalnya: bangunan untuk berangin-angin (foto no. 63), bangunan untuk para pegawai istana dan sebagainya. Kesemua bangunan tambahan baru ini menyesuaikan bentuknya dengan bangunan sekelilingnya, yaitu bangunan dengan arsitektur Jawa. Memang dengan tambahan sejumlah bangunan baru itu menjadikan Gedung Agung makin terasa sempit dan mengurangi arti sebutan sebagai "Loji Taman" dengan halamannya yang luas, rimbun dengan aneka pepohonan dan tanaman. Namun kebutuhan praktis yang mendesak untuk menampung tamu yang makin besar jumlahnya, terpaksa sebagian nilai *aestetis* dikorbankan.

Untuk menyemarakkan dan menerangi halaman Gedung Agung ini pada beberapa tempat ditaruh/dipasang lampu-lampu taman berbagai bentuk yang indah. Disayangkan bahwa bentuk lampu-lampu taman ini menggunakan bentuk lampu modern (impor). Alangkah indahnya bila lampu-lampu ini menggunakan lampu taman klasik, disesuaikan dengan arsitektur sekeliling, lampu-lampu klasik kini dapat diproduksi oleh pengecoran logam di Batur, Ceper, Klaten.

4.3.2 *Prabotan (Meubelair) Gedung Agung*

Runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda, disusul kekuasaan Balatentara Jepang dan diakhiri Revolusi oleh Bangsa Indonesia, berturut-turut menjadikan Gedung Agung tidak terawat dan banyak prabotan tidak lagi diketemukan. Konon alat pecahbelah pun tidak lagi bersisa, sehingga waktu presiden pertama RI akan menjamu tamu negara Jendral Romullo dari Filipina terpaksa meminjam peralatan ke Toko (*Restaurant*) OEN. Demikian halnya meubelair Gedung Agung ini menurut pengamatan tidak ada lagi yang berasal dari masa gedung ini dipergunakan sebagai rumah gubernur atau residen Hindia Belanda dahulu, kecuali cermin-cermin besar dan lampu-lampu kristal di Ruang Garuda atau Ruang Tengah. Semua kelengkapan dan peralatan Gedung Agung adalah buatan atau ciptaan baru karya

seniman Indonesia di akhir abad XX ini, di samping alat-alat makan minum impor dari luar negeri.

Beruntung di Negeri Belanda masih tersimpan beberapa foto yang menggambarkan keadaan ruang-ruang beserta kelengkapannya pada saat gedung ini dipergunakan para residen atau gubernur yang berkuasa di *Nederland Indie*. Tahun berapa foto-foto itu dibuat tidak jelas. Foto-foto semacam itu yang mengingatkan kejayaan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda dapat kita lihat dan tersimpan dengan baik di Gedung KITLV (pada saat foto-foto itu diambil tahun 1973 Gedung KITLV terletak di Station Plein 10, Leiden). (Periksa foto-foto nomor slide). Dari gambar-gambar tampak prabotan tidaklah terlalu mewah, apabila dibandingkan dengan istana-istana raja di Eropa, bahkan dengan prabotan Gedung Rijswijk di Batavia saja tidaklah memadai. Namun apabila kita meletakkan pandangan dalam abad-abad XIX atau awal XX di wilayah *Nederlands Indie*, kiranya prabotan seperti pada foto-foto itu cukup megah juga. Sekurangnya sesuai dengan kemegahan dan kebesaran pada zamannya.

Karena tidak ada yang tersisa prabotan dari masa dahulu, maka tidaklah perlu dipanjanglebarkan tentang isi, gaya dan ragam hias prabotan Gedung Agung. Ukiran kayu gaya Jepara. (Jawa Tengah) dan Bali, serta hasil karya seni dan kerajinan Indonesia menempati tempat yang dominan di Gedung Agung Yogyakarta. Keindahan, kemegahan hasil cipta seniman Indonesia tidaklah kalah dibanding karya seniman luar negeri.

BAB V PENUTUP

Sejarah dan fungsi bangunan Gedung Agung Yogyakarta sebagai salah satu dari istana-istana presiden RI cukup panjang dan penuh keunikan baik pada masa pemerintahan VOC, Republik Bataaf, Interregnum Inggris, India Belanda, pendudukan Balatentara Jepang, maupun Republik Indonesia. Patutlah apabila barang ini dipelihara dan dilindungi sesuai *Monumentier Ordonantie* 1931.

Sampai saat ini Gedung Agung tetap berfungsi aktif sebagai tempat beristirahat para pejabat negara maupun tamu-tamu agung Negara Republik Indonesia yang mengunjungi Yogyakarta sebagai salah satu tempat tujuan wisata yang kaya akan peninggalan kebudayaan Jawa khususnya. Bahkan adanya dua Kraton Sultan dan Pakualam yang masih memegang teguh kebudayaan Jawa serta diikuti masyarakat pendukungnya, sangat menarik diikuti/disimak, baik dari sudut berbagai disiplin ilmu, maupun sekedar dipahami saja. Kecuali peninggalan kepurbakalaan yang banyak didapatkan tersebar di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta (candi, makam keramat, bekas istana, dan sebagainya), juga berbagai cabang seni tradisional dan adat-istiadat Jawa yang dianggap bermutu tinggi. Juga adanya banyak perguruan tinggi dan menengah yang mengaji berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga menjadi pusat belajar yang me-

narik perhatian anak muda dari berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya Yogyakarta dari sudut pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembentukan kader bangsa, kiranya Gedung Agung masih akan lama memegang peranan dalam melayani tamu dari pelosok penjuru dunia. Dari daftar nama-nama tamu negara/kepala-kepala negara, politikus/negarawan, tokoh-tokoh militer maupun sipil dan segudang peristiwa sejak abad XVIII hingga permulaan abad XX ini yang melibatkan Gedung Agung, dapatlah dirawat kembali peranan Gedung Agung Yogyakarta.

Tidak salah kiranya bila ada yang menyebutkan bahwa Gedung Agung atau Presidenan di Yogyakarta adalah istana bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pemeliharaan dan pelestarian istana presiden di Yogyakarta menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Dahlan, Ph.D (et al), M, *Istana Presiden Indonesia*, Penerbit Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1979.
- Baron, Henk en Velu, A.G., *Leerboek der meubel stylen*, Denter: N.V. Maatsch. E.E. Kluwer, 1948.
- Carcy, PBR., *The Archive of Yogyakarta, Vol. I*, Document Relating to Politics and Internal Court Affairs, Published for the British Academy by the Oxford University Press, 1980.
- Catenius, van der Meijdur J.M.J. *One huis in Indie*, Semarang : Masunan Stasink, 1908.
- Darmosugito, dkk., *Kota Yogyakarta 200 tahun, 1756 – 1956*, Yogyakarta, 1956.
- Fatmawati, *Catatan Kecil Bersama Bung Karno*, Jilid I, Delta Rohita, Jakarta, 1978.
- Gegevens over Yogyakarta* (Laporan rutin Residen Yogyakarta), 1925.
- Gitoyuwono, Mandiri, *Acara Jendralan di Yogya Sambut Gubernur Tjarda*, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 25 September, 1984.
- Gitoyuwono, Mandiri, *Ada 4 Koo di Yogya dan Solo Tata Pemerintahan Daerah Jaman Hindia Belanda*, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 27 Oktober 1984.

- Heenes, J.E., *Nederlands Indie*, Amsterdam, N.V. Uitg Maatsch, Elsevier, 1929.
- Hein Buitengeweg, *De Laatste Temp Doeloe*, Servire, Den Haag, 1964.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, tahun 1953.
- Kementerian Penerangan, *Dimulai dengan senyum Het Begon Met een Glinlach it started With a smile*, Jakarta.
- Kepala Istana Presiden Yogyakarta, *Sejarah dan Perkembangan Istana Kepresidenan Gedung Agung*, Yogyakarta, 1981. (brosur belum diterbitkan).
- Leirissa, RZ, (ed), *Sejarah Nasional Indonesia*, N, Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta, Proyek IDSN, 1982/1983.
- Margono, *Ikhtisar Sejarah Pergerakan Nasional, 1908 – 1945*, Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Mohammad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar dan S. Maimoen, *Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982.
- Mohammad Roem, *Penculikan, Proklamasi dan Penilaian Sejarah*, Hudaya Ramadhain, Jakarta, 1970.
- N.N., *Istana Presiden Gedung Agung*, Yogyakarta (Brosur, belum diterbitkan).
- Osman Raliby, *Dokumen Sejarah Indonesia 17 Agustus 1945 – 31 Desember 1946*, Jakarta, 1952.
- Paku Alam VI, G.K.B.R.A.A., *Babad Pakualaman*, dilaksanakan oleh Lurah Jayengutara, dialihbahasakan oleh BRA Juru-martani dkk, Yogyakarta, 1977.
- Ricklefts, M.C., *Yogyakarta under Sultan Mangkubumi, 1749 – 1792. A History of the Division of Java*, London, Oxford University Press, 1974.
- Ronffaer, G.P., *Vorstenlanden*, Overdruk uit Adatrecktbundel XXXIV, Serie D, 81, 1931.

- Sagimun, MD, *Pahlawan Diponegoro Berjuang*, Cabang Bagian Bahasa Jawatan Kebudayaan, Kementerian PP dan K, Yogyakarta, MCML VII, 1956.
- Samawi, 25 tahun Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 1970.
- Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan Hj. Koesoemanto dari Judul asli *Social Changes in Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981.
- Soedarisman Poerwokusumo, K.PH., MR., *Kadipaten Pakualaman*, sebuah naskah persiapan (belum diterbitkan).
- Soedarisman Poerwokusumo, K.PH, MR., *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.
- Soekanto, DR, *Sekitar Yogyakarta 1755 — 1825*, Penerbit Malobarata, Jakarta Amsterdam, 1952.
- Soemodidjojo, TB., *Babad Diponegoro*, Ngayogyakarta Hadiningrat, 1953.
- Soeroto, *Indonesia di Tengah-tengah Dunia dari Abad ke Abad*, III, Jambatan, Jakarta, 1958.
- Sukardjo Hatmosuprobo, *Kota Yogyakarta dan Benteng Vrederburg*, dalam Rencana Pelestarian dan Pengembangan Benteng Vrederburg, Buku II, Universitas Gajah Mada, diktat, belum diterbitkan.
- Suhatno, *Ki Bagus Hadikusumo*, Pusat Penerbitan Sejarah dan Budaya, Dep P dan K Jakarta, 1982/1983.
- Suratmin, dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Dep P dan K, Jakarta, 1982/1983.
- Sutrisno Kutoyo (ed), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, P.N. Balai Pustaka Jakarta, 1978.
- Sutrisno Kutoyo (ed), *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

Tashadi, dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949)*,
DIY, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Dep P dan K,
1977/1978.

Vrien J.J., *Stijlen in de Bouwkunst*, Amsterdam NV Uitg My
Kosmos, 1948.

Wall, van de V.j. *Indissche Loodhuizenen Lus Gischedenis*,
Batavia: Kon. Bat. Genvan Kemstene Wetensclaffen,
1932.

Dokumen/Surat Kabar :

Surat Residen Anthonie Hendrik Smissaert, Nomor 6,
tanggal 2 Mei 1823.

Surat Residen Yogyakarta, Nomor 6, tanggal 28 Maret
1823.

Kedaulatan Rakyat, 24 Juni 1957, *jam 9.00 pagi ini Kon-*
ferensi Karet dibuka.

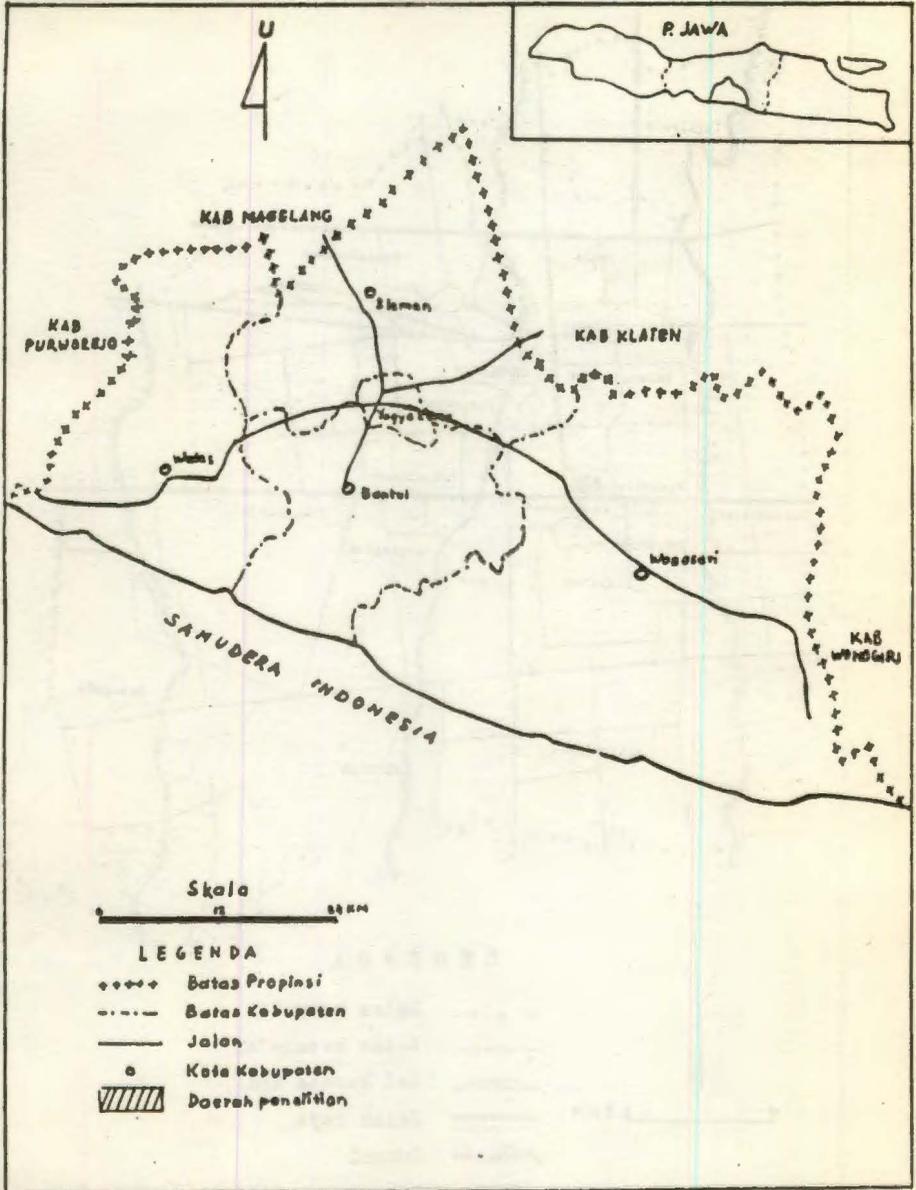
Kedaulatan Rakyat, 24 Oktober 1957, *Hari ini jam 09.00*
Konferensi ECAFE dibuka.

Kedaulatan Rakyat, 5 Maret 1979, *Empat Mata Pak Harto*
dengan Datuk Onn.

Kedaulatan Rakyat, 24 Oktober 1984, *Sultan Brunei Hari*
Ini di Yogyakarta.

Berita Buana, 7 Maret 1979, *Persoalan Indocina Barat.*

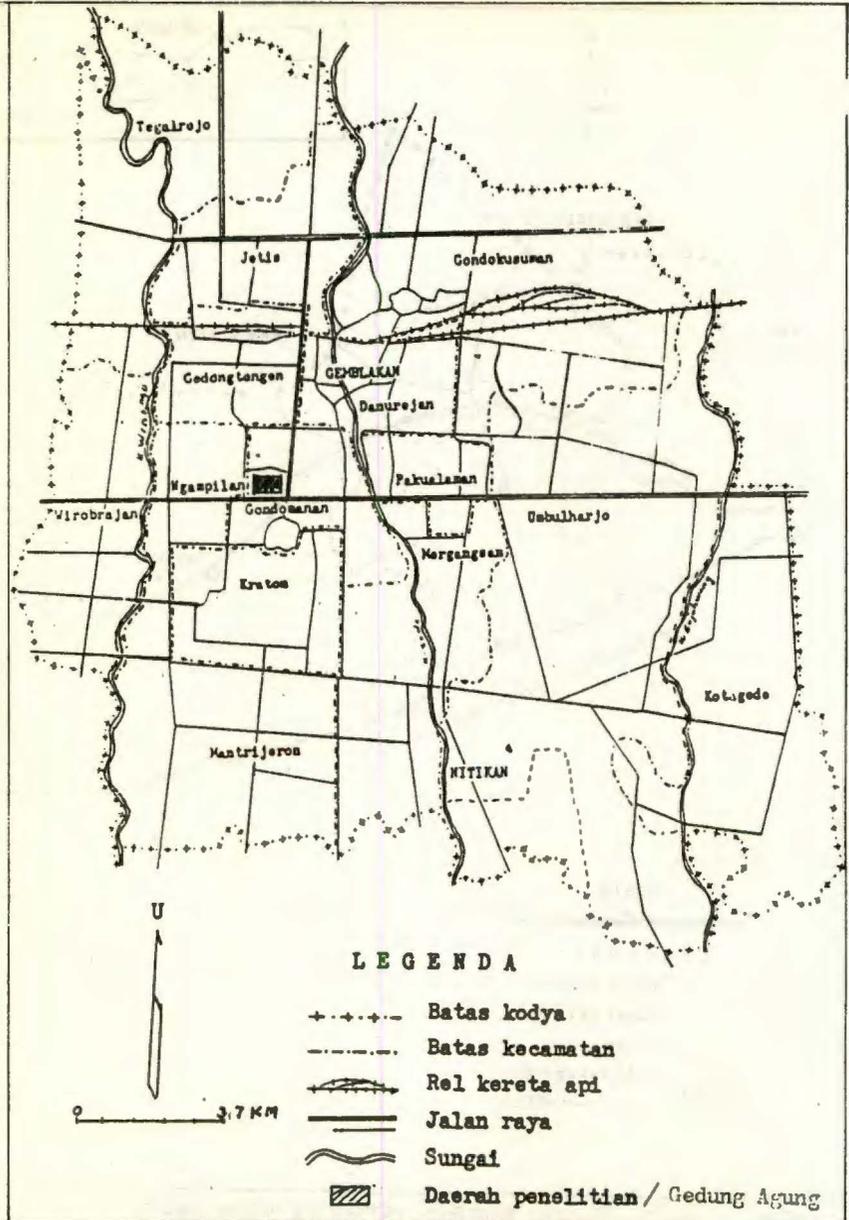
Lampiran 1



PETA 1: PETA LOKASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sumber: Peta Administrasi DIY. 14.1974 skala 1:100.000

Lampiran 2



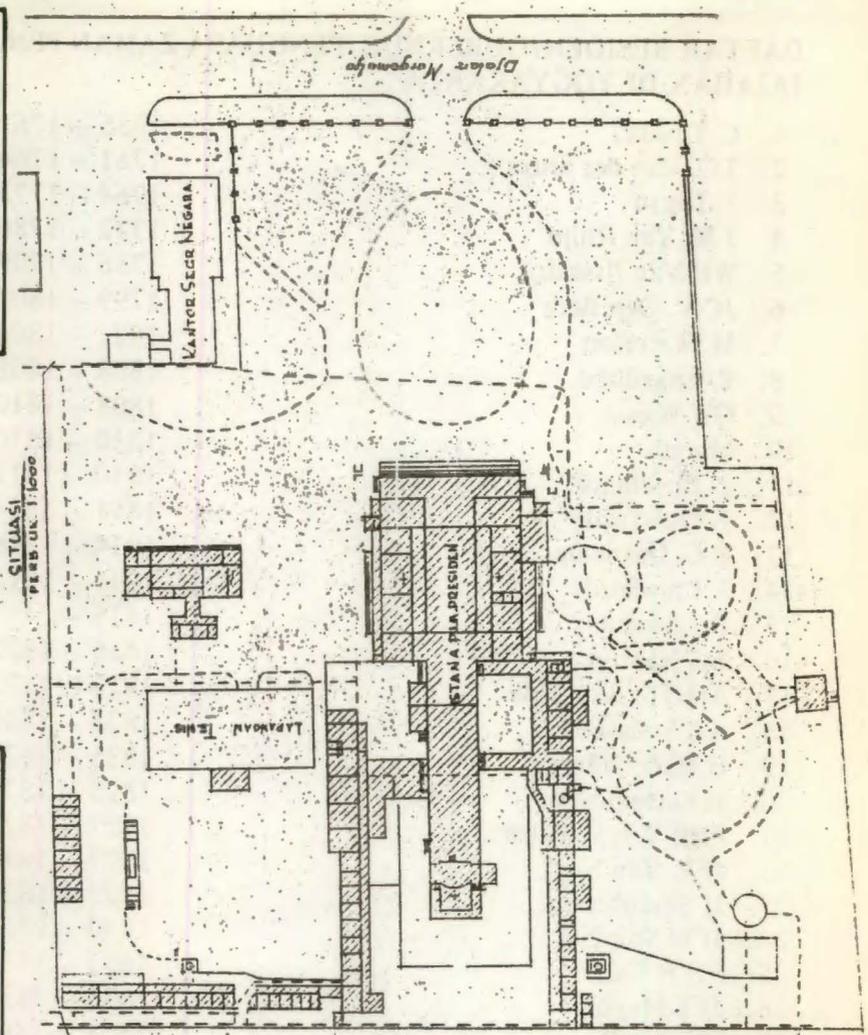
Peta 1 PETA LOKASI KOTAMADYA YOGYAKARTA, 1983

Sumber : Peta administrasi D.I Yogyakarta skala 1 : 100.000

Lampiran 3

DAERAH ISTIMEWA JAWABARATA
MAKINTE
DJALAN MADJONGULO

ISTANA P.J.A. PRESIDEN
DAFTAR HURUF N°A 3250.



A₀
1

Lampiran 4**DAFTAR RESIDEN/GUBERNUR/PENGUASA ZAMAN PEN-
JAJAHAN DI YOGYAKARTA**

1. C. Donkel	1755 – 1761
2. J.C. Van der Sluys	1761 – 1764
3. J. Lapro	1764 – 1773
4. J.M. Van Rhijn	1773 – 1786
5. WH Van Ijsseldijk	1786 – 1799
6. JC V. Den Berg	1799 – 1803
7. M. Waterloo	1803 – 1808
8. P. Engelhard	1808 – 1808
9. GW Wiese	1808 – 1810
10. Morees	1810 – 1810
11. P. Engelhard	1810 – 1811
12. J. Crawford	1811 – 1814
13. R.C. Garnham	1814 – 1816
14. J. Crawford	1816 – 1816
15. Dr. Ainstie	1816 –
16. HG Nahuys	1816 – 1822
17. AM Th. B de Salis	1822 – 1823
18. AH Smissaert	1823 – 1825
19. H.Mac. Gillvary	1825 – 1825
20. JI Sevenhoven	1825 – 1827
21. PHB V.L.V. Pabst	1827 – 1827
22. JFW Van Nes	1827 – 1830
23. JI Sevenhoven	1830 – 1830
24. JFW Van Nes	1830 – 1831
25. FG B Valck	1831 – 1838
26. JFT Mayor	1838 – 1838
27. FK Valck	1838 – 1841
28. A.A. Buyskes	1841 – 1845
29. R. de F. Busquet	1845 – 1848
30. A.H.B de Kock	1848 – 1851
31. JJ Hasselman	1851 – 1855
32. WCEB de Geer	1855 – 1856
33. DA Buyn	1856 – 1857

34. GPB V. Kempen	1857 – 1863
35. FN Nieuwenhuyzen	1863 – 1863
36. NAT Arriens	1863 – 1864
37. AJPHD Bosch	1864 – 1873
38. ABJ Wattendorff	1873 – 1878
39. B. Van Baak	1878 – 1889
40. Mullemeister	1889 – 1891
41. MC Kett. Olivier	1891 – 1896
42. JA. Ament	1896 – 1902
43. JR Couperus	1902 – 1908
44. P. Hugo V. Andel	1908 – 1911
45. JH. Lieftrinck	1911 – 1913
46. BL V. Bijleveld	1913 – 1915
47. C. Canne	1915 – 1919
48. PW Jonquiere	1919 – 1924
49. LF Dingemans	1924 – 1926
50. JE Jasper	1926 – 1927

Gubernur :

1. J. E. Jasper	1927 – 1929
2. PRWV Gess. Berschuir	1929 – 1932
3. H. De Cook	1932 – 1935
4. J. Bijleveld	1935 – 1940
5. L. Adam	1940 – 1942

Zaman Jepang :

Gedung – Koochi Zimmukyoku

– Keiki Yamanouchi di Gedung Gubernuran/Tyookan Kantai.

Lampiran 5

DAFTAR GUBERNUR-GUBERNUR JENDERAL PADA MASA HINDIA BELANDA, MASA INGGERIS, MASA BELANDA, DAN MASA JEPANG.

1. Pieter Both	1610 – 1614
2. Gerrit Reijnst	1614 – 1615
3. Laurens Reaal	1615 – 1619
4. Jan Pieterzoon Coen	1619 – 1623
5. Pieter Carpentier	1623 – 1627
6. Jan Pieterzoon Coen	1627 – 1629
7. Jacques Specx	1629 – 1632
8. Hendrik Brouwer	1632 – 1636
9. Atanonio Van Diemen	1636 – 1645
10. Cornelis Van Der Lijn	1645 – 1650
11. Carel Reiniersz	1650 – 1653
12. Joan Maetsuycker	1653 – 1678
13. Rijcklof Van Geens	1678 – 1681
14. Cornelis Janszoon Speelman	1681 – 1684
15. Johannes Camphuijs	1684 – 1691
16. Willem Van Outhoorn	1691 – 1704
17. Joan Van Hoorn	1704 – 1709
18. Abraham Van Riebeeck	1709 – 1713
19. Christoffel Van Swol	1713 – 1718
20. Hendrik de Haan	1725 – 1729
22. Diederik Durven	1729 – 1732
23. Dirk Van Cloon	1732 – 1735
24. Abraham Patras	1735 – 1737
25. Adrian Valckenier	1737 – 1741
26. Johannes Thedens	1741 – 1743
27. Gustaaf Willem Baron Van Imhoff	1743 – 1750
28. Jacob Mossel	1750 – 1761
29. Petrus Albertus Van der Parra	1761 – 1775
30. Jeremias van Eiemsdijk	1775 – 1777
31. Reinier de Klerk	1777 – 1780
32. Willem Arnold Alting	1780 – 1796
33. Pieter Gerardus van Overstraten	1796 – 1801

34. Johannes Sieberg	1801 – 1804
35. Albertus Henr. Wiese	1804 – 1808
36. Herman Willem Daendels	1808 – 1811
37. Jan Willem Janssens	1811 –

Masa Inggris

1. Sir Gilb Elliot E.O. Minto	1811 –
2. Thomas Stamford Raffles	1811 – 1816
3. John Fendall	1816 –

Masa Belanda

1. Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen	1816 – 1826
2. Hendrik Merkus de Kock	1826 – 1830
3. Johannes Graaf van den Bosch	1830 – 1833
4. Jean Chretien Baud	1833 – 1836
5. Doniniques de Eerens	1836 – 1840
6. Carel Sirardus Willem Graaf van Hogendorp	1840 – 1841
7. Pieter Merkus	1841 – 1843
8. Pieter Merkus	1841 – 1844
9. Joan Cornelis Reijnst	1844 – 1845
10. Jan Jacob Rochussen	1845 – 1851
11. Albertus Jacob Duymaer van Twist	1851 – 1856
12. Charles Ferdinand Pahud	1856 – 1861
13. Arij Prins	1861 –
14. Ludolf Anne Jan Wilt Baron Sloet van de Beele	1861 – 1866
15. Arij Prins	1866 –
16. Pieter Mijer	1866 – 1872
17. James Loudon	1872 – 1875
18. Johan Willem van Lansberge	1875 – 1881
19. Frederick 'S Jacob	1881 – 1884
20. Otto van Rees	1884 – 1888
21. Cornelis Pijnacker Hordijk	1888 – 1893
22. Carel Herman Aart van der Wijk	1893 – 1898
23. Willem Rooseboom	1898 – 1904
24. Johannes Benedicks van Heutz	1904 – 1909

25. Alexander Willem Frederick Idenburg	1909 – 1916
26. Johan Paul Graaf van Limburg Stirum	1916 – 1921
27. D. Fock	1921 – 1926
28. A.CD. de Graeff	1926 – 1931
29. B.C. de Jonge	1931 – 1936
30. A.W.L. Tjarda van Starckenborgh-Stachouwer	1936 – 1942

Masa Jepang :

1. Hitosji Imamura (Saiko Sikikan)	1942 – 1943
2. Kumakitji Harada (Saiko Sikikan)	1943 – 1945

Lampiran 6**DAFTAR : PARA SULTAN DI KESULTANAN YOGYAKARTA**

1.	Hamengku Buwono I	13 Feb. 1755	–	24 Maret 1792
2.	Hamengku Buwono II	2 Apr. 1792	–	31 Des. 1810
3.	Hamengku Buwono III	31 Des. 1810	–	28 Des. 1811
4.	Hamengku Buwono II	28 Des. 1811	–	28 Juni 1812
5.	Hamengku Buwono III	28 Juni 1812	–	3 Nov. 1814
6.	Hamengku Buwono IV	16 Nov. 1814	–	6 Des. 1822
7.	Hamengku Buwono V	19 Des. 1822	–	17 Agt. 1826
8.	Hamengku Buwono II	17 Agt. 1826	–	2 Jan. 1828
9.	Hamengku Buwono V	2 Jan. 1828	–	4 Juni 1855
		(26 No. 1836) *		
10.	Hamengku Buwono VI	5 Juli 1855	–	20 Juli 1877
11.	Hamengku Buwono VII	13 Agt. 1877	–	29 Jan. 1921
12.	Hamengku Buwono VIII	8 Feb. 1921	–	1940
13.	Hamengku Buwono IX	1940	–	Sekarang.

Para Adipati di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta :

1.	Paku Alam I	17 Maret 1813	–	4 Okt. 1829
2.	Paku Alam II	31 Des. 1829	–	23 Juli 1858
3.	Paku Alam III	29 Des. 1858	–	17 Okt. 1864
4.	Paku Alam IV	1 Des. 1864	–	24 Sep. 1878
5.	Paku Alam V	9 Okt. 1878	–	6 Nov. 1900
6.	Paku Alam VI	27 Feb. 1901	–	8 Juli 1902
7.	Paku Alam VII	17 Okt. 1906	–	16 Feb. 1937
8.	Paku Alam VIII	12 Apr. 1937	–	Sekarang.

Lampiran 7

BENDA-BENDA PURBAKALA YANG ADA DI GEDUNG AGUNG YOGYAKARTA DICATAT OLEH M. ROMLI, BA. CATATAN INI DISIMPAN DI KANTOR SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI BOGEM

- No. inv. : A. 01 / Foto No. 01
Arca Dwarapala : Batu Andesit.
 Ukuran : 1.232 cm. Tebal : 126cm. Tinggi seluruh : 120 cm.
 Pemotretan : Tgl. 23 Juni 1977
 Tempat
 Penyimpanan : Halaman depan Gedung Agung Yogyakarta
 – Arca utuh, memegang gada di tangan terdiri dari 2 bagian agak meragukan (yang atas asli atau tidak).
- No. inv. : A.02/Fot. No.02
Tugu : Batu Andesit.
 Ukuran : Bergaris tengah ± 169 cm.
 Pemotretan : 23 Juni 1977
 Tempat
 Penyimpanan : Halaman Depan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Tugu batu mungkin dulu merupakan bangunan/puncak satu bangunan kuno. Bentuk bulat memanjang, bagian bawah berupa Padma dan alas/lapik merupakan batu segi delapan.
 – Tugu bagian/sisi selatan pecah lapik sisi tenggara bagian bawah pecah, padma dasar lapik buatan baru menggunakan spesi.
- No. inv. : Foto No. 03
Arca Dwarapala : Batu Andesit.
 Ukuran : 1.64 cm. Tebal 61 cm. Tinggi seluruh 109 cm
 Pemotretan : Tanggal 23 Juni 1977.

Tempat

- Penyimpanan : Halaman depan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Dwarapala selalu membawa gada digambarkan dengan wajah menyeramkan/menakutkan.
 – Hidung, kumis, biji mata, kelingking kiri, sebagian telinga kanan diganti semen. Telunjuk kanan dan ibu jari pecah. (Tangan).

No. inv. : A.04 / Foto No. 04

Awalokiteswara : Batu Andesit.

Ukuran : 1.72 cm. Tebal 75 cm. Tinggi seluruh 115 cm

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat

- Penyimpanan : Halaman depan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Tangan kiri hilang, siku tangan kanan hilang. Perut ke bawah disemen, ibu jari kanan dan hidung disemen. Pada wajah arca terdapat semen, sandaran juga disemen, padmasana sebagian disemen.
 – Awalokiteswara atau padmapani duduk bersila; waramudra. Awalokiteswara adalah Bodhisatwa dan merupakan anak Dhyani Budha, Amitaba, caktinya Amitaba = Pandara.
 – Arca tanpa No. Inventaris, asal tidak diketahui, dari tahun berapa, dan siapa yang membawanya tidak diketahui.

No. inv. : A. 05 / Foto No. 05

Arca Dhyani Budha Amithaba : Batu Andesit.

Ukuran : 1.109 cm. Tebal 81 cm. Tinggi 133 cm.

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat

- Penyimpanan : Di halaman depan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Arca dalam keadaan baik. Tetapi ujung hidungnya pecah ditambal semen. Praba kiri atas bagian tepi pecah, ditambal semen. Amithaba adalah Dhyani Budha, dalam si-

kap semedi. Arca bersila, kedua tangannya di atas pangkuan. Umumnya memakai simbol lotus (kuncup Teratai). Sekarang ini berada di Sorga Sukhawati. Amithaba menguasai mata angin : Barat.

- No. inv. : A. 06 / Foto No. 06.
Arca Ganeça : Batu Andesit.
 Ukuran : 1.87 cm. Tebal 62 cm. Tinggi 119 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat
 Penyimpanan : Di halaman Gedung Agung Yogyakarta.
 – Praba seluruhnya pecah, belalai bagian bawah pecah dilapisi semen, telunjuk jari tengah/hilang, tangan kiri (belakang) hilang/pecah.
 Jari-jari kaki kanan dan kiri pecah, padmasana bagian depan pecah.
 – Ganeça dapat berdiri sendiri sebagai arca keselamatan.

- No. inv. : A. 07 / Foto No. 07
Arca Awalokiteçwara : Batu Andesit.
 Ukuran : 1.69 cm. Tebal 50 cm. Tinggi 109 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat : Halaman depan sisi Selatan Gedung Agung
 Penyimpanan : Yogyakarta.
 Keterangan : Tempat aslinya tidak diketahui. Arca Bodhisatwa Awalokiteswara/Padmapani dalam sikap duduk, waramudra (memb. anugerah).
 – Wajah arca dilapisi semen, tapak tangan kanan, kiri, dilapisi semen, sandaran dilapisi semen.

- No. inv. : A. 08 / Foto No. 08
Arca duduk : Batu Andesit
 Ukuran : 1.58 cm. Tebal 43 cm. Tinggi seluruh 123 cm
 Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat

Penyimpanan : Halaman depan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Arca duduk bersila, masing-masing tangan di atas paha. Tapak tangan kanan, kiri, pecah, diganti semen, mahkota bagian atas pecah.

No. inv. : A. 09 / Foto No. 09

Arca Bodhisatwa Awalokiteswara : Batu Andesit.

Ukuran : 1.95 cm. Tebal 51 cm. Tinggi seluruh 110 cm

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat : Halaman sisi selatan Gedung Agung Yogya-

Penyimpanan karta.
 – Tempat asal belum diketahui. Arca duduk bersila dengan sikap tangan memberi anugerah (Waramudra).
 – Ciri lain Bodhisatwa Awalokiteswara: tangan kiri memegang tangkai lotus dan pada mahkota terdapat arca Dhynai Budha Amithaba.
 – Wajah arca Bodhisatwa Awalokiteswara dilapisi semen, jari-jari tangan kanan dan kiri diganti semen/pecah.

No. inv. : A. 10 / Foto No. 10

Arca Dhyani Budha Aksobya : Batu Andesit.

Ukuran : Lebar 66 cm. Tebal 47 cm. Tinggi seluruh 108 cm.

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Halaman depan sisi utara Gedung Agung Yogyakarta.

– Arca Dhyani Budha Aksobya duduk bersila, sikap tangan menunjuk bumi sebagai saksi (Bhumisparcamudra).
 – Dhyani Budha merupakan tingkat ketiga untuk menjadi Budha. Telapak, ibujari tangan kanan rusak. Ibu jari kaki kanan, hidung rusak, praba (atas) rusak.

- No. inv. : A. 11 / Foto No. 11
Arca Ganeca : Batu Andesit.
 Ukuran : 1.89 cm. Tebal 76 cm. Tinggi seluruh 117 cm
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman depan sisi utara Gedung Agung Yogyakarta.
 – Ujung belalai pecah diganti semen, tangan kanan dan kiri belakang hilang. Ibu jari kanan dan kiri retak, praba hilang.
- No. inv. : A. 12 / Foto No. 12
Arca Dhyani Budha Amithaba : Batu Andesit.
 Ukuran : 1. 63 cm. Tebal 56 cm. Tinggi seluruh 106 cm
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman Gedung Agung Yogyakarta.
 – Sikap semedi, keadaan baik/utuh. Rambut hilang/rusak sedikit.
- No. inv. : A. 13 / Foto No. 13
Arca Dwarapala : Batu Andesit.
 Ukuran : Lebar 56 cm. Tebal 61 cm. Tinggi seluruh 110 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman depan sisi utara Gedung Agung Yogyakarta.
 – Sebagian waja, gada, tapak kaki kanan di-semen.
- No. inv. : A. 14 / Foto No. 14
Nandi : Batu Andesit.
 Ukuran : Panjang 78 cm. Lebar 38 cm. Tebal 30 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman depansisi selatan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Nandi adalah kendaraan Çiwa.
- No. inv. : A. 15 / Foto No. 15
Makara : Batu Andesit.
 Ukuran : Panjang 104 cm. Lebar 28 cm. Tebal 81 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Di sisi selatan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Makara digambarkan berupa mulut binatang laut yang menganga, pada bibir atas terdapat untai bunga/ratna. Di tengah mulut ada singa. Ujung belalai rusak sedikit.

No. inv. : A. 16 / Foto No. 16
Makara : Batu Andesit
 Ukuran : Panjang 104 cm. Lebar 28 cm. Tebal 81 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Di sisi selatan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Keadaan baik. Tangan rusak sedikit.

No. inv. : A. 17 / Foto No. 17
Arca Singa : Batu Andesit
 Ukuran : Panjang 64 cm. Lebar 45 cm. Tinggi 70 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Di sisi selatan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Keadaan baik, tetapi ekor disemen.

No. Inv. : A. 18 / Foto No. 18
Locana : Batu Andesit.
 Ukuran : Panjang 143 cm. lebar 82 cm. Tebal 62 cm.
 Tinggi 143 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Di sisi selatan Gedung Agung Yogyakarta.
 – Locana adalah cakti Dhyani Budha Wairocana. Posisi, duduk bersila dan sikap tangannya memutar roda (dharma). Tempat tangan kanan-kiri pecah.

No. inv. : A. 19 / Foto No. 19
Arca Amithaba : Batu Andesit.
 Ukuran : Lebar 58 cm. Tebal 51 cm. Tinggi seluruh 106 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Di sisi selatan Gedung Agung, bersila bersemedi.

– Keadaan baik, ibu jari kanan-kiri pecah, hidung rusak.

No. inv. : A. 20 / Foto No. 20

Arca Dhyani Budha Amithaba : Batu Andesit.

Ukuran : Lebar 69 cm. Tebal 55 cm. Tinggi 100 cm.

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Sisi selatan Gedung Agung Yogyakarta.

– Keadaan baik, hidung pecah, ibu jari kanan pecah.

No. inv. : A. 21 / Foto No. 21

Arca Ganeça : Batu Andesit.

Ukuran : Lebar 60 cm. Tebal 47 cm. Tinggi 90 cm.

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Sisi selatan Gedung Agung Yogyakarta.

– Duduk bersila bertangan empat. Pangkal belalai, telunjuk kiri/belakang, tangan belakang pecah, taring atas pecah. Sandaran rusak, jari kaki kanan rusak, alas terpendam semen.

No. inv. : A. 22 / Foto no. 22

Arca Dhyani Budha Ratnasambawa : Batu Andesit.

Ukuran : Lebar 66 cm. Tebal 48 cm. Tinggi 99 cm.

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Halaman sisi selatan Gedung Agung Yogyakarta.

– Dhyani Budha Ratnasambawa bersila, wara-mudra, caktinya adalah Vajradhatiswari atau Mamali.

Keadaan baik, ujung sanggul, ujung hidung rusak, mata kiri rusak. Ibu jari, mata kanan dan kiri pecah. Sandaran/praba kanan atas pecah dan ditambal semen.

No. inv. : A. 23 / Foto No. 23

Arca Dhyani Budha Amithaba : Batu Andesit.

Ukuran : Lebar 82 cm. Tebal 57 cm. Tinggi seluruh 104 cm.

- Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Sisi selatan Gedung Agung.
 – Arca bersila, semadi. Çaktinya : Pandara.
 – Hidung pecah, telinga kanan-kiri bagian bawah pecah. Ibu jari tangan kanan-kiri aus.
- No. inv. : A. 24 / Foto No. 24
Arca Manjusri : Batu Andesit.
 Ukuran : Lebar 85 cm. Tebal 64 cm. Tinggi 147 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Sisi selatan agak barat Gedung Agung Yogyakarta.
 – Manjusri adalah Bodhi satwa bersila, wara-mudra.
 – Dalam penggambaran biasa bertangan 2, 4, 6. Yang dibawa : pedang, buku, lotus biru.
- Kondisi : Ujung jari tangan kiri rusak, ibu jari tangan kanan pecah (hilang). Atribut kiri pecah. Kelingking disemen, ujung relief bulan disemen. Pangkal praba kanan bawah pecah/hilang.
- No. inv. : A. 25 / Foto No. 25
Arca Singa : Batu Andesit.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman selatan sisi barat Gedung Agung Yogyakarta.
 – Kondisi arca pada bagian mulut, ujung hidung, biji mata dan ujung ekor pecah/hilang, ditambal semen.
- No. inv. : A. 26 / Foto No. 26
Arca Dhyani Budha Amithaba : Batu Andesit.
 Ukuran : Lebar 63 cm. Tebal 54 cm. Tinggi 120 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman selatan sisi barat Gedung Agung Yogyakarta.
 Kondisi : Hidung pecah, ibu jari yang kanan rusak, ujung usnisa (sanggul) pecah. Padmasana bawah sisi pecah.

No. inv. : A. 27 / Foto No. 27
Arca Duduk : Batu Andesit
 Ukuran : Lebar 53 cm. Tebal 43 cm. Tinggi seluruh 110 cm.
 Tempat Peny. : Halaman selatan bagian barat Gedung Agung Yogyakarta.
 — Ujung hidung, biji mata kanan-kiri dan dahi disemen, ornamen pada mahkota disemen. Ujung vajra atas disemen, jari tangan kiri dan sandaran kanan atas disemen.

No. inv. : A. 28 / Foto No. 28
Arca Dhyani Budha Amithaba : Batu Andesit
 Ukuran : Lebar 71 cm. Tebal 58 cm. Tinggi 209 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman selatan sisi Gedung Agung Yogyakarta.
 — Arca duduk di atas padma yang mempunyai tangkai panjang/tinggi. Mata terdapat semen, sandaran atas pecah, hidung rusak, tapak kaki kanan-kiri pecah.

No. inv. : A. 29 / Foto No. 29
Arca Awalokitaswara : Batu Andesit
 Ukuran : Lebar 57 cm. Tebal 52 cm. Tinggi 110 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman selatan sisi barat Gedung Agung Yogyakarta.
 — Awalokitaswara ini, seorang Bodhisatwa duduk bersila, tangan: waramudra, tangan kiri memegang lotus. Ujung hidung rusak, sebagian ibu jari tangan kanan kelingking kiri telapak kiri pecah.

No. inv. : A. 30 / Foto No. 30
Arca Budha Amithaba : Batu Andesit
 Ukuran : Lebar 85 cm. Tebal 66 cm. Tinggi seluruh 117 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Halaman selatan sisi barat Gedung Agung Yogyakarta.

- Budha Amithaba ini duduk bersila, semadi.
- Hidung dan lutut kiri rusak.

No. inv. : A. 31 / Foto No. 31

Arca Amithaba : Batu Andesit

Ukuran : Lebar 65 cm. Tebal 52 cm. Tinggi 108 cm.

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Halaman selatan sisi barat Gedung Agung Yogyakarta.

- Amithaba, inilah Dhyani Budha. Yang di sini sikapnya bersemadi.
- Ujung hidung, mata kanan-kiri disemen, ujung usnisa disemen. Ibu jari tangan kanan dan kiri pecah, disemen. Sandaran atas pecah, disemen.

No. inv. : A. 32 / Foto No. 32

Yoni : Batu Andesit

Ukuran : Lebar 68 cm. Tebal 68 cm. Tinggi 68,5 cm. Tinggi 77 cm.

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Halaman selatan sisi barat Gedung Agung Yogyakarta.

- Ujung cerat berwujud kepala raksasa, di bawah cerat terdapat garuda naik kura-kura, didukung lima naga (ular). Pada sudut bidang datar atas yoni berluang. Yoni merupakan lambang wanita.
- Yoni-lingga adalah perwujudan lain dari dewa Ciwa Mahadewa. Yoni dapat sebagai lapik/alas arca.
- Kondisi yoni dalam keadaan baik. Di atasnya ditempatkan arca dwarapala kecil kondisi tidak baik.

No. inv. : A. 33 / Foto No. 33

Arca Ganeça : Batu Andesit

Ukuran : Lebar 89 cm. Tebal 69 cm. Tinggi 124 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman utara Gedung Agung Yogyakarta.
 – Tapak tangan kiri/belakang hilang. Tapak tangan kanan/belakang hilang. Daun telinga atas pecah. Praba seluruhnya pecah. Telunjuk kaki kanan, ibu jari dan telunjuk kaki kiri pecah.

No. inv. : A. 34 / Foto No. 34
Arca Ganeca : dari Batu Andesit.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman utara Gedung Agung Yogyakarta.
 – Tangan kanan-kiri belakang hilang, tapak tangan kanan-kiri pecah, dispesi daun telinga kanan tepinya rusak, tangan kanan-kiri (belakang) hilang, praba sebagian besar (atas) pecah.

No. inv. : A. 35 / Foto No. 35
Arca Durga Mahesuramardini : Batu Andesit.
 Ukuran : Lebar 40 cm. Tinggi 110 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman utara Gedung Agung Yogyakarta.
 – Arca ini adalah Çakti Çiwa – Pembasmi kejahatan. Digambarkan sebagai seorang Dewi yang berdiri di atas lembu penjelmaan raksasa yang ditaklukkan. Raksasa dilukiskan sedang melarikan diri dari kepala yang masing-masing memegang senjata. Biasanya di bangunan letaknya di utara.
 – Wajah aus, hidung disemen, ujung hidung pecah, jari tangan kiri (pegang pedang) pecah. Ujung pedang kanan pecah bagian tengah rusak, perisai dipegang raksasa, sandaran belakang disemen.

No. inv. : A. 36 / Foto No. 36
Arca Çiwa Mahaguru : Batu Andesit.

Ukuran : Lebar 41 cm. Tebal 35 cm. Tinggi 102,5 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman utara Gedung Agung Yogyakarta.

– Ciwa Mahaguru perutnya gendut, berjenggot, membawa kamandalu berisi air amer amerta. Biasanya di sebuah bangunan menghadap ke selatan. Hidung pecah disemen, mahkota pecah, tapak kanan-kiri pecah (dispesi), ibu jari kaki kanan pecah, ibu jari kaki kiri pecah, salah satu ujung trisula rusak.

No. inv. : A. 37 / Foto No. 37

Durga Mahesuramardini : Batu Andesit.

Ukuran : Lebar 51 cm. Tebal 51 cm. Panjang 111 cm.

Foto tanggal : 23 Juni 1977

Tempat Peny. : Halaman utara Gedung Agung Yogyakarta.

– Durga berdiri di atas lembu (penjelmaan raksasa) bertangan delapan.

Kondisi : Mahkota sebelah kiri pecah, hidung pecah (disemen), ujung anak panah pecah, kelingking kanan memegang cakra, ujung rusak, mata trisula kanan-kiri pecah berlubang. Tangkai trisula pecah, di bawah tangkai trisula berlubang, tangan memegang trisula - pecah.

No. inv. : A. 38 / Foto No. 38

Arca Dewa Brahma : Dari batu Andesit.

Ukuran : Lebar 23 cm. Tebal 23 cm. Tinggi 102 cm.

Foto : Tanggal 23 Juni 1977

Tempat : Halaman utara Gedung Agung Yogyakarta

– Dewa Brahma/pencipta, berkepala 4. Tetapi arca ini hanya mempunyai 3. Arca ini bertangan 4, masing-masing membawa tasbih, pot bunga (jambangan), sendok atau buku. Wahana = angsa.

– Sandaran arca kiri pecah, wajah kanan, hidung pecah, rusak. Wajah tengah hidung rusak, wajah hidung kiri pecah, ujung mah-

kota depan dan sebelah kiri aus, ibu jari kanan pecah, jari kaki kiri rusak, padmasana kiri pecah.

No. inv. : A. 39 / Foto No. 39
Arca Binatang : Batu Andesit.
 Ukuran : Lebar 50 cm. Tebal 37 cm. Tinggi 48 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Gedung Agung/halaman – Yogyakarta.
 – Arca binatang tidak jelas, di atas padma.
 Arca di atasnya tidak jelas.
 – Sandaran hilang, wajah binatang rusak, ujung mahkota depan kiri aus, jari tangan dan kaki rusak, padma sebelah kiri pecah.

No. inv. : A. 40 / Foto No. 40
Ganeça : Batu Andesit.
 Ukuran : Lebar 29 cm. Tebal 23 cm. Tinggi 43 cm.
 Foto tanggal : 23 Juni 1977
 Tempat Peny. : Halaman Gedung Agung Yogyakarta.
 – Wajah aus, belalai pecah, padmasana aus.

Lampiran 13

DAFTAR : TAMU-TAMU KENEGARAAN DI GEDUNG
AGUNG YOGYAKARTA

11 Mei	1957	---	Presiden USSR VOROSHILOV
26 Juni - Juli	1957		Konperensi Internasional Rubber Study Group (IRSG)
19 Agustus	1957	---	Wakil Presiden Yugoslavia
24 Oktober	1957	---	ECAFE Conference
<hr/>			
27 Januari	1958	---	PM. Cekoslovakia
12 Maret	1958	---	Sekjen Kementerian Agraria Australia
21 Nopember	1958	---	Wakil PM./Menteri Pertahanan Malaya.
12 Desember	1958	---	Presiden Republik India RAJENDRA PRASAD.
29 Desember	1958	---	Presiden Yugoslavia JOSEF B. TITO
<hr/>			
12 Februari	1959	---	PM. Camboja
3 Maret	1959	---	Presiden HO CHI MINH
5 Mei	1959	---	KSAU India
20 Agustus	1959	---	KSAP/Menteri Pertahanan Camboja Mayjen LON NOL.
3 Desember	1959	---	PM. Australia
<hr/>			
12 Februari	1960	---	Raja Muang Thai BHUMIBOL ADULYADEJ.
21 Februari	1960	---	PM. USSR NIKITA KRUSCHOV
29 Oktober	1960	---	Perwira Mexico Kol. A. LOPEZ
8 Desember	1960	---	Presiden Pakistan AYUB KHAN
<hr/>			
23 Januari	1961	---	PM. Aljazair FERHAT ABBAS
25 Januari	1961	---	YM. SYECH Dr. MAHMUD SHOLTAN (RPA).
7 Oktober	1961	---	Presiden Polandia
24 Nopember	1961	---	Menteri Pertahanan Yugoslavia
9 Oktober	1961	---	KSAD Phillipina M. SANTOS

15 Desember	1961	---	KSAD Australia
20 Januari	1962	---	Wakil Presiden RPA. MARSEKAL ABDEL HAKEM AMER.
14 Februari	1962	---	Jaksa Agung USA ROBERT KENNEDY.
26 Juni	1962	---	Laksamana Besar USSR K.A. WERSJINEIN.
25 Agustus	1962	---	Menteri Olah Raga Jepang
7 Oktober	1962	---	Persiden Rumania
12 Oktober	1962	---	KSAL Yugoslavia
30 Nopember	1962	---	H.R.H. NORODOM SIHANOUK
1 Desember	1962	---	Tamu Menlu India LAKSHMI MENON.
12 Januari	1963	---	Pangad Pakistan Jendral HQA MBE
14 Maret	1963	---	Menteri Muda Olah Raga Korea Utara
30 Maret	1963	---	Menteri Pertahanan USSR RM. MARSEKAL MALINOVSKY.
16 April	1963	---	Presiden RRC LIU SHAO TSI.
28 Agustus	1963	---	Menteri Kesehatan India
15 Oktober	1963	---	KSAB Rumania
31 Oktober	1963	---	Presiden Republik Federasi Jerman
3 Februari	1964	---	Jenderal Dr. CARLOS P. ROMULO
19 Februari	1964	---	Sekretaris Walikota Wina
25 Februari	1964	---	Presiden Phillipina DIOSDADO MACAPAGAL.
25 April	1964	---	Walikota Phillipina
26 Juni	1964	---	Missi Parlemen Tertinggi Soviet Jend. SPISTREV.
20 Agustus	1964	---	Ketua Majelis Nasional R.D. Vietnam TZAUNG C. CHIENH.
2 Oktober	1964	---	Jenderal JERZY BORDZILOVSKY
25 Maret	1969	---	Menteri Keuangan Singapura
27 Juli	1969	---	KSAD Korea Selatan Jenderal KIM KAH WON.

19 Maret	1970	---	Pangeran Kerajaan Belanda Prince BENHARD.
10 Juni	1970	---	KSAL Malaysia Air Commodore DATO SULAEMAN.
20 Juni	1970	---	Menteri Sosial Belanda Mr. KLOMPE
14 Agustus	1970	---	Menteri Perekonomian Regional Kerajaan Belgia Prof.Dr.ANDRE VLERICK.
26 September	1970	---	KSAD Malaysia Brigjend. ABDUL DJAMIL.
<hr/>			
24 Januari	1971	---	PM. Canada PIER ELLIOTT TRUDEAU.
30 Agustus	1971	---	Her Mayesty Queen of the Netherlands YULIANA & Prince BERNHARD.
5 September	1971	---	Pangeran ABDARREZA PAHLEVI dari Iran.
13 Desember	1971	---	KSAB Malaysia Jend. SRI IBRAHEM AHMED.
<hr/>			
13 Maret	1972	---	Wakil PM. Malaysia TUN dr.ISMAEL AL-HAJ.
26 Juni	1972	---	KSAL Muang Thai ADMIRAL THAVIL RAVANANONDA.
20 Nopember	1972	---	Menteri Kebajikan Malaysia TAN SRI FATIMAH BINTI HJ. HASJIM.
<hr/>			
10 Februari	1973	---	KSAD Jerman Barat Letjend. ERNEST FERBER.
23 Mei	1973	---	KSAP Belanda Letjend. WILHELM VAN RIJN.
7 Agustus	1973	---	KSAD Jepang Kol. HARADA
2 November	1973	---	KSAD India Jenderal GOPAL GURNNABH BEWOR.
16 Desember	1973	---	PM. New Zealand Y.M. NOORMAN KIRK.

20 Maret	1974	--	Her Mayesty The. Queen ELIZABETH II.
24 April	1974	--	Mrs. IMELDA MARCOS
11 Juni	1974	--	Presiden Burma NE WIN
5 September	1974	--	Prime Minister of Australia E.G. WHITLAM.
27 Oktober	1974	--	His Mayesty King of Belgia BOU-DEWIJN.
<hr/>			
9 Maret	1975	--	Pd.Pangab. Thailand Jenderal KRIS SIVARA.
12 Maret	1975	--	Menteri Pertahanan Phillipina H.E. JUAN PONCE ENRILE.
6 April	1975	--	Ketua Gabungan Ka.Staf U.S.A. GENERAL GEORGE S.BROWN.
28 Mei	1975	--	H.E. Presiden of Republik of India and BEGUM ABIDA AHMED.
<hr/>			
21 Januari	1976	--	Her Excellency The Prime Minister of Srilangka MADAME SRIMAVO R.D. BANDARANAIKE.
<hr/>			
14 Januari	1977	--	PM. of Papua New Guinea MICHAEL SOMARE.
<hr/>			
31 Januari	1978	--	Mrs. NINI VAN GESSELER VERSCHUUR, putri bekas Gubernur Belanda (II) di Yogyakarta th. 1929 - 1932. Bersama suaminya : Mr. AGT. JAMES (Inggris).
11 Juni	1978	--	Prime Minister of Luxemburg Mr. GASTON THORN.
<hr/>			
4 Maret	1979	--	PM. Malaysia Y.A.B. DATUK HUSSEIN ONN. Menteri Dalam Negeri Malaysia .YB. TAN GHAZALI SHEFEI.

Menlu. Malaysia YBM. TENGKU AH-
MAT RITHAUDDEEN.

Ketua Angkatan Tentara Malaysia
YB. Jeneral TAN SRI MOHAM-
MAD SANI.

Ketua Polisi Negara Malaysia YB.
TAN SRIHANIF OMAR.

30 Mei 1979 --- Staf Presiden Rep. Sosialis Yugosla-
via H.E. Mr. VIDOJE ZARKOVIC.

12 April 1980 --- Wakil Presiden Swiss H.E. Dr. KURT
FURGLER.

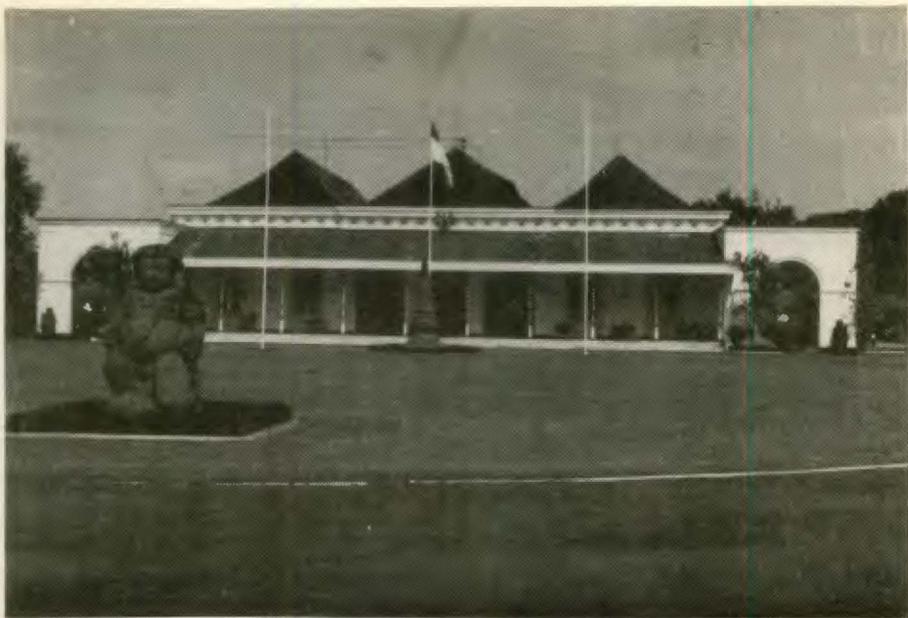
17 April 1980 --- PM. Belanda H.E. VAN AGT beserta
isteri.

28 Juni 1980 --- Opening Ceremony: Festival Film
Asia.

3 Juli 1980 --- PM. Singapura H.E. LEE KUANYEW
beserta isteri.

24 Agustus 1981 --- Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertu-
an Agong Malaysia Sultan Ahmad
Syah dan Seri Paduka Baginda Raja
Permaisuri Agong Tuanku Hajjah Af-
zan.
Men. Pen. Malaysia Dato Mohamed
Rahmad.





1. *Gedung Agung tampak dari depan.*



2. *Pemandangan dari serambi depan ke arah halaman depan.*



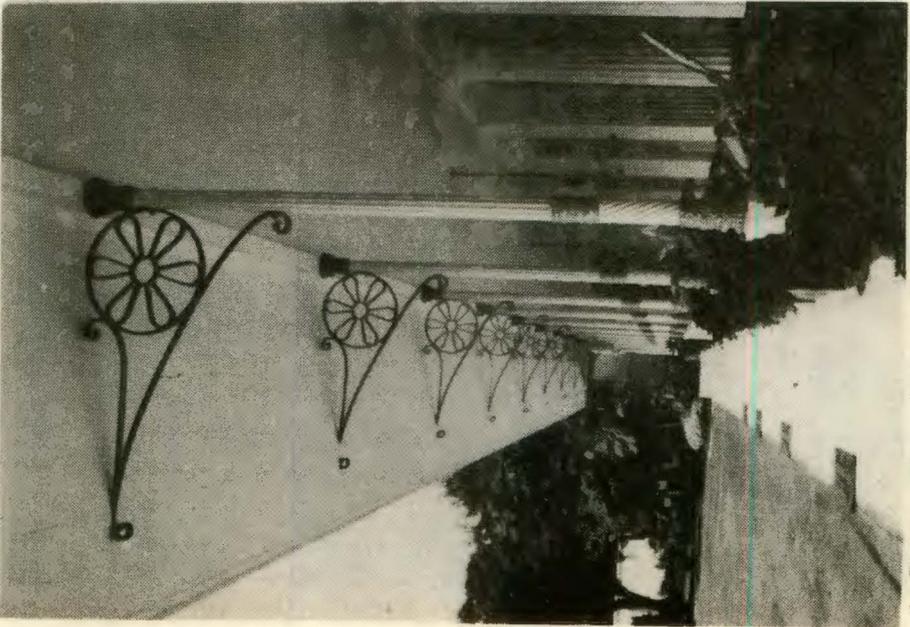
4. *Candi Cupu Watu dari Prambanan.*



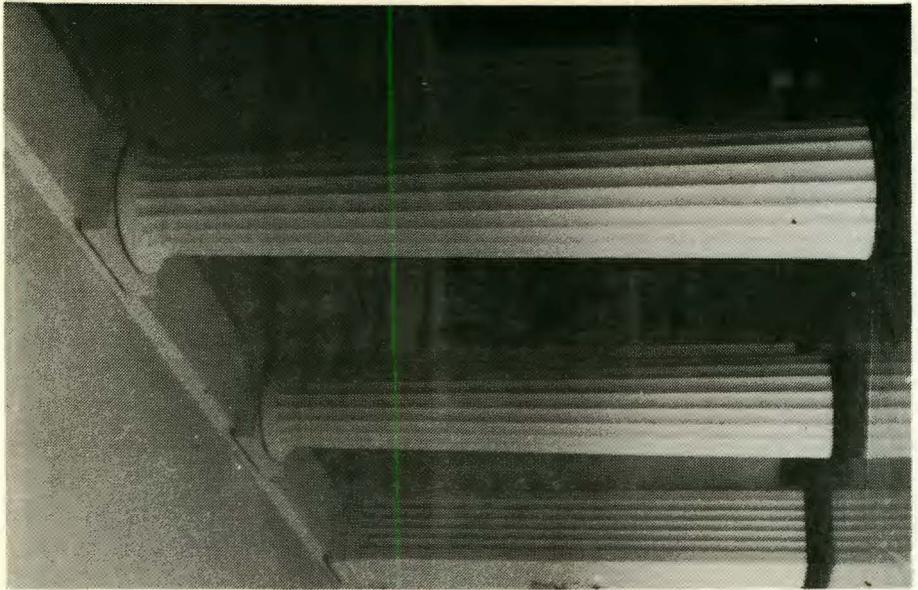
3. *Satu dari empat patung Dwarapala dari Kalasan menghiasi halaman depan gedung induk.*



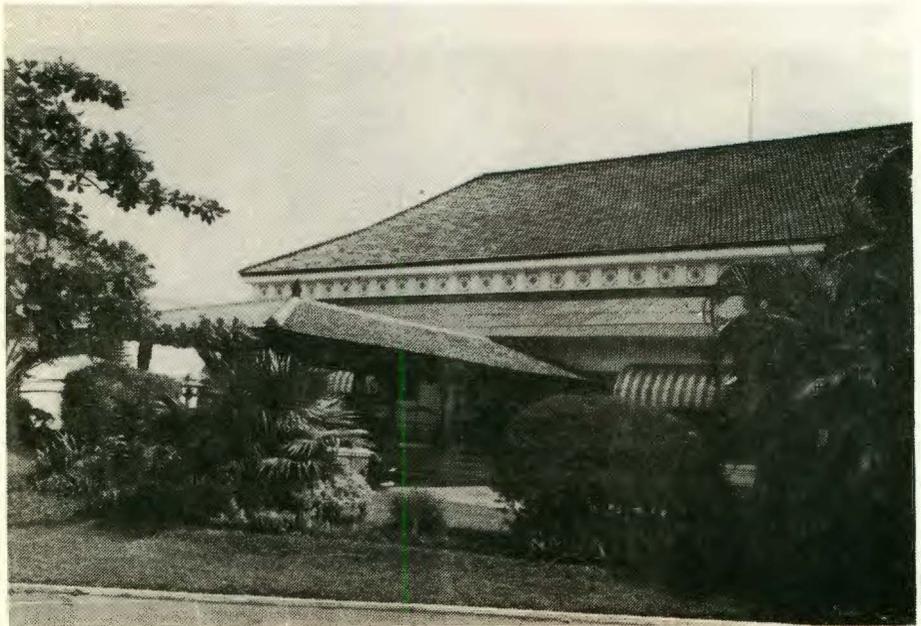
5. Serambi depan.



6. Deretan tiang besi cor berkepala komposit di serambi depan.



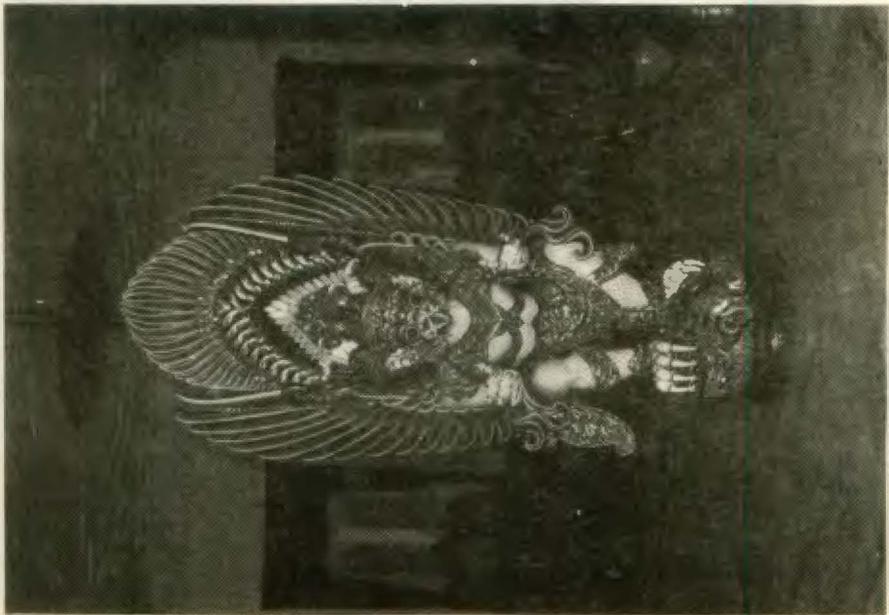
7. Tiang bergaya Doric di serambi depan.



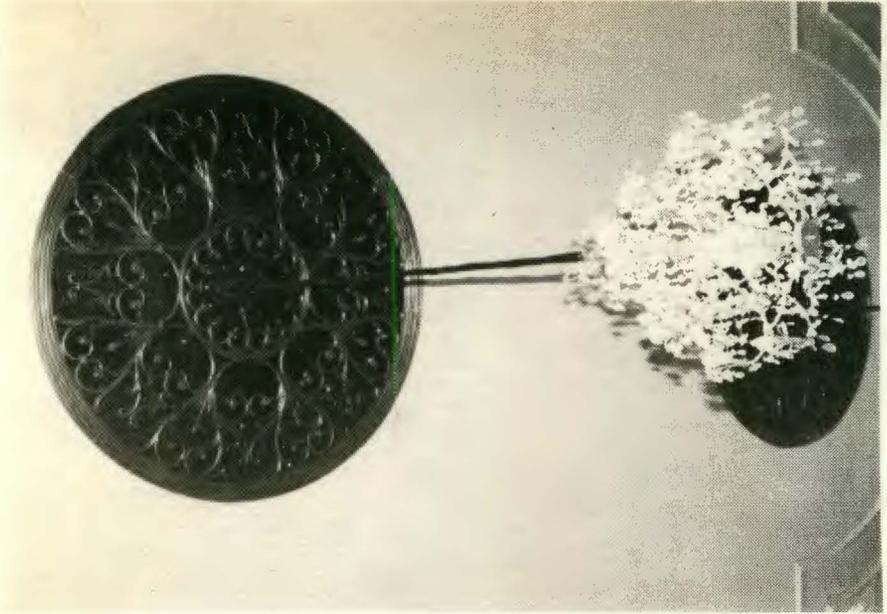
8. Fries dengan hiasan triglyphen dan methopan tampak dari samping bangunan induk.



9. Ruang Garuda dengan perabotan bersuasanakan Indonesia.



10. Garuda setinggi 2½ meter hasil seni ukir kayu dari bali.



11. Lampu gantung salah satu peninggalan peribotan dari masa sebelum Perang Dunia II.



12. Warana berhiaskan wayang kulit berbingkai ukir kayu dari Jepara.



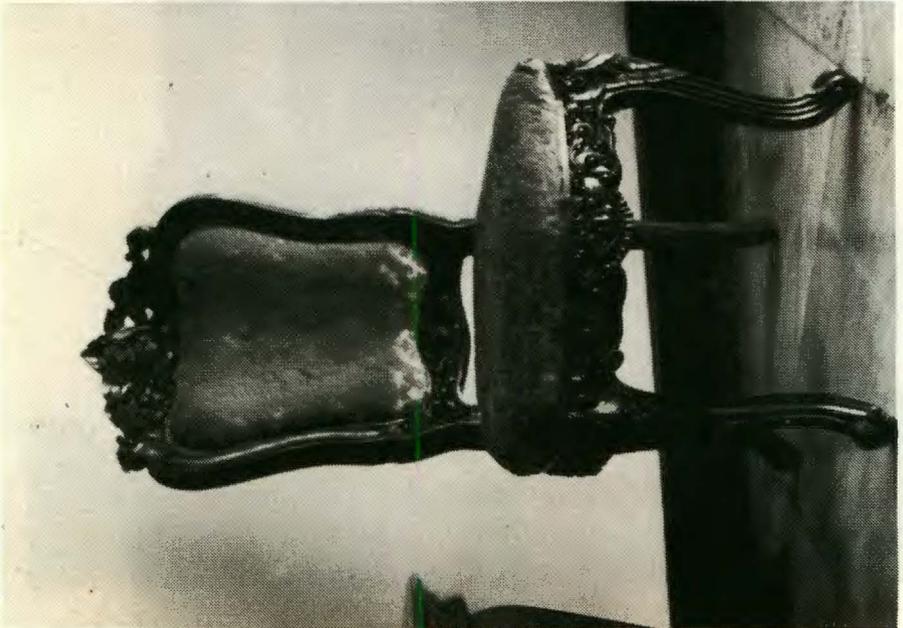
13. Kursi ukir jepara.



14. Warana berhiaskan wayang tokoh Pandawa dengan bingkai ukir kayu dari Jepora



15. *Dresoir dengan ukir Jepara.*



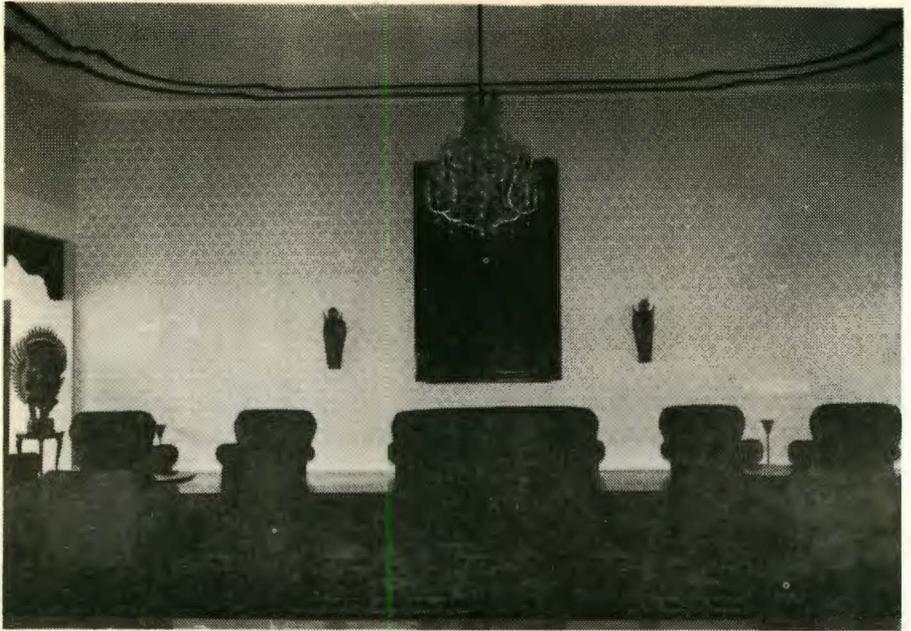
16. *Kursi makan ukir Jepara.*



18. Untuk membuat suasana Indonesia, tiang bergaya Doria ditempel kayu berukir dengan hiasan tumpal bercat keemasan.

17. Ruang makan untuk menjamu para tamu VIP dengan batang tiang bergaya Doria.





19. Ruang Istirahat VIP yang diberi suasana Indonesia dengan perabotan.



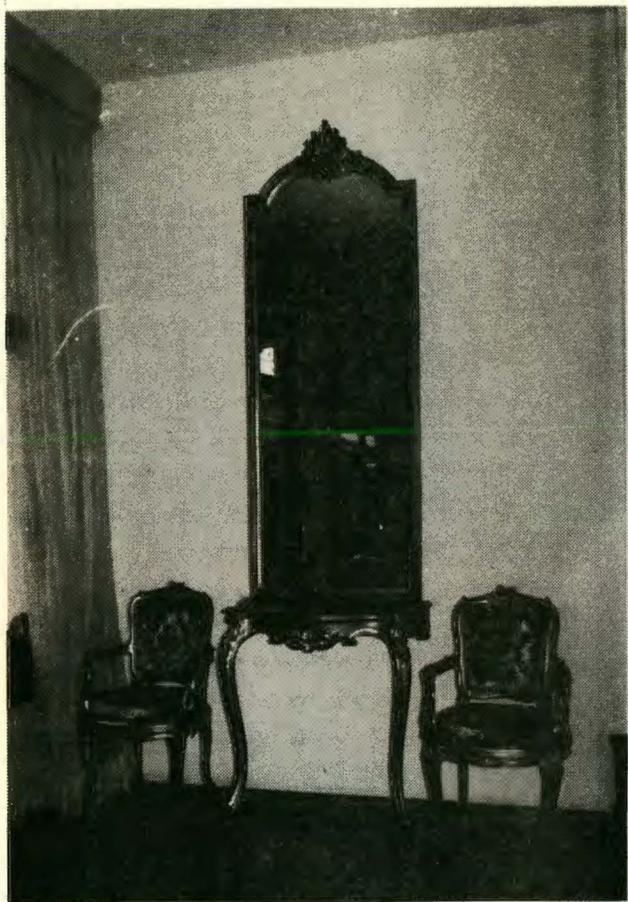
20. Detail kayu berukir tumpal untuk menghias kaki tiang bergaya Doria.



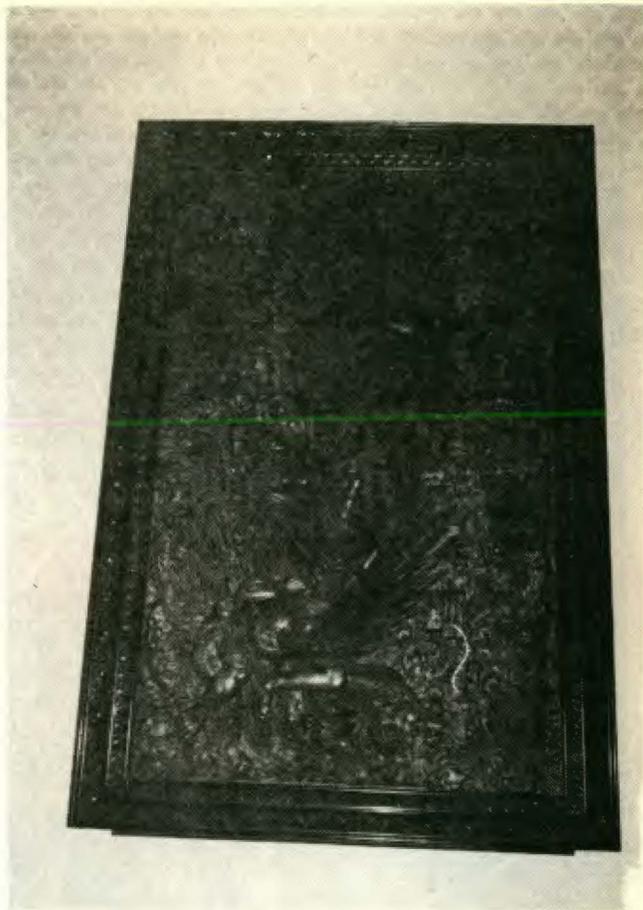
21. Ukiran Jepara untuk menghias arcade dengan patung Garuda dari Bali.



22. Arcade dengan hiasan ukir Jepara untuk memberi kesan suasana Jawa.



24. Cermin besar dengan sepasang kursi warna keemasan karya seniman Jepara.



23. Relief pada kayu dengan adegan Ramayana.



25. Tempat tidur Presiden mengingatkan pada "Pasren" di rumah bangsawan Jawa. Motif batik dan ukir kayu mempunyai arti simbolik khusus.



26. Tempat abu rokok hasil kerajinan Kasongan.



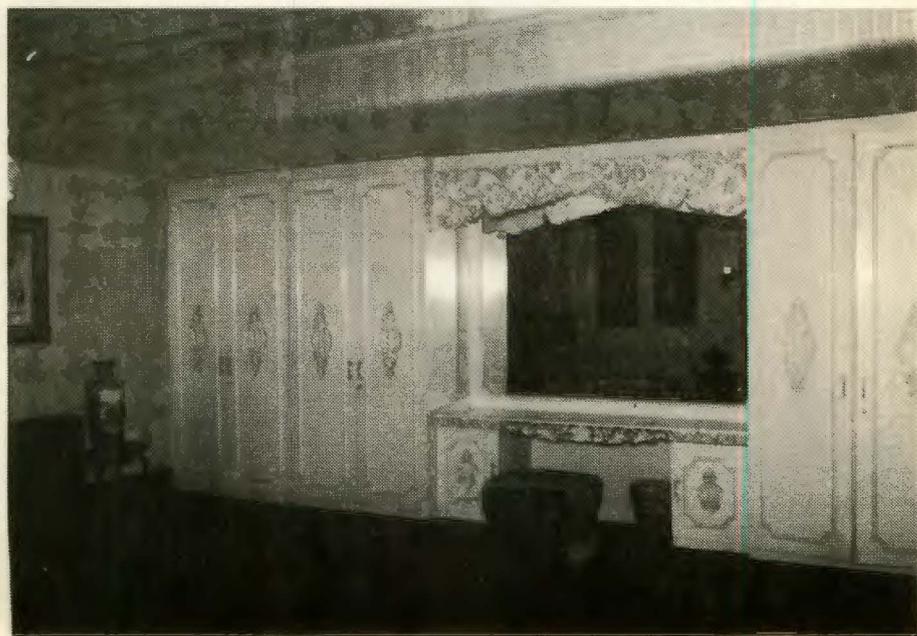
27. Lampu tidur dengan alas kayu berukir Jepara.



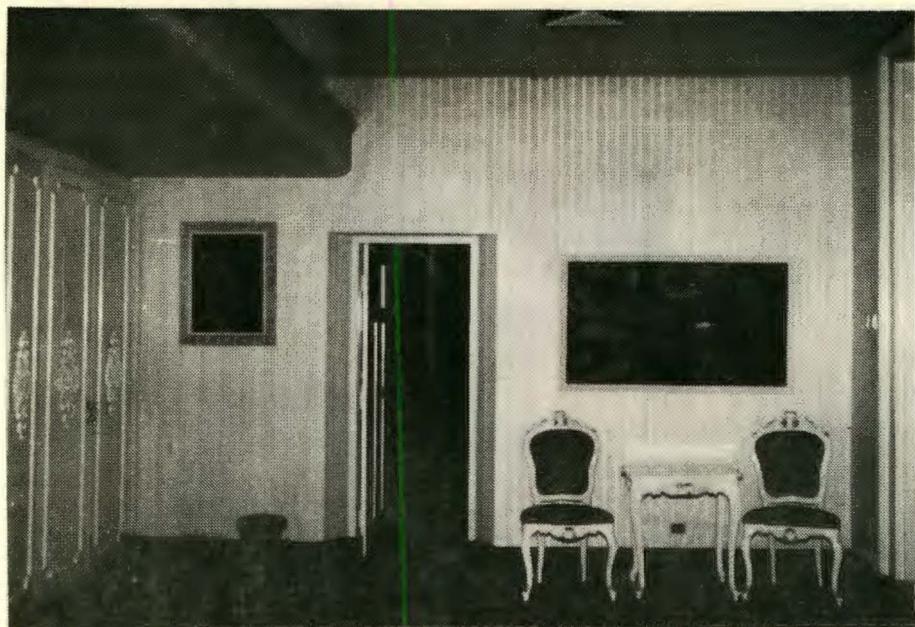
28. Detail bagian tempat tidur Presiden.



29. *Meja dan kursi kerja Presiden.*



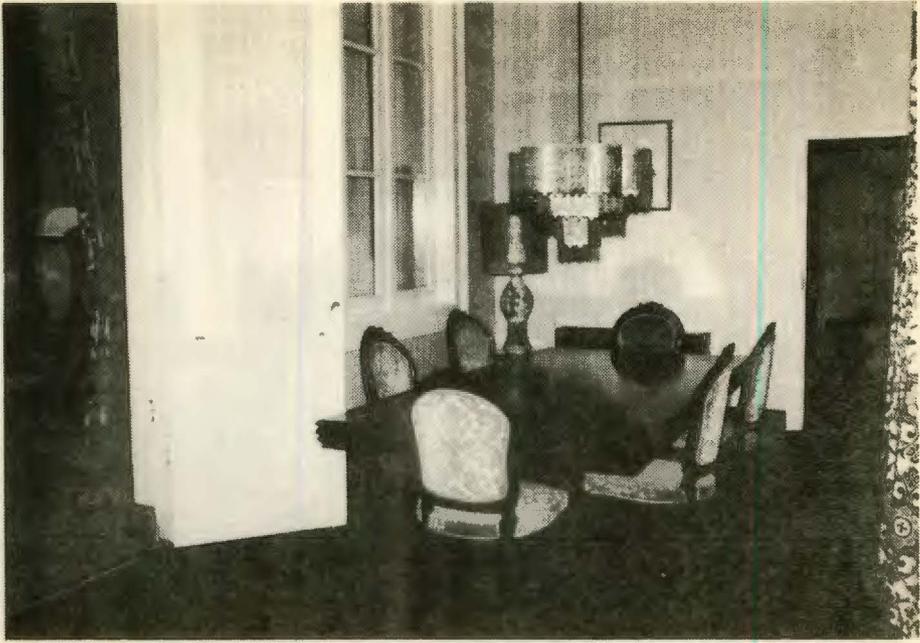
30. *Tempat rias kamar mandi Presiden.*



31. Tempat rias kamar mandi Presiden.



32. Ruang istirahat pribadi Presiden.



33. Ruang makan pribadi Presiden.



34. Ruang santai pribadi Presiden.



35. Tempat tidur Ibu Negara hasil kerajinan ukir kayu Jepara.



36. Detail tempat tidur Ibu Negara.



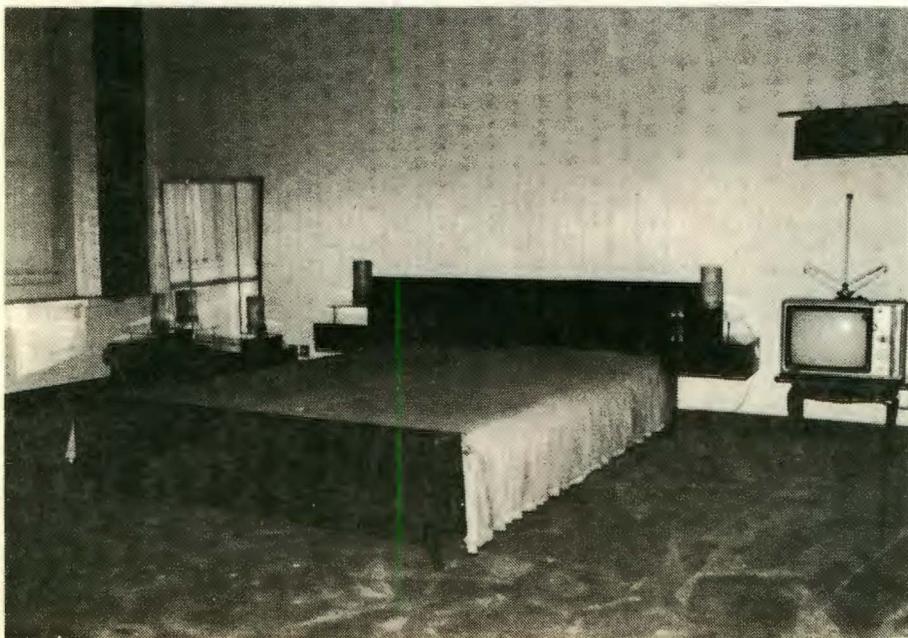
37. Cermin rias di ruang tidur Ibu Negara.



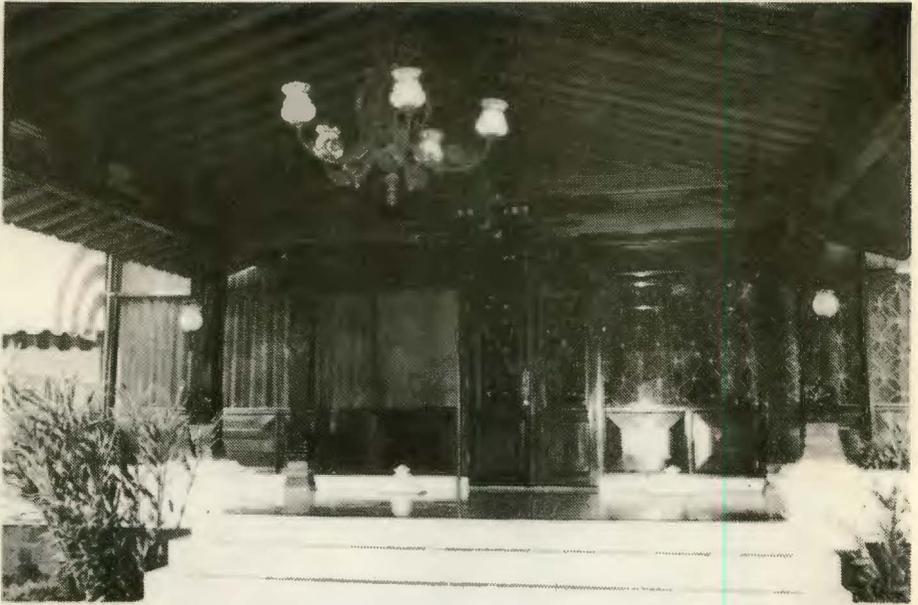
38. Tempat tidur untuk Tamu Agung dengan alas tempat tidur kain damash.



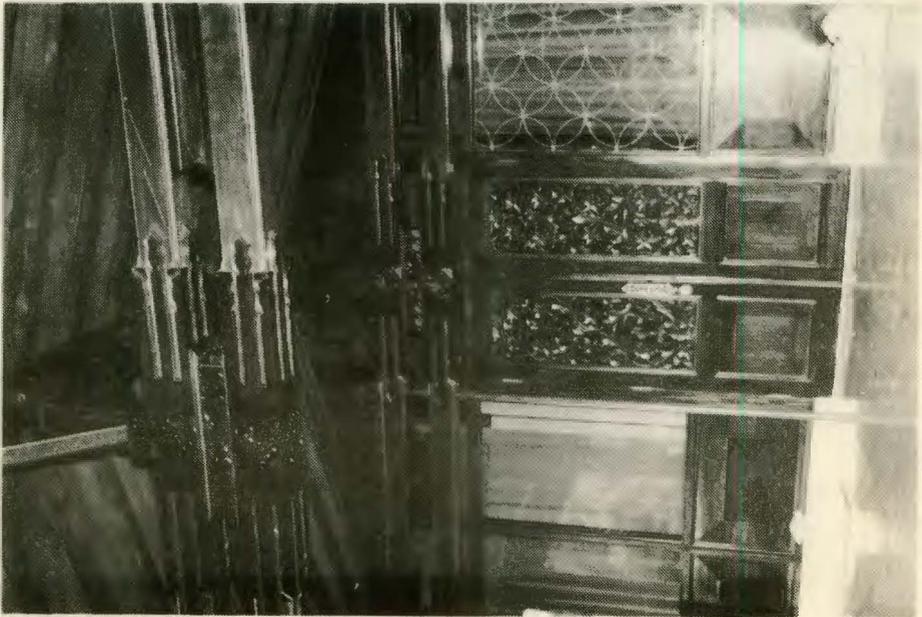
39. Ruang kerja Tamu Agung dengan perabotannya.



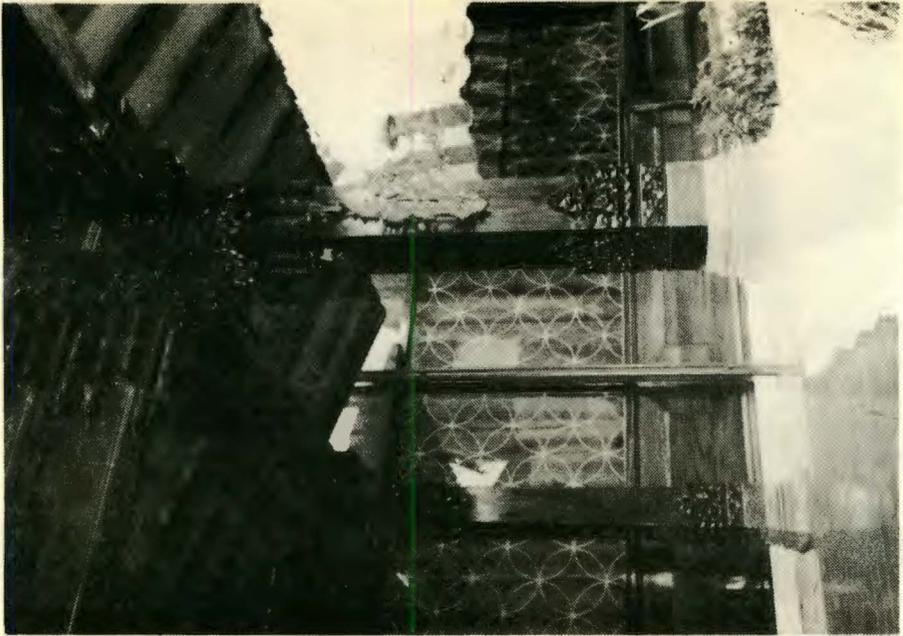
40. Tempat tidur isteri Tamu Agung Negara.



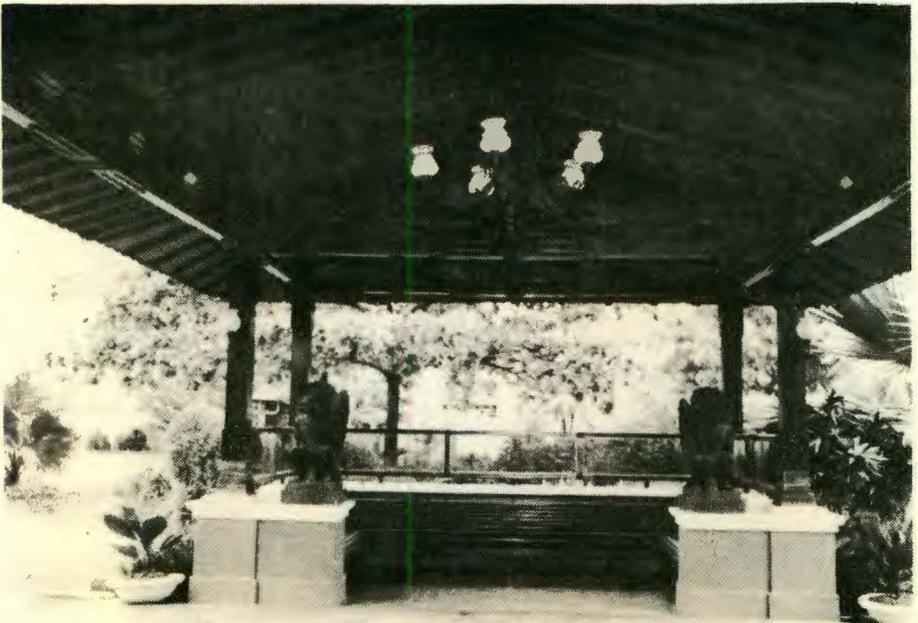
41. Serambi di depan kamar tidur Presiden dengan ragam hias ukir rumah Jawa.



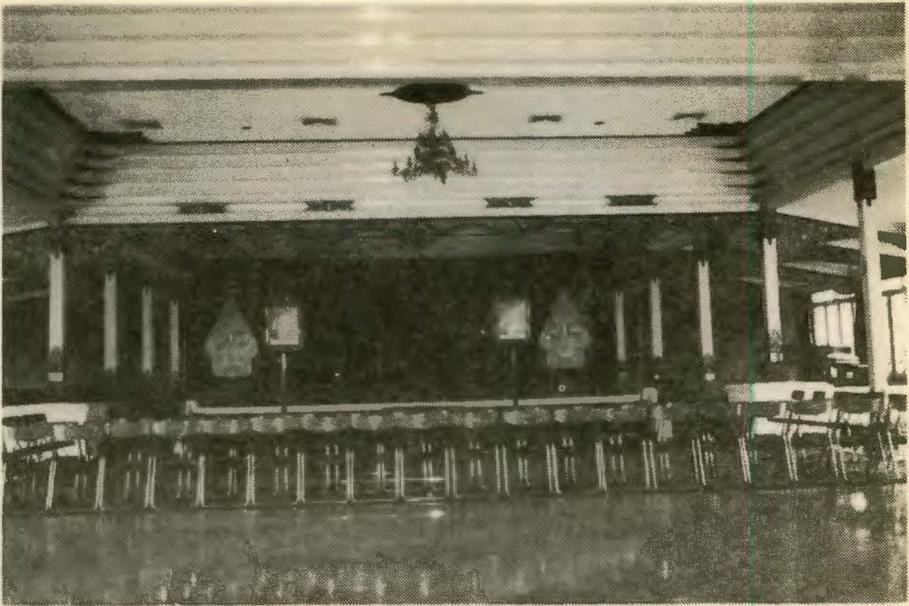
42. Daun pintu berukir krawangan (ajour relief)



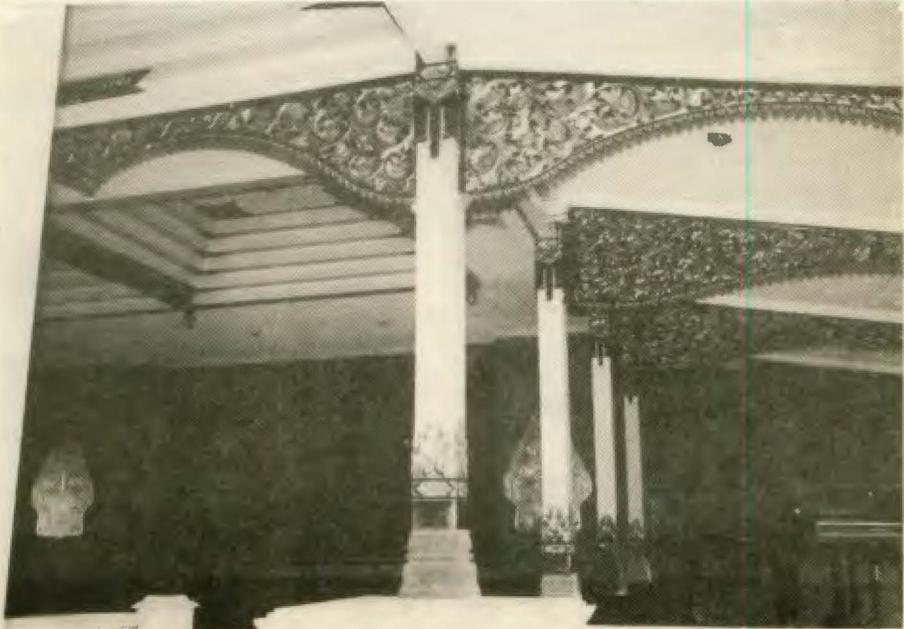
42 a. Belandar dan batang tiang beragam mirong dan tumpal.



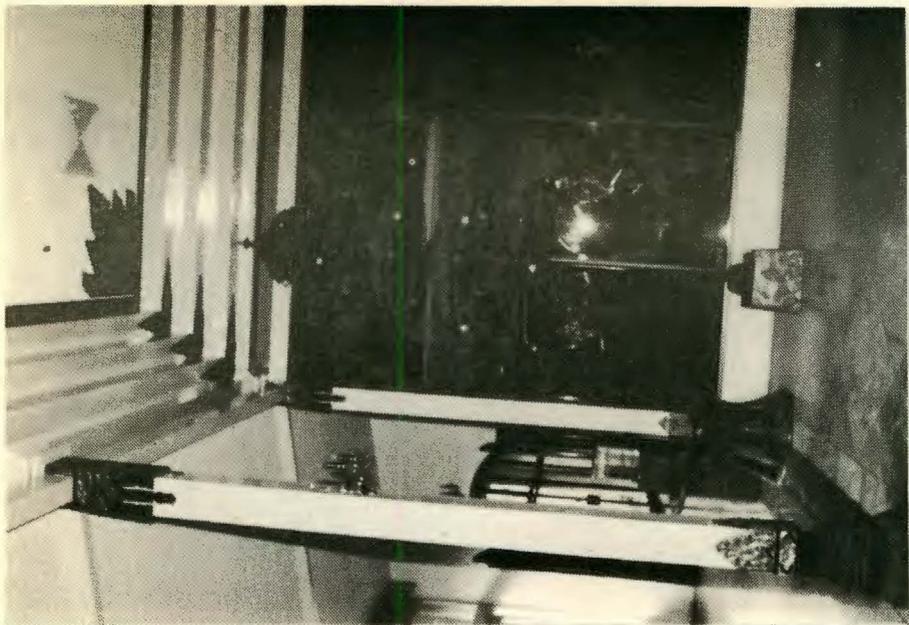
43. Pemandangan ke arah halaman Selatan.



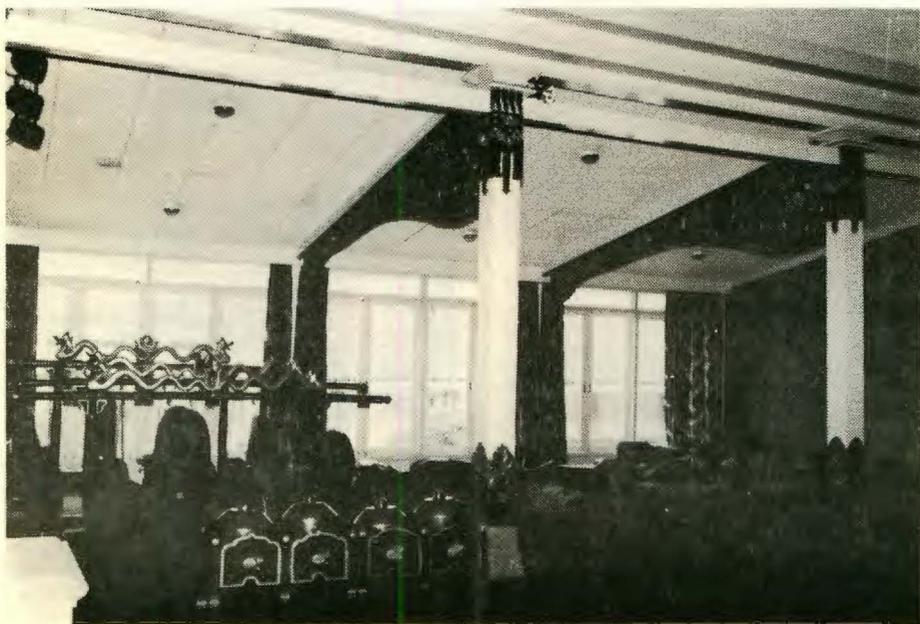
44. Pentas di Ruang Kesenian.



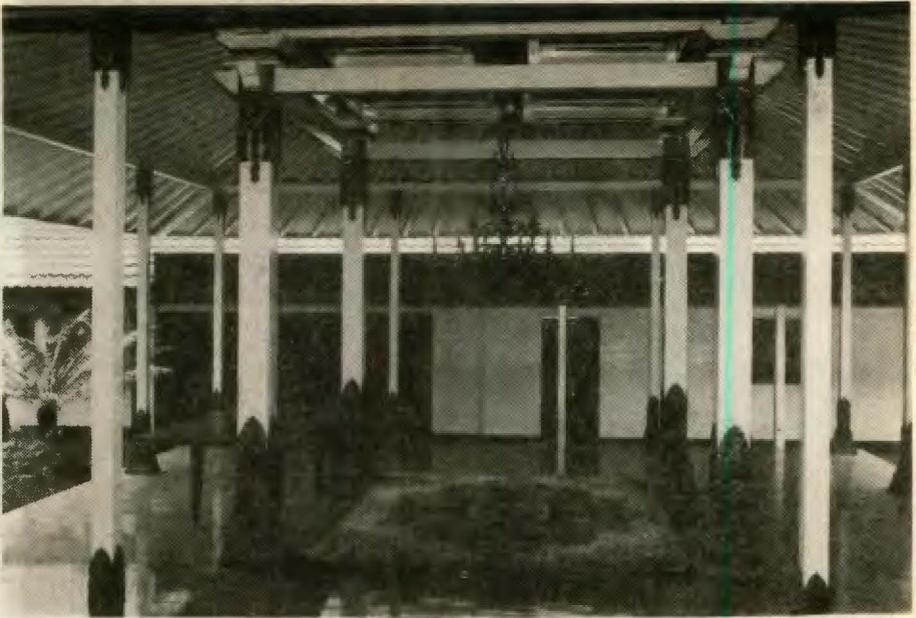
45. Ragam hias sulur bunga menghubungkan antar batang tiang dengan hiasan mirong.



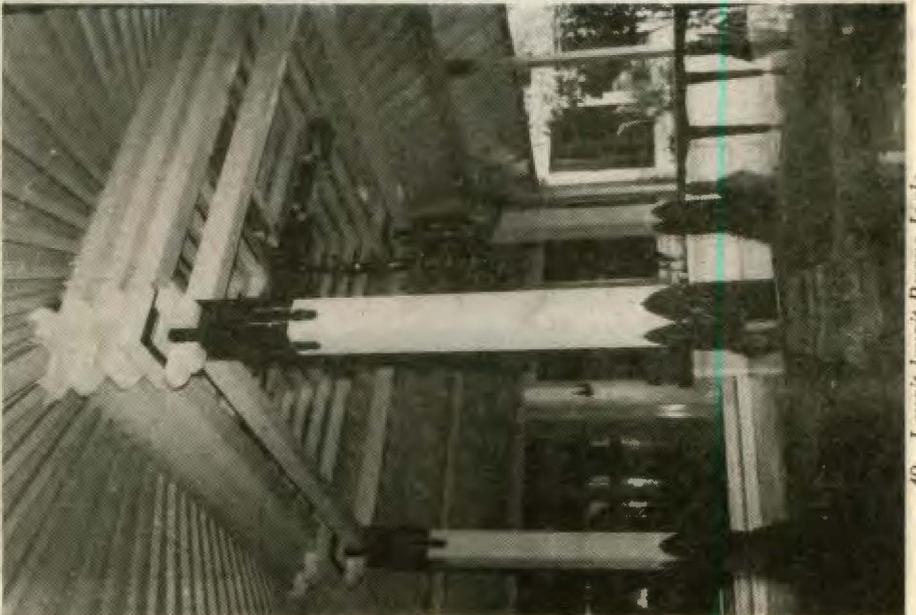
46. Sepasang Payung Agung menghiasi ruang Kesenian.



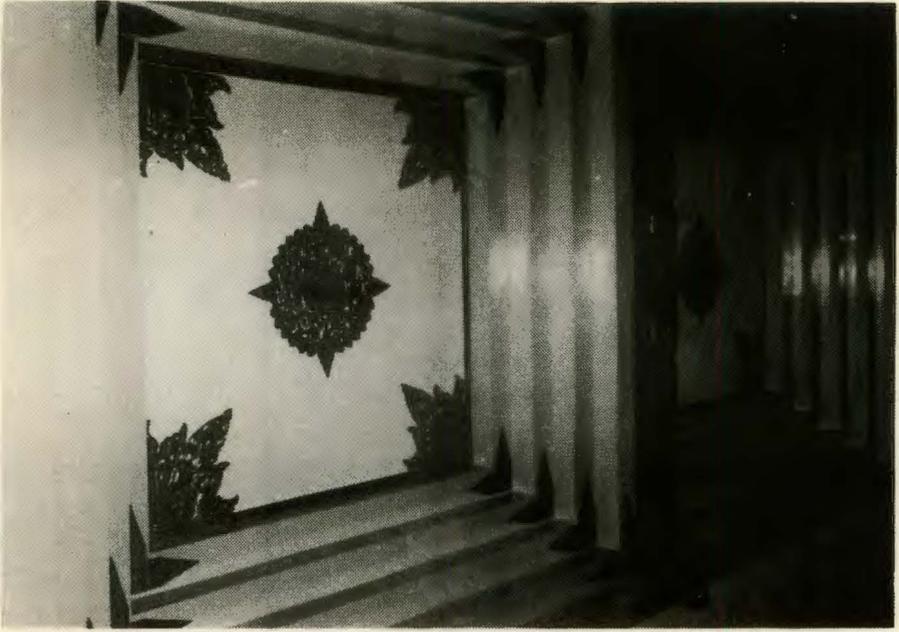
47. Dua perangkat gamelan Jawa dan satu piano vleugel pelengkap pentas Ruang Kesenian.



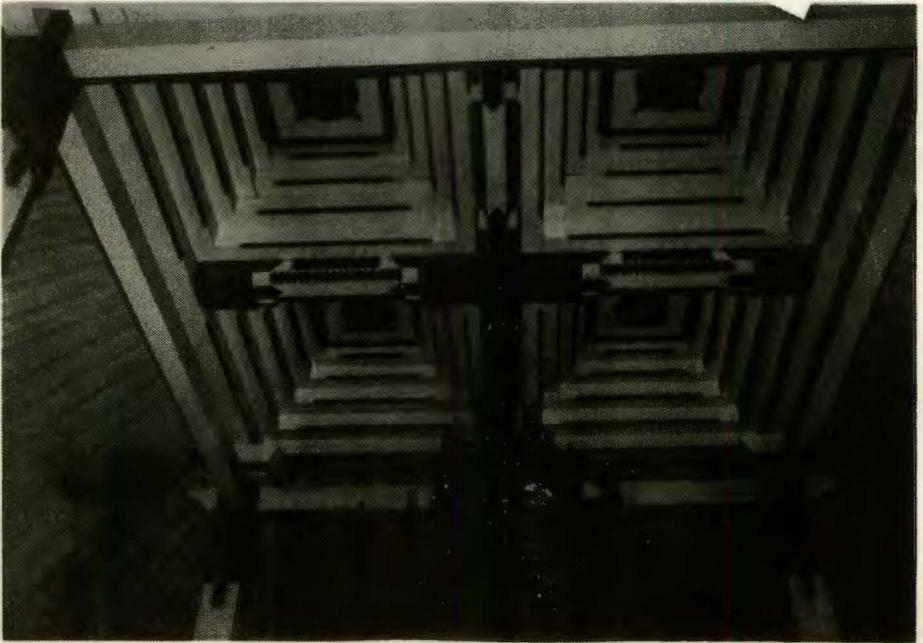
48. Ruang Joglo untuk transit, dahulu doorloop ke gedung samping Utara.



49. Langit-langit Ruang Joglo.



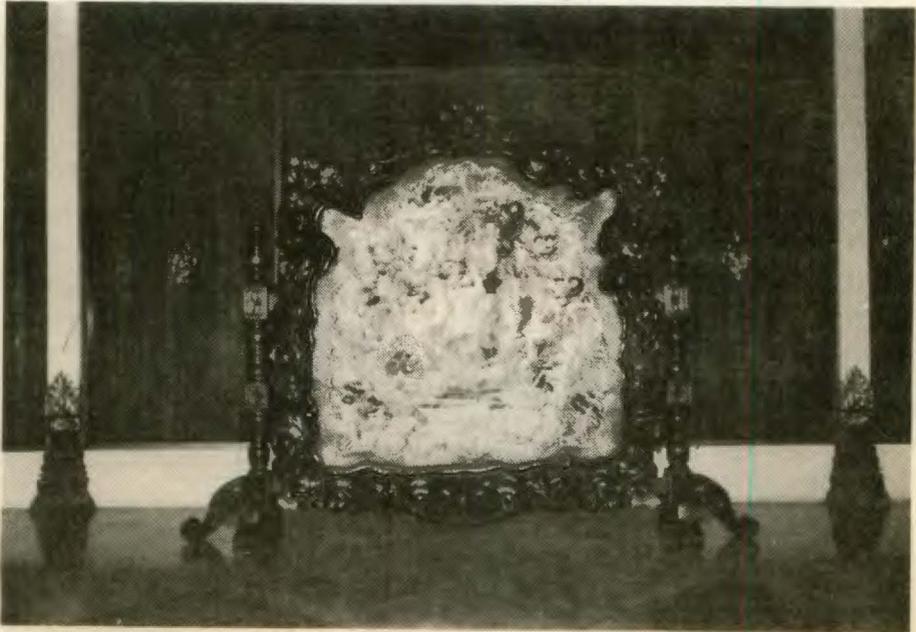
50. Detail langit-langit joglo di ruang Kesenian.



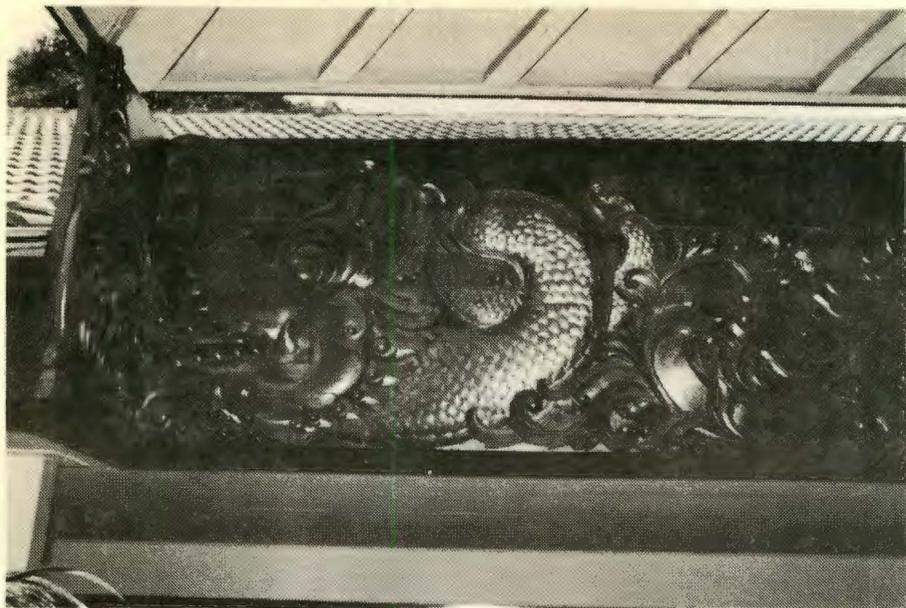
51. Langit-langit Ruang Joglo dengan lampu kandelair hasil kerajinan kuningan Juwana.



52. Ukiran Kala kerajinan Jepara penghias Ruang Joglo.



53. Schutsel (warana) dengan pahatan wayang fragmen Ramayana, Kumbakarna lawan pasukan kera.



54. Ukiran makara atau gajah-mina hasil kerajinan ukir Jepara, penghias Ruang Joglo.



55. Bangunan Kantor Asisten Residen yang kemudian dijadikan Wisma Negara.



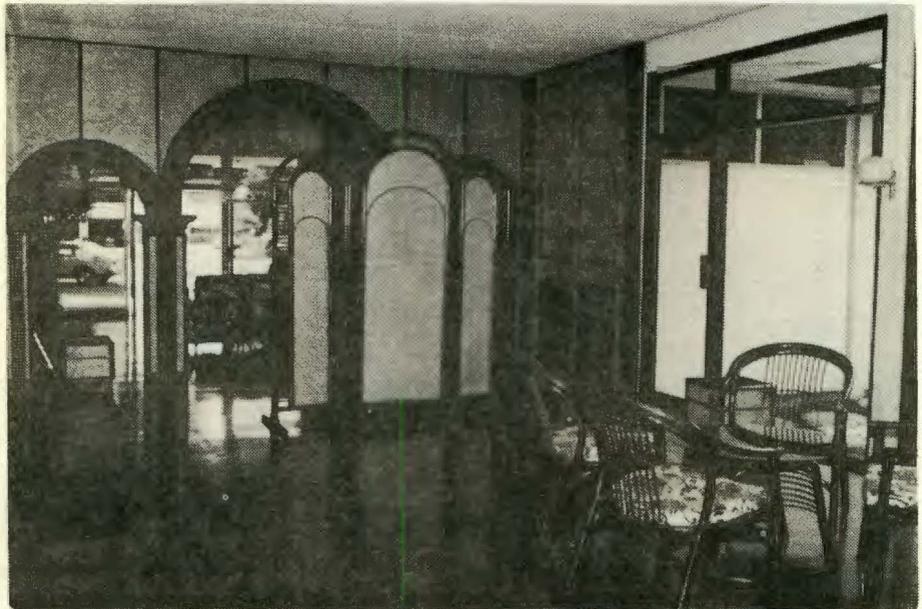
56. Salah satu tempat tidur dari Ruang Wisma Negara beserta perabotannya.



57. Ruang Tamu Wisma Negara dengan perabotan dan hiasan seluruhnya dari bahan rotan.



58. Ruang Tamu Wisma Negara dengan perabotan dari rotan.



59. Ruang Santai di Wisma Negara dengan perabotan dan hiasan seluruhnya dari bahan rotan.



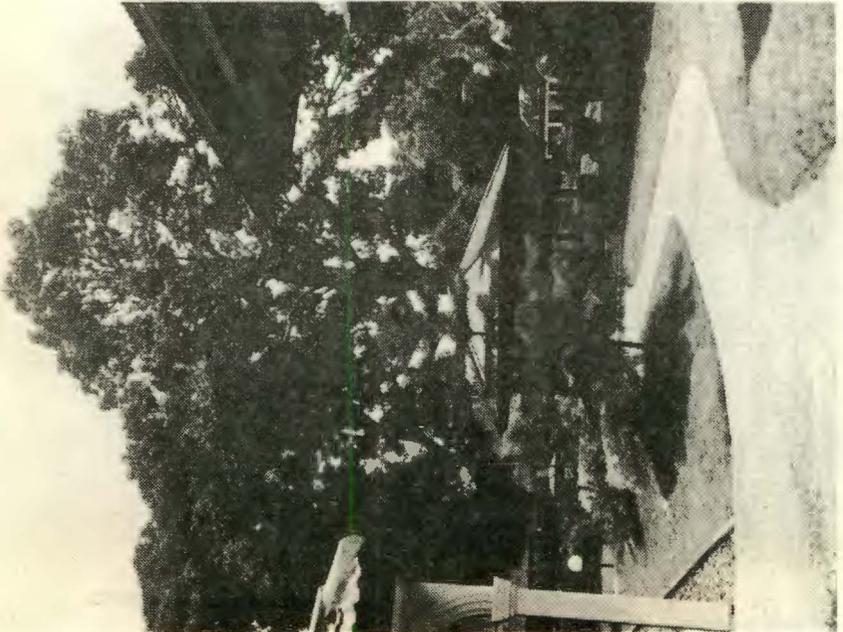
60. Ruang Makan Wisma Negara yang juga dengan perabotan seluruhnya dari rotan.



61. Salah satu pandangan petamanan di sudut Tenggara.



62. Serambi samping Utara, Fries dengan triglyphen dan methopen memberi kesan bangunan tampak rendah (tambun).



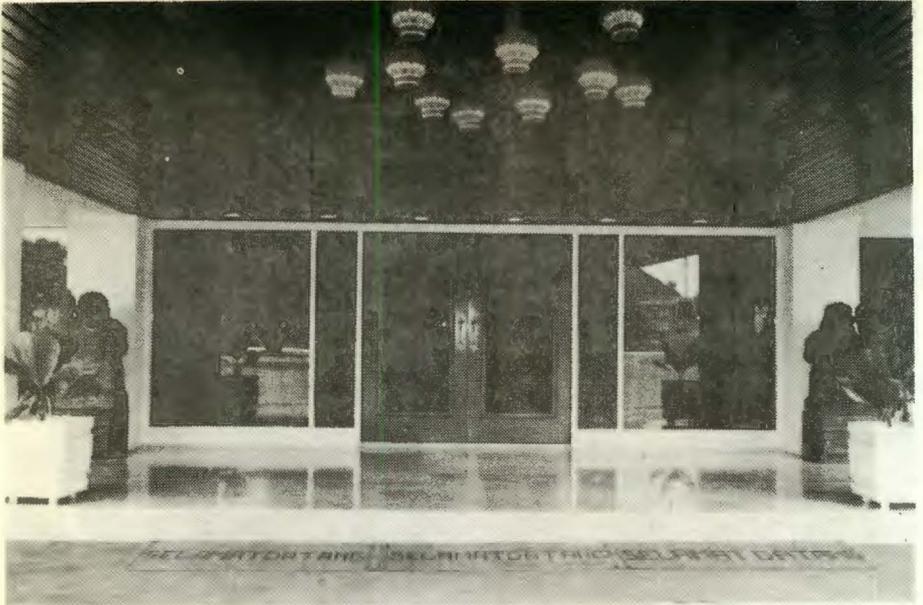
63. Halaman yang rimbun arah belakang indah.



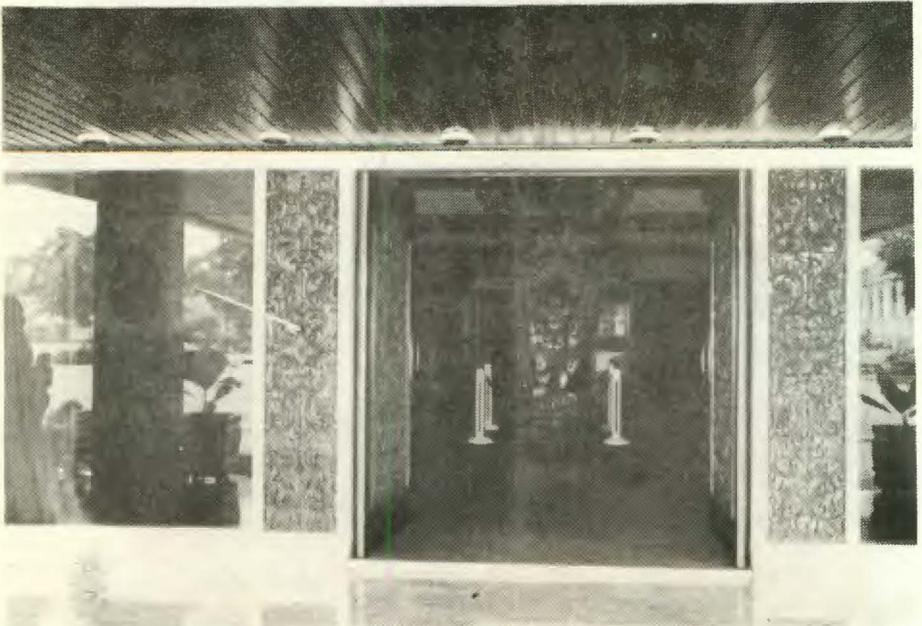
64. Kolam dahulu dengan sejumlah patung Jawa – Hindu mengelilinginya.



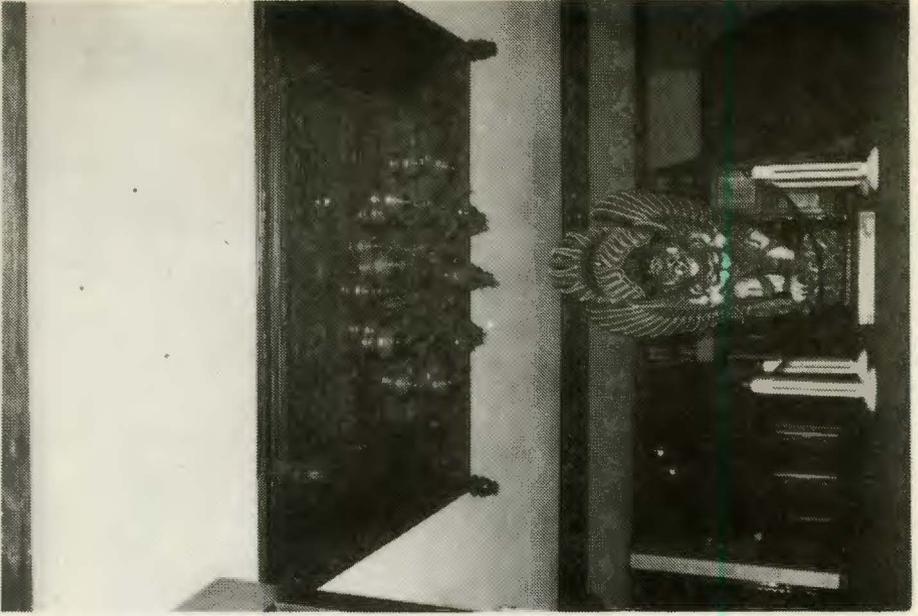
65. Wisma Negara yang baru dibangun dua lantai.



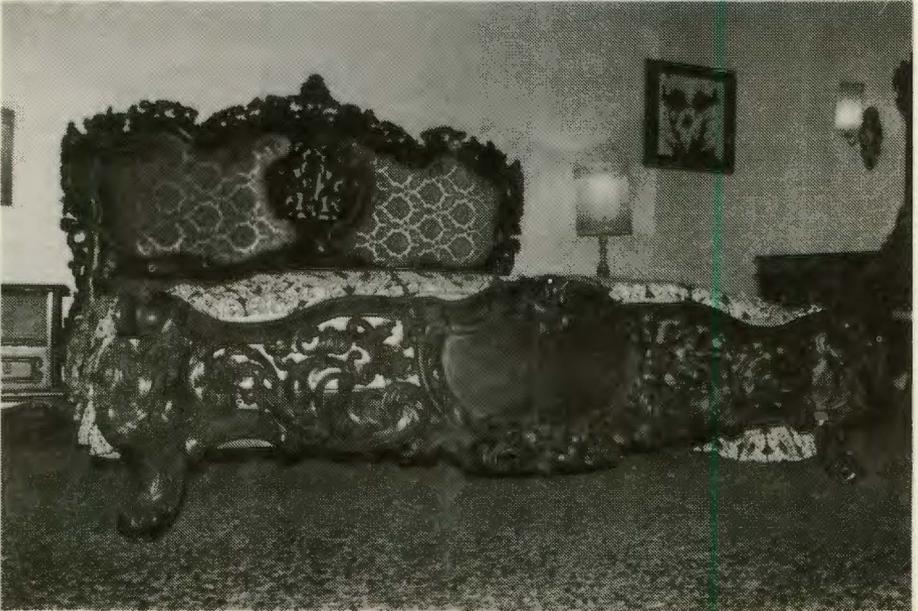
66. Serambi depan Wisma Negara dengan daun pintu berukir kerawangan (Jepara) dan lampu antik kerajinan Klaten.



67. Loby Wisma Negara dengan patung kayu Garuda, hasil karya seniman Bali.



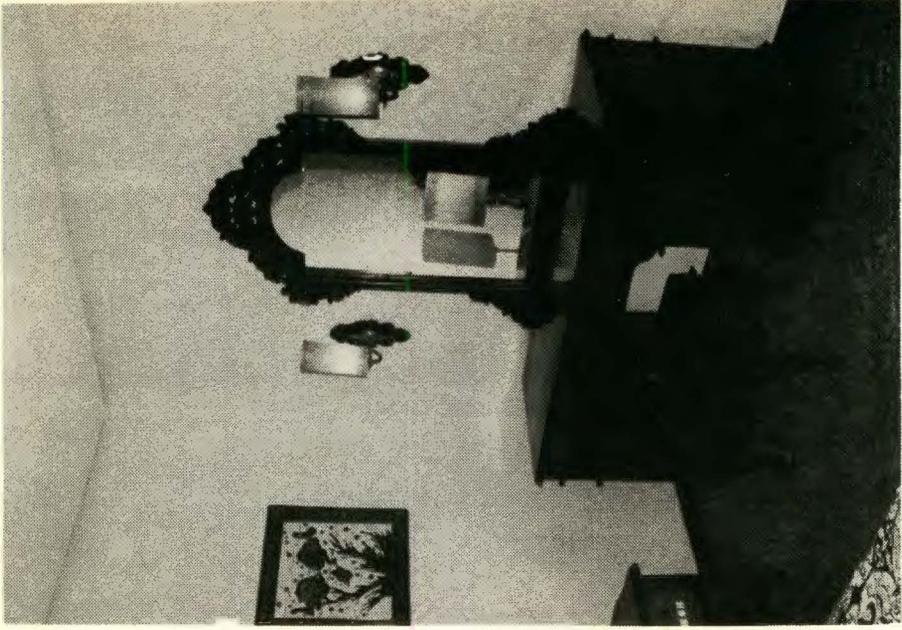
68. Loby Wisma Negara (detail).



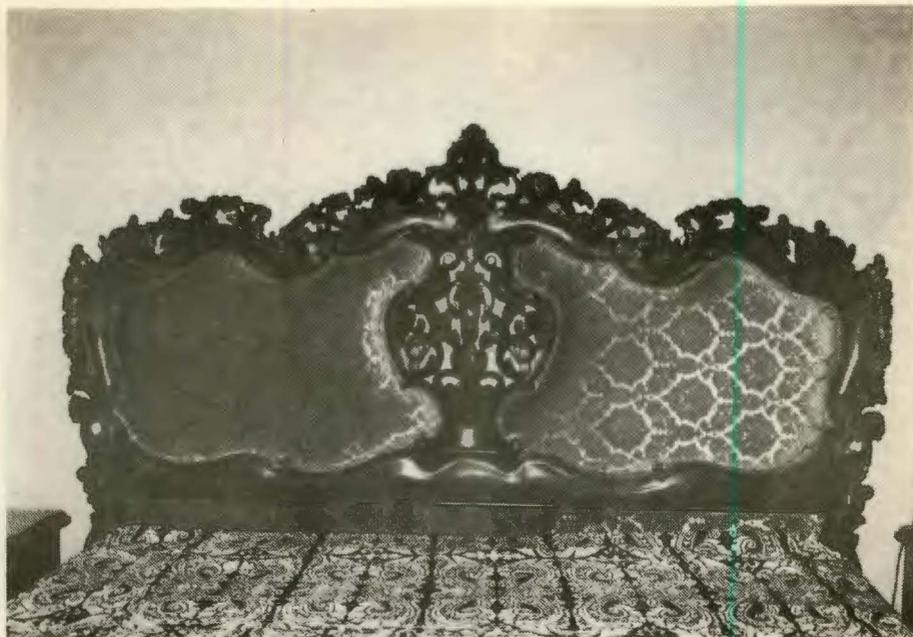
69. Tempat tidur ukir Jepara dengan motif hiasan Rococo (Wisma Negara Baru).



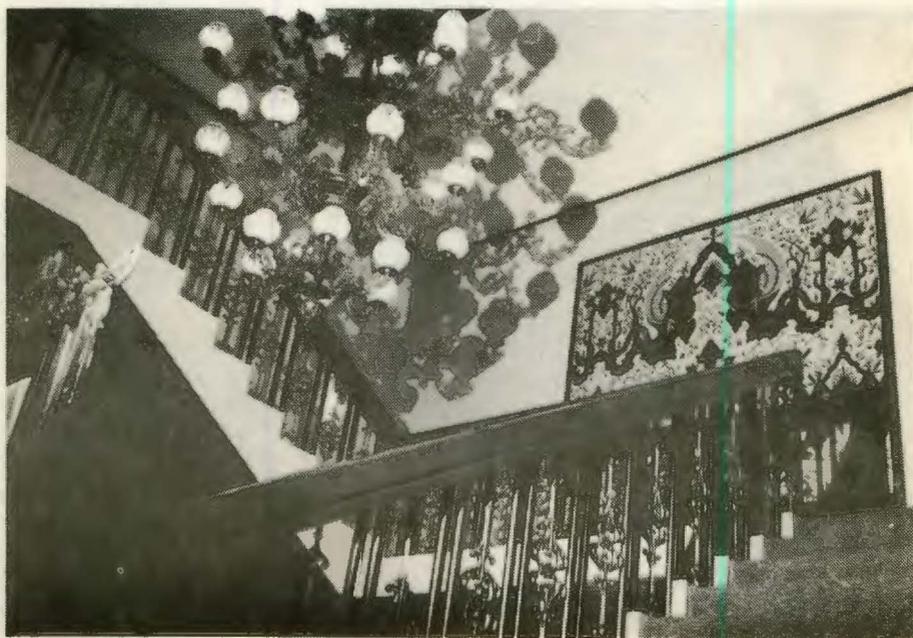
71. Almari ukir Jepara.



70. Cermin rias ukir Jepara.



72. Detail foto no. 69.



73. Tangga (wentel trap) Wisma Negara dengan lampu gantung besar



75. Lampu gantung hasil seni Batur (?)
Klaten, dengan langit-langit berukir Jepara.



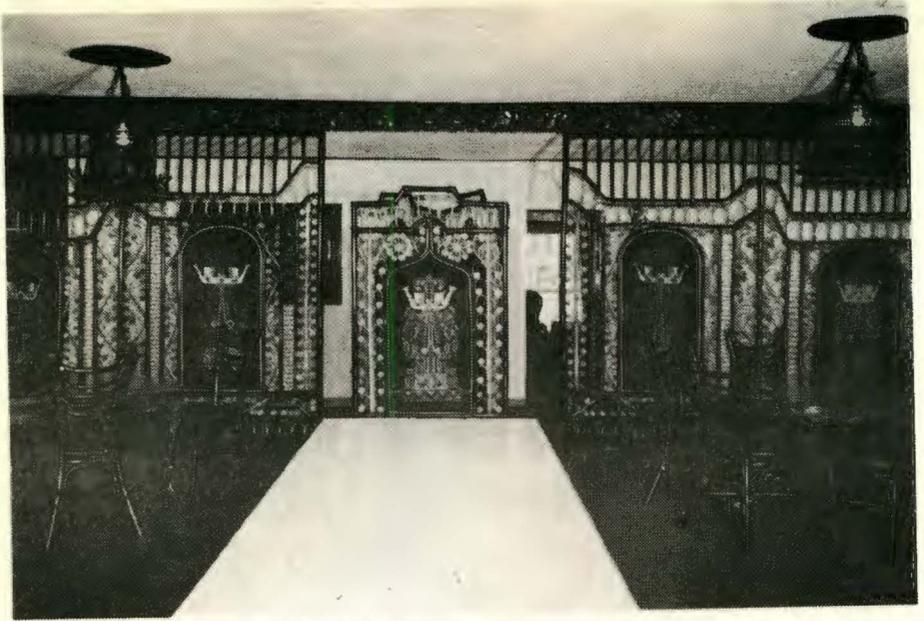
74. Ruang Pertemuan Kecil di Wisma Negara.



76. Ruang Pertemuan Kecil Wisma Negara.



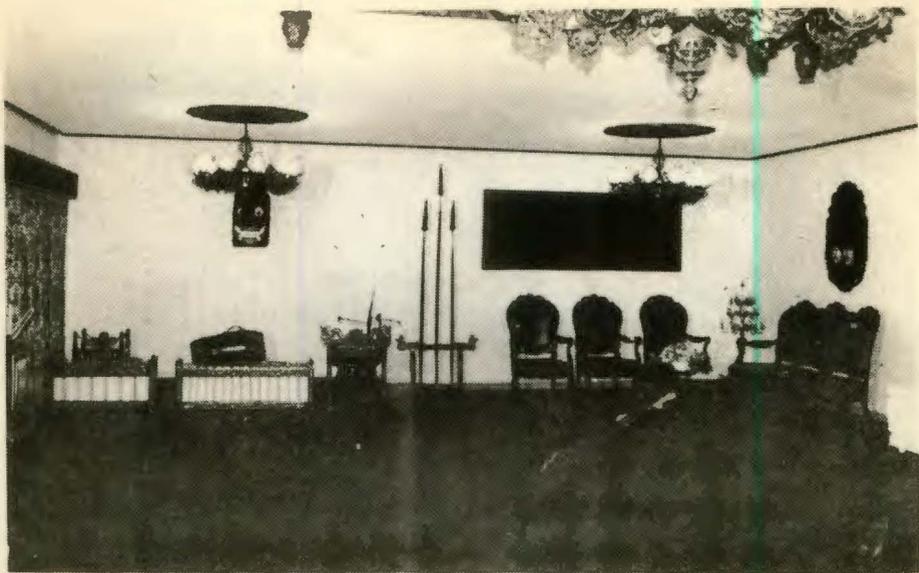
77. Ruang Makan Wisma Negara dengan perabotan seluruhnya dari rotan.



78. Ruang makan dengan perabotan dari rotan.



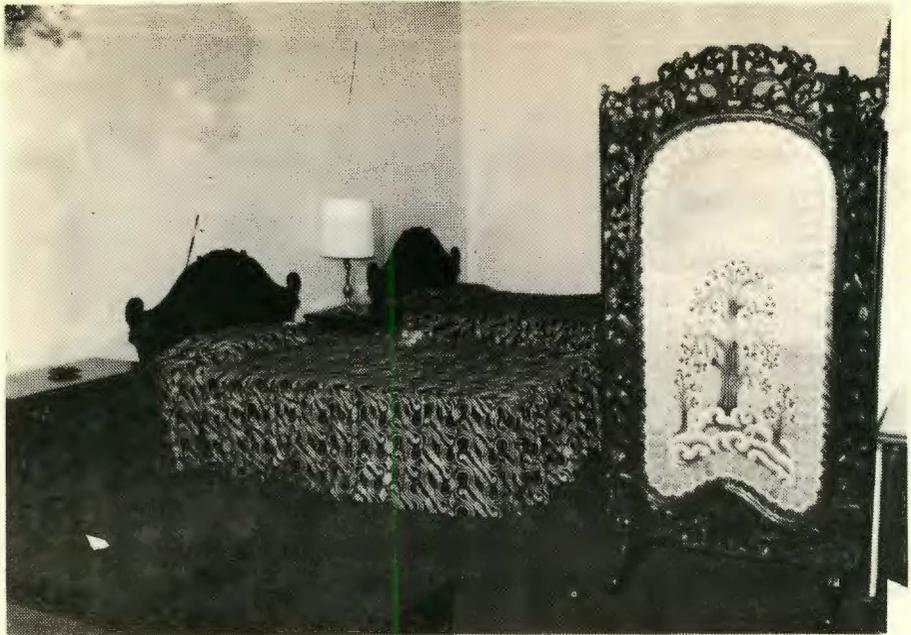
79. Sudut Ruang Makan dengan hiasan dan perabotan dari rotan.



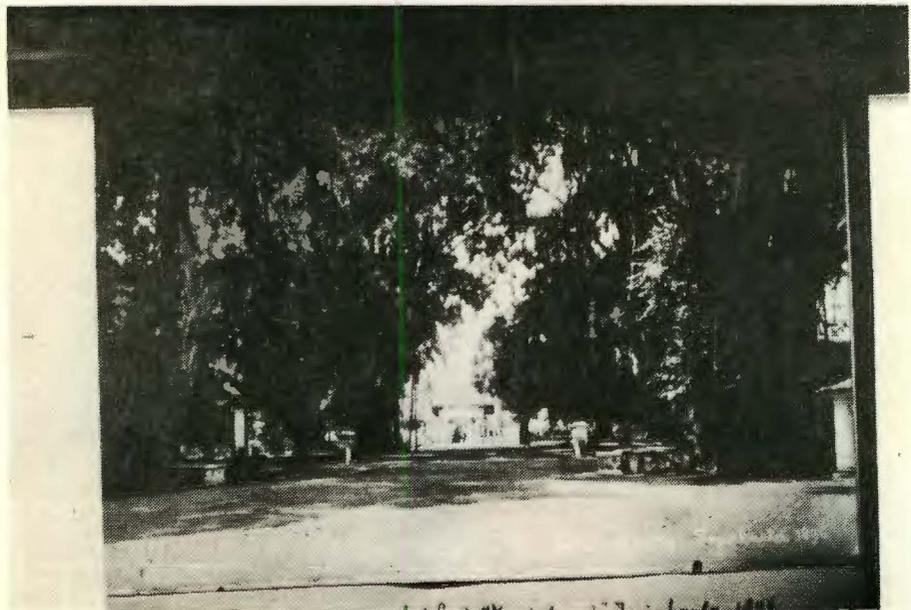
80. Ruang Kesenian kecil di Wisma Negara dengan seperangkat gamelan Jawa sederhana.



81. Lampu gantung hasil kerajinan cor logam Batur, Klaten.



82. Ruang Tidur dengan kelengkapannya di salah satu kamar Wisma Negara. Warana dengan lukisan kalpataru (pohon hayat).



a). Beteng Vrede(n)burg tepat di hadapan Gedung Agung. Bangunan bergaya/berciri Doria, yang didirikan sejaman dengan Gedung Loji Kebun.



b). Ruang Garuda/Pertemuan Gedung Agung sekarang, pada tahun 1896 adalah Ruang Singgasana (troonzaal) Gedung Karesidenan.



c). Ruang Makan dengan perabotannya bergaya Boroque/Rococo, adalah perabotan modern pada jamannya. Lampu-lampu gantung dan peralatan lainnya kini tidak lagi bersisa.



- d). Hiasan dinding berupa piring dan jambangan karya seni Tiongkok atau Eropa sangat didambakan keluarga Eropa, juga yang tinggal di Hindia Belanda. Demikian pula perabotan rumah tangga (almari, kursi, dsb) sebagai lengkapan rumah bangsawan, sungguhpun di rumah Residen Yogyakarta ini hasil karya seniman Jepara (kini tidak bersisa lagi).



- e). Ruang Kesenian Gedung Agung yang kini sangat anggun, dahulu (foto tahun 1896) adalah ruang (beranda) untuk berangin-angin. Iklim panas daerah tropik menyebabkan sangat diperlukannya ruang semacam ini, yang di negeri Belanda tidak mereka kenal.



f). Perabotan rumah tangga dari kayu ebben berukir serta hiasan porselin kebanggaan bangsawan Eropa abad XVIII – XIX juga menghias rumah Residen Yogyakarta (foto tahun 1986).



